

Rakyat Merdeka

OPTIMIS EKONOMI TERUS TUMBUH

R.M.id
Rakyat Merdeka

REDAKSI: 021-53699507 (EXT 727) FAKS: 021-53671716 LAYANAN IKLAN: FAX: 021-5333156 SERVIS PELANGGAN: 021-53674444

Rp 9.000 (LUAR P JAWA Rp 11.000)

BRI Salurkan KUR Rp 178,08 Triliun Sepanjang Tahun 2025, Lebih Dari 60% Mengalir Ke Sektor Produksi Penggerak Ekonomi Rakyat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat capaian positif dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun, sebagian besar penyalurannya mengalir ke sektor produksi. Fokus ini sejalan dengan Asta Cita, khususnya pada pilar penguatan ekonomi rakyat. Tercatat, sepanjang tahun 2025, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 178,08 triliun kepada 3,8 juta debitur.

Direktur *Micro* BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa BRI senantiasa berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah, terutama pada sektor-sektor produktif. Hal ini tercermin lebih dari 60% penyaluran kredit BRI diarahkan kepada usaha

yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan memperkuat ketahanan pangan.

"BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan sektor UMKM agar tetap sehat dan berkelanjutan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. BRI pun menyalurkan pembiayaan KUR disertai dengan pendampingan, sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga kapasitas usaha yang semakin kuat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Akhmad Purwakajaya.

Dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR BRI tetap didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, industri pengolahan,



dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,49% dari total penyaluran KUR BRI. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp 80,09 triliun atau setara 44,97%, dari keseluruhan KUR yang telah disalurkan BRI. Capaian ini merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil. Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI pun memastikan pemberian KUR dilakukan secara *prudent*, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan KUR merupakan kredit yang 100% bersumber dari dana bank, atau menggunakan dana perbankan yang berasal

dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kreditnya harus terjaga dengan baik.

Diketahui, penyaluran KUR BRI terhadap sebaran rumah tangga juga secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Desember 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI. Angka ini meningkat dibandingkan jangkauan KUR BRI pada tahun 2023 dan 2024 yang mencapai 15 rumah tangga dan 17 rumah tangga. Secara kumulatif, sejak tahun 2015 hingga akhir Desember 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 1.435 triliun kepada 46,4 juta penerima. ■

Gejolak Reda, Fundamental Ekonomi Kokoh Hari Ini Pasar Saham Cerah Dan Bergairah

Gejolak yang terjadi di pasar modal mereda. Fundamental ekonomi juga kuat. Dengan kondisi ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Selasa (2/2/2026), diprediksi akan cerah dan bergairah.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis, dengan perbaikan yang sudah dilakukan, pasar saham tidak akan "kebakaran" lagi, seperti pekan lalu. "Nggak. Pasti bergerak naiklah," ucap Purbaya, di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam.

Purbaya mengakui, pasar agak khawatir ketika terjadi penurunan IHSG yang drastis. Kemudian dilanjutkan

♦ BERSAMBUNG KE HAL 6

Vox Populi

CATATAN

Budi Rahman Hakim, Ph.D.

Keberanian Pertama

KEBERANIAN pertama selalu yang paling sulit. Bukan karena kurangnya nalar, melainkan karena besarnya risiko. Pada titik inilah negara diuji: apakah ia berani memulai langkah yang tidak populer, atau memilih aman dengan menunda. Banyak negara gagal bukan karena niat buruk, melainkan karena ketakutan kronis pada langkah awal.

Awal Februari menandai fase ketika kebijakan tak lagi bisa bersembunyi di balik rencana. Keputusan awal—yang menyentuh anggaran, subsidi, atau penertiban—meminta keberanian politik yang nyata. Setiap langkah membawa konsekuensi: resistensi elite, kegaduhan publik, atau biaya elektoral. Namun tanpa langkah itu, negara hanya bergerak di tempat.

Kita sering memuji stabilitas, tetapi lupa bahwa stabilitas tanpa keberanian adalah stagnasi yang disamarkan. Negara yang terlalu berhitung kehilangan momentum. Yang muncul bukan kehati-hatian, melainkan kelambanan yang berujung pada krisis kepercayaan. Rakyat membaca sinyal itu dengan cepat: jika awal saja ragu, bagaimana dengan langkah berikutnya?

Keberanian pertama juga mengandung etika prioritas. Ia menanyakan: siapa yang dilindungi lebih dulu ketika keputusan diambil? Yang kuat atau yang

♦ BERSAMBUNG KE HAL 6



KORBAN BENCANA BUTUH HUNTARA: Warga Aceh menggunakan kendaraan melintas di samping rumah yang hancur pascabencana banjir bandang di Desa Kuta Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Minggu (1/2/2026). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban banjir di Kabupaten Gayo Lues Aceh membutuhkan 2.659 unit hunian sementara yang direncanakan akan dibangun di 20 titik yang tersebar di tujuh kecamatan.

Bertemu Di Kertanegara 4

Prabowo & Sejumlah Tokoh Diskusi 5 Jam

PRESIDEN Prabowo Subianto menunjukkan gaya kepemimpinan terbuka. Sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah dirangkul dan diajak berdiskusi maraton hampir lima jam di kediamannya, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pertemuan tertutup itu digelar Jumat (30/1/2026) malam. Sejak sore hingga malam, kendaraan silih berganti ke-

luar-masuk kompleks Kertanegara. Aparat keamanan berjaga ketat. Pewarta tak bisa mendekat karena adanya rambu larangan masuk sekitar 150 meter dari rumah Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia menegaskan, tokoh-tokoh yang diundang bukan lawan politik pemerintah, melainkan figur masyarakat yang

selama ini aktif memberikan pendapat. "Tidak ada oposisi. Mereka tokoh-tokoh masyarakat. Bapak Presiden sangat terbuka berdialog dan menerima masukan," ujar Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Sejumlah nama yang hadir antara lain Peneliti Senior BRIN Prof. Siti Zuhro, mantan Kabareskrim Polri

♦ BERSAMBUNG KE HAL 6

Buntut IHSG Anjlok

Polri & Kejagung Turun Tangan

ANJLOKNYA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu mengundang kecurigaan adanya aksi curang dengan "menggoreng" harga saham. Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pun turun tangan untuk mencermati dugaan pelanggaran ini.

Polri bergerak lebih dulu. Direkto-

rat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mendalami indikasi tindak pidana terkait dugaan praktik saham gorengan yang disinyalir menjadi penyebab anjloknya IHSG.

"Pasti (didalami)," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak, di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ade menerangkan, kasus yang berkaitan dengan saham gorengan sudah lama menjadi fokus Polri.

"Saat ini, penyidik Dittipideksus

♦ BERSAMBUNG KE HAL 6



VERSI DIGITAL ARTIKEL INI, SILAKAN SCAN QR CODE

Dipastikan Rosan

Tak Ada Perombakan Direksi Bank Himbara

ISU bongkar-pasang direksi bank-bank pelat merah dipastikan angin lalu. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menegaskan, tak ada agenda perombakan jajaran direksi maupun komisaris bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Penegasan itu disampaikan Rosan

untuk meredakan spekulasi yang belakangan ramai beredar di ruang publik. Ia memastikan, hingga kini tidak pernah ada pembahasan di internal Danantara terkait perubahan komposisi pimpinan bank-bank BUMN.

♦ BERSAMBUNG KE HAL 6

Pemerintah Buru Pemodal & Pendukung Penambang Ilegal

PEMERINTAH tak lagi sekadar mengejar penambang kelas teri. Kini, pemodal dan pihak-pihak yang membekingi tambang ilegal resmi diburu. Negara memastikan, siapa pun di balik praktik penggarangan kekayaan alam akan disikat, tanpa pandang bulu.

Komitmen itu ditegaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae menegaskan, fokus penindakan diarahkan kepada aktor utama tambang ilegal, yakni pemodal dan pihak pendukung yang selama ini beroperasi di balik

layar. "Target kita pemodal dan yang mendukung. Penegakan hukum tetap berjalan meski oknum yang dimaksud memiliki jabatan tertentu," tegas Jeffri dalam podcast di kanal YouTube Kementerian ESDM, dikutip Minggu (1/2/2026).

Jeffri menilai, penindakan tambang ilegal selama ini kerap tidak adil. Pelaku lapangan ditindak, sementara pihak yang menikmati keuntungan terbesar justru lolos dari jerat hukum. "Tidak adil kalau hanya rakyat kecil yang ditindak. Ikan paus dong yang kita kejar. Mana ada orang mancing teri? Yang kita pancing ikan besar,"

ujarnya. Jeffri mengakui, pemberantasan tambang ilegal menghadapi tantangan besar. Banyak lokasi tambang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Saat aparat turun ke lapangan, pelaku sering kali sudah lebih dulu kabur.



VERSI DIGITAL ARTIKEL INI, SILAKAN SCAN QR CODE

"Ada banyak tambang ilegal di daerah yang tidak bisa kita jangkau. Begitu kita datang, orangnya seperti bayangan," katanya. Meski pelaku kerap lolos, hasil tambang ilegal tetap bisa disita. Kementerian ESDM mencatat, berbagai komoditas seperti bauksit, batu bara, hingga nikel hasil tambang ilegal telah diamankan dan dikembalikan ke negara.

"Semua hasil tambang ilegal kita sita. Bauksit, batu bara, nikel. Negara tidak boleh terus dirugikan," tegas Jeffri.

Upaya penindakan ini juga diperkuat lewat penelusuran aliran dana.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah.

Koordinasi itu menindaklanjuti temuan perputaran dana PETI yang nilainya tembus Rp 992 triliun.

"Ini sedang kami konfirmasi dengan PPATK. Hak negara harus dikembalikan," tegas Yuliot.

Ia menjelaskan, penelusuran transaksi keuangan membutuhkan analisis

♦ BERSAMBUNG KE HAL 6

GOSIP JALANAN

Politisi Senior Jarang Dilibatkan Dalam Kegiatan Partai

Seorang politisi senior kecewa karena jarang dilibatkan dalam berbagai kegiatan partai. Dia dianggap jadi saingan ketua umum sehingga kekuatannya mulai dilemahkan. Beberapa loyalisnya juga mulai meninggalkan politisi senior ini. ■

Kinerjanya Dianggap Efektif

Satgas Penertiban Kawasan Hutan Apakah Layak Dipermanenkan?

SATUAN Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) diusulkan untuk dipermanenkan, setelah dinilai menunjukkan kinerja yang efektif dalam menertibkan kegiatan usaha ilegal di kawasan hutan.

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Satgas PKH dibentuk pada awal 2025 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

Satgas ini berstatus lembaga lintas kementerian dan lembaga yang bersifat ad hoc, dengan tugas utama menegakkan hukum, melakukan au-

dit, serta menertibkan penggunaan kawasan hutan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH melibatkan berbagai instansi, antara lain Kejaksaan, TNI, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial, serta kementerian terkait seperti Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ESDM, dan Keuangan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan bahwa hingga awal 2026, Satgas telah memberikan sanksi administratif kepada 83

perusahaan perkebunan sawit yang terbukti beroperasi di dalam kawasan hutan. Dari sanksi tersebut, total denda yang telah disetorkan ke negara mencapai Rp 4,76 triliun.

"Dari 83 korporasi yang dikenai sanksi, sebanyak 41 perusahaan telah melunasi kewajibannya," kata Barita Simanjuntak di Gedung BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/1/2026).

Namun demikian, Barita menyebutkan masih terdapat delapan perusahaan yang tidak memenuhi panggilan Satgas meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali. Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Satgas PKH akan mengambil langkah tegas.

"Terhadap korporasi yang tidak hadir dan tidak kooperatif, Satgas akan melakukan langkah-langkah penertiban termasuk upaya hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi," tegasnya.

Melihat capaian tersebut, Firman Soebagyo menilai Satgas PKH layak dipermanenkan dan tidak lagi bersifat sementara. Menurutnya, status permanen akan memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan dan sumber daya alam.

Selain itu, Firman juga mengusulkan agar Satgas PKH tetap berada langsung di bawah Presiden guna mempercepat koordinasi lintas kementerian

dan lembaga, serta memastikan kebijakan penertiban kawasan hutan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berbeda, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan mengatakan usulan perubahan status Satgas PKH harus dibahas dengan cermat dan hati-hati, sebab ada potensi tumpang tindih kewenangan, jika Satgas PKH dipermanenkan.

Apakah akan membebani APBN juga? Nah, untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Firman Soebagyo dan Gurnadi Ridwan terkait usulan Satgas PKH dipermanenkan, berikut petikan wawancaranya.

FIRMAN SOEBAGYO
Anggota Komisi IV DPR

Akan Memperkuat Penegakan Hukum



Selama ini, pengawasan kawasan hutan kerap bersifat reaktif dan temporer. Padahal, kejahatan kehutanan itu sistematis dan terorganisir. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak hutan dan merugikan masyarakat.



ANDA mendorong agar Satgas PKH dipermanenkan?

Kami mendorong penguatan kelembagaan Satuan Tugas Pencegahan dan Perusakan Kawasan Hutan (Satgas PKH) agar tidak lagi bersifat ad hoc. Satgas PKH harus naik kelas menjadi badan permanen supaya pengawasan dan penindakan di kawasan hutan bisa dilakukan secara berkelanjutan.

Apa landasan hukumnya?

Landasan hukumnya sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 secara eksplisit mengamanatkan adanya instrumen negara yang kuat dan berkelanjutan untuk mencegah serta menindak perusakan kawasan hutan. Artinya, negara memang diwajibkan memiliki lembaga yang fokus dan berkesinambungan dalam urusan ini.

Jika permanen, apakah berada di bawah Presiden?

Satgas PKH dapat didefinisikan menjadi Badan Pencegahan dan Perusakan Kawasan Hutan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan posisi tersebut, koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan jauh lebih efektif.

Apa manfaat utama dari perubahan status tersebut?

Perubahan status ini penting agar perlindungan kawasan hutan tidak bergantung pada kebijakan sementara atau pergantian pemerintahan. Badan yang berada langsung di bawah Presiden akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kokoh serta stabilitas kelembagaan dalam menjalankan tugasnya.

Selama ini, pengawasan kawasan

hutan kerap bersifat reaktif dan temporer. Padahal, kejahatan kehutanan itu sistematis dan terorganisir. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak hutan dan merugikan masyarakat.

Apa saja fungsi yang bisa dijalankan jika menjadi badan permanen?

Badan Pencegahan dan Perusakan Kawasan Hutan nantinya dapat menjalankan fungsi yang komprehensif, mulai dari pencegahan melalui pengawasan aktivitas ilegal, penindakan lewat penyelidikan dan penyidikan, hingga rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak.

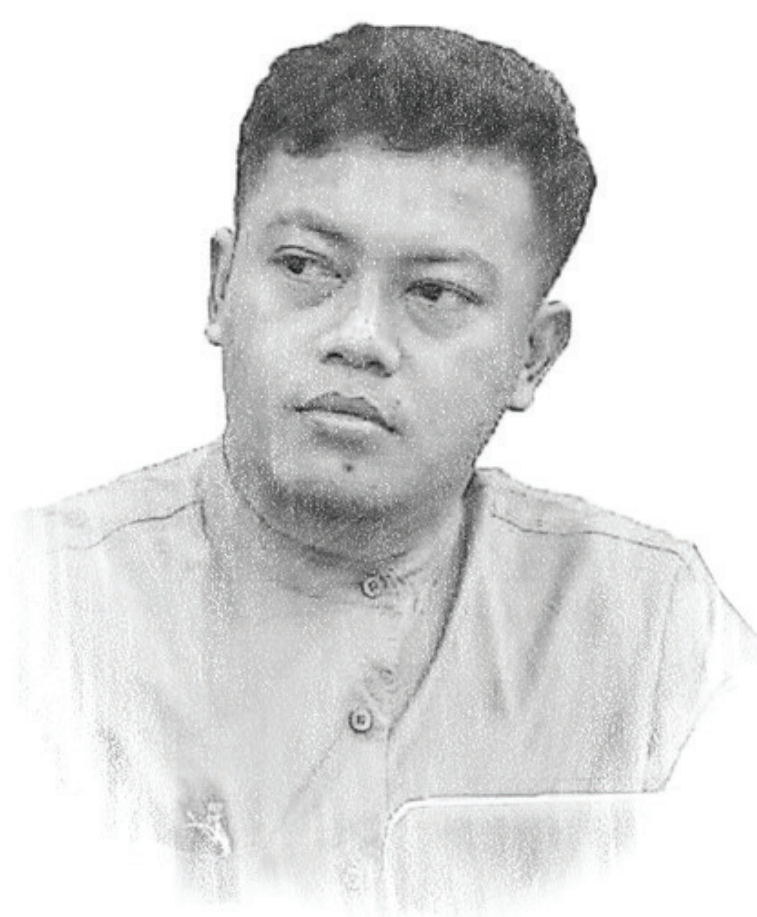
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. ■ REN

GURNADI RIDWAN
Peneliti FITRA

Akan Membebani APBN & Utang Baru



Pemerintah sering kali membentuk kebijakan tanpa didukung naskah akademik yang kuat dan partisipasi publik yang memadai. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.



BAGAIMANA Anda melihat kinerja Satgas PKH selama ini?

Satgas PKH lahir dari Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dan sepanjang terbentuknya saya melihat efektivitasnya cukup baik. Satgas ini bekerja lintas sektor dan lintas instansi, dengan lead sector Kejaksaan, serta melibatkan Polri, TNI, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi lainnya. Itu menjadi kelebihan utama Satgas PKH.

Sebagai satuan tugas ad hoc, Satgas PKH relatif cepat, tegas, fokus, dan mampu menangani persoalan-persoalan spesifik seperti illegal logging, pertambangan ilegal, hingga penggunaan kawasan hutan tanpa izin.

Apa contoh keberhasilan Satgas PKH yang menonjol?

Salah satu keberhasilan yang cukup

signifikan adalah pengembalian sekitar 4.700 hektare kawasan hutan di Tesso Nilo. Selain itu, Satgas juga menangani wilayah pertambangan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan serta pengamanan sejumlah aset negara. Dari sisi efektivitas kerja, ini patut diapresiasi.

Bagaimana jika Satgas PKH dipermanenkan menjadi lembaga?

Ketika bicara permanenisasi, memang ada kelebihan karena lembaga permanen bersifat berkelanjutan. Tetapi ini perlu dikaji secara hati-hati. Jangan sampai pembentukan kelembagaan baru justru menimbulkan persoalan baru.

Apa yang perlu menjadi perhatian utama?

Pertama, soal kajian kebijakan. Pemerintah sering kali membentuk kebijakan tanpa didukung naskah

akademik yang kuat dan partisipasi publik yang memadai. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Kedua, dampak terhadap APBN. Kondisi APBN saat ini cukup terbatas dan bahkan berpotensi menambah utang baru. Jika Satgas PKH menjadi lembaga permanen, ada risiko biaya operasional menjadi jauh lebih besar.

Apakah ada risiko tumpang tindih kewenangan?

Selama ini Satgas PKH bekerja lintas kementerian dan lembaga. Jika kemudian menjadi lembaga tersendiri, ada potensi tumpang tindih dengan Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Kehutanan. Pertanyaannya nanti, apa pembeda utama lembaga baru ini dengan institusi yang sudah ada? ■ REN

Rakyat Merdeka

THE POLITICAL NEWS LEADER

Terbit Sejak 22 April 1999

Direktur Utama:
Kiki Iswara Darmayana

Direktur:
Triphonia Istiarni, Maria Hanief, Ratna Susilowati

Dewan Kebijakan Redaksi:
Karim Papatungan, Supratman

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab:
Riky Handayani

Wakil Pemimpin Redaksi:
Kartika Sari

Kepala Redaktur Eksekutif:
Muhammad Rusmadi, Wahyu Suryani, Sarif Hidayat

Pemimpin RM Digital:
Firsty Hestyarni

Redaktur Eksekutif:
Abdul Shomad, Aditya Nugroho, Anggowa Adi Septaningrat, Aulia Darwis, Daud Fadhillah, Esti Fitri Wulandari, Fiki Aziz, Rifni M, Ujang Sunda

Asisten Redaktur Eksekutif:
Bambang Trismawan, Dede Hermawan, Fazry, Marula Sardi, Oktavian Surya Dewangga, Romdony Setiawan, Siswanto, Widia Saputra

Reporter:

Ade Al Kautsar, Ahmad Latif Rosyidi, Alfian Sidik, Bayu Prihartanto, Boy Sakti Hapsoro, Danu Arifinoto, Diananda Rahmasari, Didi Rustandi, Dwi Khani, Edy Burnama, Fajar El Pradianto, Faqih Mubarak, Haikal Amirullah, Hendrawan Kosim Wijaya, Irandi Kasmara, Irma Yulia, Kintan Pandujati, Khairul Umam, Merry Apriyani, Mentari Kusumawardhani, Nana Maulana, Nur Rochmanuddin, Novalliyandi, Ospi Darma, Paul Yoanda, Susito Yekti

Wartawan Foto:

Sophan Wahyudi (Koordinator), Ali Futuhin (Wakil), Dwi Pambudo, Indra Hardi, Khairizal Anwar, M Qori Haliana, Ng Putu Wahyu Rama, Randy Tri Kurniawan, Rizky Syahputra, Tedy Octariawan Kroen, Wahyu Dwi Nugroho

Pracetak:

Fauzan Sojana (Koordinator)

Telp: 021-53699507, Hotline Pemasaran: 021-53699507, Jalur WhatsApp: Redaksi 081298336822 (Sri Nurganingsthi), Iklan 081315155825 (Muansil), 0816121764 (Heru), Layanan Pelanggan 081299666675 (Toni)

Harga Iklan: 99.000/mmik (FC), 85.000/mmik (BW). Harga Langganan Koran: Rp200.000/ bulan (Belum termasuk ongkos kirim)

Rekening Bank BCA KCP Palmerah 229.300.8515 an PT Wahana Ekonomi Semesta

Revisi UU PKH

Baleg DPR: Masih Perlu Harmonisasi

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR Martin Manurung menilai, revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) masih membutuhkan harmonisasi lanjutan. Salah satunya dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) agar tidak terjadi pertentangan norma dalam tata kelola dana haji.

Menurut Martin, harmonisasi jadi kunci agar produk legislasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan konsistensi kelembagaan. "Agak sulit kita untuk memuatkan sekarang, karena UU Penyelenggaraan Ibadah Hajinya juga sudah diputus. Lalu kita masih menunggu modeling dari P2SK," ujarnya, kemarin.

Dia bilang, kompleksitas pembahasan meningkat karena regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan penguatan sektor keuangan belum sepenuhnya sinkron. Sehingga, Baleg perlu memastikan tidak ada pertentangan norma antara satu UU dengan yang lainnya.

Baleg, sambungnya, bertanggung jawab memastikan tidak ada pertentangan norma antar UU. "Harmonisasi substansi, kewenangan, serta sistem pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas regulasi pengelolaan dana umat," terangnya.

Martin menjelaskan, UU P2SK membawa implikasi besar terhadap pembahasan revisi UU PKH. Penguatan sektor keuangan nasional akan berdampak langsung pada mekanisme pengawasan dan tata kelola dana publik. Itu juga terkait dengan rencana pengawasan lembaga pengelola dana publik oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Makanya posisi dan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus disesuaikan dengan sistem pengawasan itu," jelas politikus Partai NasDem itu.

Karena itu, lanjutnya, pembahasan RUU PKH tidak

perlu dipaksakan pada tahap ini. Penyamaan persepsi lintas komisi dinilai penting agar tidak muncul perbedaan keputusan yang melemahkan substansi UU. "Jangan nanti yang ini memutuskan A, yang B memutuskan C. Jadi yang salah kita karena tidak bisa mengharmonisasi," tegasnya.

Dia mengingatkan, tugas utama Baleg adalah melakukan harmonisasi materi muatan UU. Baleg tidak boleh masuk ke wilayah teknis birokrasi atau kelembagaan yang jadi kewenangan eksekutif. Karena fokus utamanya harus memastikan keselarasan antara UU Keuangan Haji, UU Penyelenggaraan Haji, UU P2SK, serta regulasi keuangan lainnya.

"Keselarasan itu jadi fondasi bagi sistem pengelolaan dana haji yang profesional dan akuntabel. Kita lihat dan bandingkan opsi skema model kelembagaan BPKH ini," katanya.

Senada, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menilai, pembahasan revisi UU PKH tidak bisa dipisahkan dari regulasi yang mengatur keuangan negara dan pengawasan sektor keuangan. Keterkaitan antar UU menuntut kehati-hatian, termasuk dalam menyusun desain kelembagaan BPKH.

Setiap perubahan struktur, kata dia, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem keuangan nasional. Makanya, opsi bahwa BPKH ditempatkan langsung di bawah Presiden justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan UU dan peran Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai bendahara negara.

"Wacana ini perlu penjelasan dan argumentasi yang kuat. Keuangan haji memiliki tata kelola tersendiri, namun tetap tidak bisa dilepaskan dari sistem yang telah diatur dalam UU," ujar politikus Partai Gerindra itu. ■ PYB



ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.

PESAWAT SIMULASI:

Warga melihat replika pesawat Boeing 737 Garuda Indonesia non-operasional yang disiapkan untuk manasik di Asrama Haji Banda Aceh, Aceh, Minggu (1/2/2026). Kementerian Agama Aceh menyediakan replika pesawat ini sebagai wahana simulasi perjalanan udara bagi calon jamaah haji dan umrah, yang diharapkan dapat membantu calon jamaah, terutama jamaah lanjut usia dan jamaah yang belum memiliki pengalaman naik pesawat.

Jangan Ada Kekosongan Hukum

KUHP & KUHP Baru Butuh Aturan Turunan

Senayan meminta Pemerintah segera merampungkan seluruh aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara menyebut, saat ini baru ada satu aturan turunan pelaksanaan KUHP dan KUHAP yaitu PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. Beleid baru tersebut telah berlaku efektif 2 Januari 2026.

"Kami meminta Pemerintah mempercepat penyelesaian sejumlah PP turunan undang-undang yang dinilai krusial untuk mencegah terjadinya kekosongan

hukum," ujar Dewi dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, sejumlah aturan turunan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan KUHP, hingga kini belum diselesaikan dan masih berada di Kemensetneg dan Kementerian Hukum (Kemenkum).

Anggota Komisi III DPR Martin D Tumbelaka mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan antar aparat penegak hukum (APH) guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadi-



Dewi Asmara

lan. Karena sinergi yang solid antara kepolisian dan kejaksaan menjadi kunci utama agar implementasi regulasi KUHP dan KU-

HAP yang baru berjalan optimal.

"Kami berpesan pentingnya menjaga keharmonisan antara APH. Karena kekompakan dan saling support itu sangat penting untuk memaksimalkan penegakan hukum agar tidak sektoral," ujar Martin dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Martin menyayangkan masih ditemukannya kekeliruan dalam penerapan hukum di sejumlah daerah. Seperti kasus yang melibatkan seorang guru di Jambi dan kasus penjambratan di Sleman, Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap KUHP baru masih perlu diperkuat.

"Implementasi KUHP yang baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh APH, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan hu-

kum," kata politikus Gerindra ini.

Ia menegaskan, KUHP dan KUHAP baru tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi harus mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. "Jangan hanya fokus mempidanakan orang atau menetapkan tersangka," tegasnya.

Selain itu, Martin menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara, dengan menjadikan pidana sebagai langkah terakhir.

"Seharusnya duduk bersama terlebih dahulu, berpikir jernih, dan melihat apakah persoalan bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke ranah pidana," kata dia menekankan. ■ TIF

Revisi UU Statistik

Komisi X Inisiatif Perkuat Peran BPS

WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadriem Irfani menegaskan komitmen parlemen untuk memperkuat tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS). Penguatan tersebut dilakukan melalui pembahasan revisi Undang-Undang Statistik yang akan memperbarui payung hukum statistik nasional.

Lalu menilai, revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sangat mendasak, mengingat regulasi lama tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan data nasional saat ini. Karena itu, diperlukan adaptasi regulasi yang lebih modern, kuat, dan responsif.

Ia menjelaskan, Komisi X DPR telah menerima penugasan resmi dari pimpinan DPR tertanggal 20 Januari 2026 untuk mengawal pembahasan revisi undang-undang tersebut. Penugasan itu menjadi dasar bagi parlemen untuk berinisiatif memperkuat tugas, fungsi, dan peran BPS di tingkat nasional.

"Ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menempatkan statistik sebagai fondasi utama kebijakan negara," ujar Lalu dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Lalu, keberadaan BPS memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Peran tersebut semakin dipertegas melalui

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengelolaan Data Tunggal.

"Negara telah mengakui peran strategis BPS melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Karena itu, kami menegaskan tidak boleh ada pelemahan terhadap peran dan fungsi BPS," tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan data nasional semakin solid dan terpercaya. Komisi X akan memastikan tidak ada celah yang dapat mendegradasi otoritas BPS sebagai penyedia data utama di Indonesia.

Menurutnya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ke depan akan menjadi rujukan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Karena itu, Lalu mengingatkan pentingnya tata kelola statistik nasional yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar internasional. Tujuannya agar data yang dihasilkan benar-benar akurat, mutakhir, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Indonesia beruntung memiliki BPS yang tangguh dan solid. Kerja-kerjanya sudah terbukti dan diakui," ujar politikus PKB asal Nusa Tenggara Barat tersebut. ■ PYB

Intervensi Sengkuni Dalam Tahta Hastina

Wayang Politik

Oleh: DR Ki Rohmad Hadwijoyo



MUNDURNYA beberapa pejabat otoritas keuangan pekan lalu, mengingatkan peristiwa 20 Mei 1998. Di mana, 14 menteri bidang ekonomi serentak mengundurkan diri, mereka dianggap gagal mengatasi krisis ekonomi dan politik. Di sisi lain, gonjangan pasar keuangan minggu lalu dipicu oleh peringatan penyediaan indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI). MSCI mengingatkan pentingnya tata kelola yang lebih baik pada pasar modal Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik.

"Bukannya mereka mundur karena intervensi, Mo?" celetuk Petruk cengengesan. Romo Semar mesem tidak mau menanggapi lebih jauh celoteh Petruk. Romo Semar sedang prihatin dengan cuaca ekstrem beberapa pekan terakhir ini. Dampak nyata dari iklim salah mungso, seperti banjir bandang dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah Nusantara.

Seperti biasa, Romo Semar mengawali paginya dengan secangkir kopi pahit. Penganan pisang dan jagung rebus menambah nikmat sarapan pagi Padepokan Klampis Ireng. Walau udara terasa dingin, tidak menyurutkan para kawula melakukan aktivitas

di pagi hari. Kepulan asap rokok klobot membawa ingatannya ke zaman Mahabarata. Di mana, Patih Sengkuni melakukan intervensi terhadap tahta Hastina untuk kepentingan politiknya.

Kocap kacarito, dalam klan tahta Hastina, Patih Sengkuni adalah paman dari Prabu Duryudana. Karena ibunda Duryudana yakni Dewi Gendari adalah kakak Sengkuni. Konon Dewi Gendari dan Sengkuni bersama kakaknya Gendara datang dari kerajaan Ploso Jenar. Kedatangan mereka bertiga untuk mengikuti sayembara perubatan Dewi Kunti dari Kerajaan Mandura. Tapi sayang kedatangan mereka terlambat. Pandu dari Kerajaan Hastina lebih dulu berhasil memenangkan sayembara rebut putri Mandura.

Dalam perjalanan ke Mandura, Gendara menghadang dan menantang duel Pandu untuk menyerahkan Dewi Kunti. Gendara kalah sakti dan tewas melawan Pandu. Sedangkan Dewi Gendari dan Sengkuni menjadi rampasan perang Pandu. Dewi Gendari diberikan kepada Drestrastra yang tidak lain adalah kakak Pandu.

Perkawinan Dewi Gendari dengan Drestrastra menurunkan Kurawa berjumlah seratus orang. Sedangkan perkawinan Pandu

dengan Dewi Kunti dan Dewi Madrim menurunkan satria Pandawa berjumlah lima orang.

Gendari dan Sengkuni memendam rasa dendam kepada Pandu atas tewasnya Gendara. Mereka berdua bersumpah untuk membalas keturunan Pandu dan merebut tahta Hastina dari Pandawa. Segala cara ditempuh untuk memuluskan rencana jahat Sengkuni. Termasuk intervensi dalam permainan dadu antara Kurawa dan Pandawa.

Permainan dadu didesain untuk mengambil alih tahta Hastina dari Pandawa dengan cara paksa atau "hostile takeover". Sengkuni menyiapkan beberapa strategi mulai dari papan dadu, sampai penunjukan bandar dadu. Sebagai taruhan permainan dadu adalah tahta Kerajaan Hastina.

Kurawa berhasil memenangkan permainan dadu dengan curang. Pandawa harus menyerahkan tahta Hastina dan Amarta kepada Kurawa. Selain itu, Pandawa masih harus menjalani hukuman hidup mengembara di tengah hutan selama 12 tahun lamanya.

"Lalu apa hubungannya Sengkuni dengan gonjangan-gonjangan pasar modal, Mo?" sela Petruk penasaran. "Perilaku Sengkuni di balik kisruh mundurnya pejabat otoritas keuangan Tole," jawab Romo Semar pendek. "Kelompok Sengkuni menginginkan pasar modal hancur. Waktu harga saham jatuh, saham diborong dan diambil paksa sekaligus mandor pasarnya mau diambil alih", papar Romo Semar sambil ngeloyor pergi. ■ OYE

Dorong UMKM Naik Kelas, DPR Apresiasi Transformasi BNI

KINERJA dan konsistensi transformasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mendapat apresiasi dari parlemen.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Duriyanto menilai BNI berhasil memperkuat posisinya sebagai bank nasional berstandar global, dengan keunggulan pada segmen korporasi, transaksi internasional, serta kemampuan mendorong UMKM naik kelas.

Penilaian tersebut disampaikan Darmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BNI yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026). Menurutnya, di tengah dinamika dan tantangan industri perbankan, BNI mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan konsisten.

"Terkait positioning BNI sebagai bank nasional berstandar global, BNI kuat di korporasi dan transaksi internasional, serta mampu mencetak UMKM naik kelas. Terlepas dari berbagai dinamika, saya mengapresiasi kinerja BNI yang juga tercermin dari banyaknya penghargaan, termasuk penghargaan internasional," ujar Darmadi.

Apresiasi tersebut sejalan dengan capaian BNI sepanjang 2025 yang meraih sejumlah penghargaan tingkat global. BNI memborong dua kategori dalam The Digital Banker Global Retail Banking Innovation Award 2025, yakni Best API Initiative dan Best SME Banking Platform, yang menegaskan kekuat-

an BNI dalam pengembangan ekosistem digital dan layanan UMKM berbasis teknologi.

Selain itu, BNI juga dinobatkan sebagai Best Digital Bank for SMEs 2025 pada ajang Euromoney Awards, memperkuat reputasinya sebagai mitra strategis UMKM dalam mendorong ekspansi dan pertumbuhan usaha. Di bidang pengembangan talenta, BNI Corporate University meraih Gold Winner kategori Branding & Durability pada The 2025 Global Corporate University Awards di Paris.

Pengakuan global lainnya datang dari Forbes, yang memasukkan BNI ke dalam daftar Forbes Global 2000 2025 sebagai salah satu dari 2.000 perusahaan terbesar dunia. Di segmen layanan nasabah premium, BNI Private juga memperoleh pengakuan sebagai New Wave Industry Leaders 2025, menegaskan kapabilitas perseroan dalam menghadirkan layanan private banking berstandar internasional.

Deretan capaian tersebut dinilai semakin memperkuat positioning BNI sebagai bank nasional yang tidak hanya berperan strategis dalam mendukung perekonomian domestik, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat global. Dengan fondasi kuat di segmen korporasi, transaksi lintas negara, serta komitmen berkelanjutan mendorong UMKM naik kelas, BNI dinilai memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. ■ TIF

	<p>Judul Buku : Jokowinomic: Menimbang Pertumbuhan Ekonomi, Menuntut Keadilan Penulis : Amir Uskara Penerbit : RMBBooks Halaman : 336 Halaman Harga : Rp80.000,-</p>							
	<p>Buku ini tidak sekadar menyuguhkan laporan ekonomi, dan tidak pula hadir sebagai narasi politik. Ia lahir dari kegelisahan yang lebih mendasar: bahwa di balik gegap gempita pembangunan dan pertumbuhan ekonomi era Jokowi yang terus dipuja, ada pertanyaan yang perlu jawaban lugas, apakah pertumbuhan sudah berkualitas dan untuk siapakah pertumbuhan itu?</p>	<p>Rp75.000,-</p>	<p>Rp75.000,-</p>	<p>Rp115.000,-</p>	<p>Rp85.000,-</p>	<p>Rp70.000,-</p>	<p>Rp70.000,-</p>	<p>Rp230.000,-</p>

Aksesnya Dibuka Lagi Kemkomdigi Perketat Pengawasan AI Grok

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka kembali akses layanan AI Grok di Indonesia setelah sebelumnya sempat diblokir. Namun, pembukaan akses tersebut dilakukan secara bersyarat dan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan, normalisasi akses dilakukan setelah X Corp menyampaikan komitmen terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Alexander menegaskan, normalisasi tersebut bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat. Melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan,” kata Alexander dalam keterangan resminya, Minggu (1/2/2026).

“Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” sambungnya.

Menurut Alexander, melalui surat resmi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), X Corp menyatakan telah menerapkan sejumlah langkah penanganan berlapis atas potensi penyalahgunaan layanan Grok.

Langkah tersebut mencakup penguatan perlindungan teknis, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan serta penegakan aturan internal, hingga aktivasi protokol respons insiden.

Kemkomdigi, kata Alexander, akan melakukan verifikasi dan pengujian berkelanjutan atas klaim perbaikan tersebut.

Masjid IKN Ikut Intip Hilal Kemenag Gelar Sidang Isbat 17 Februari 2026

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) bersiap menggelar Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026. Salah satu rencana yang ikut disiapkan adalah melibatkan Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai titik rukyatul hilal.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, sidang ini menjadi forum resmi negara dalam menetapkan awal Ramadan.

Sidang Isbat penentuan awal puasa itu dijadwalkan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta, dan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pemerintah akan mengumumkan hasilnya ke publik setelah seluruh rangkaian sidang selesai digelar.

“Sidang Isbat akan dipimpin langsung Menteri Agama dan diumumkan kepada masyarakat,” katanya dalam siaran persnya, Minggu (1/2/2026).

Abu Rokhmad menjelaskan, Sidang Isbat akan dihadiri banyak unsur, mulai dari perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam hingga lembaga negara. Kehadiran banyak pihak ini, menurut dia, menjadi bentuk keterbukaan dalam proses penetapan awal bulan Hijriah.

“Sidang Isbat nanti juga dihadiri oleh perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, DPR, dan Mahkamah Agung,” ungkapnya.

Dalam sidang tersebut, Kemenag menyiapkan tiga tahapan utama yang sudah menjadi pola baku setiap tahun. Tahapan ini dimulai dengan pemaparan data astronomi terkait posisi hilal. Setelah itu, sidang menerima laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai daerah.

“Rangkaian sidang dimulai dari data hisab, verifikasi rukyat, lalu musyawarah,” tuturnya.

Pemantauan hilal tahun ini dilakukan dari 37 titik di seluruh Indonesia. Titik-titik

terutama untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran termasuk penyebaran konten ilegal dan pelanggaran prinsip perlindungan anak.

“Jika ditemukan ketidak-konsistenan atau pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.

Alexander menilai, kebijakan pengawasan ruang digital, baik berupa pembatasan maupun normalisasi akses, dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan berbasis regulasi.

Tujuannya adalah melindungi kepentingan publik dan menjaga ruang digital tetap aman serta berkeadilan.

Pemerintah juga mencatat komitmen X Corp untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukum sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) serta menjaga ekosistem digital yang bertanggung jawab.

“Dialog konstruktif tetap kami buka, tetapi kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban. Normalisasi layanan bukan titik akhir, tapi bagian dari proses pengawasan negara yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menilai, langkah pemerintah sudah tepat dan patut diapresiasi terhadap Grok.

Ia menyebut Indonesia berpotensi menjadi pelopor dalam memastikan platform digital global menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan nilai dan regulasi nasional.

Menurut Alfons, penyedia platform digital seperti Grok tidak bisa hanya berfokus pada keuntungan bisnis tanpa memperhatikan nilai moral, etika, dan hukum di negara tempat mereka beroperasi. ■ KPJ

tersebut dipilih karena dinilai strategis dan memiliki peluang pengamatan hilal yang lebih jelas. Kemenag juga mengirimkan tim ahli ke lokasi-lokasi tersebut.

Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat mengatakan, pihaknya terus memetakan lokasi potensial untuk rukyatul hilal. Salah satu lokasi yang sedang disiapkan adalah Masjid IKN yang belum lama diresmikan.

“Masjid IKN berpeluang dijadikan lokasi rukyatul hilal tahun ini,” ucapnya.

Menurut Arsad, kehadiran Masjid IKN sebagai titik rukyat memiliki nilai simbolik sekaligus teknis. Selain representasi pusat pemerintahan baru, lokasi tersebut dinilai cukup ideal untuk pengamatan hilal jika kondisi memungkinkan.

“Tim akan ditempatkan di lokasi yang peluang melihat hilalnya paling besar,” katanya.

Arsad juga menyampaikan, Sidang Isbat tahun ini akan diperkuat dengan payung hukum baru. Kemenag menyiapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar pelaksanaan Sidang Isbat agar lebih tertib dan jelas.

“PMA menjadi dasar hukum agar pelaksanaan Sidang Isbat lebih pasti,” ujarnya.

PMA tersebut, lanjut Arsad, disiapkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait mekanisme penetapan awal Ramadan. Regulasi ini sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses Sidang Isbat.

“Regulasi ini memberi kepastian dan pemahaman ke masyarakat,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal, dan Idul Adha, Pemerintah tetap menggunakan metode integrasi hisab dan rukyat. Pendekatan ini dinilai mampu merangkul perbedaan metode penetapan awal bulan yang berkembang di masyarakat. ■ JAR



SIDAK KEBERSIHAN: Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meninjau tumpukan sampah saat sidak kebersihan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Minggu (1/2/2026). Dalam sidak tersebut Menteri Hanif masih menemukan adanya warga yang membuang sampah ke sungai dan membakar sampah di lingkungan.

ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI/AGR

Virus Nipah Mengintai Masyarakat Diminta Waspada

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya virus Nipah, meski hingga kini belum ditemukan kasus penularan di Indonesia.

PERINGATAN tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Virus Nipah yang diterbitkan pada 30 Januari 2026. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami menginstruksikan seluruh perangkat penyedia fasilitas kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif guna mencegah kemungkinan penularan virus tersebut.

“Kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, kepala UPT bidang kekarantinaan kesehatan, pimpinan rumah sakit, kepala puskesmas, dan kepala laboratorium kesehatan masyarakat di Indonesia melaksanakan langkah-langkah antisipatif,” kata Murti dalam keterangan resminya, Minggu (1/2/2026).

Murti menjelaskan, virus Nipah merupakan penyakit zoonotik emerging yang disebabkan oleh virus Nipah dari genus *Henipavirus* dan famili *Paramyxoviridae*. Virus ini memiliki reservoir alami pada kelelawar buah (*Pteropus sp.*).

Menurutnya, penularan virus Nipah dapat terjadi dari hewan ke manusia, baik secara langsung maupun melalui perantara hewan lain seperti babi.

Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, seperti buah atau nira.

Penularan antarmanusia dimungkinkan, terutama melalui kontak erat dengan penderita. Adapun, manifestasi penyakit virus Nipah bervariasi, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) ringan hingga berat, serta ensefalitis yang dapat berakibat fatal.

“Tingkat kematian dilaporkan mencapai 40 hingga 75 persen,” ujarnya.

Murti menegaskan, hingga kini belum terdapat laporan kasus konfirmasi virus Nipah pada manusia di Indonesia.

Namun, kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat Indonesia termasuk wilayah berisiko berdasarkan kedekatan geografis dan tingginya mobilitas.

Terutama dengan negara-negara yang pernah mengalami kejadian luar biasa (KLB) virus Nipah.

Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes juga menginstruksikan dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pemantauan dan verifikasi tren kasus suspek menigitis atau ensefalitis, influenza like illness (ILI), severe acute respiratory infection (SARI), ISPA, dan pneumonia.

Fasilitas kesehatan juga diminta melakukan penemuan kasus melalui sindrom pernapasan akut berat dan sindrom meningoensefalitis akut dengan faktor risiko sesuai definisi ope-

rasional kasus yang mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Nipah.

Bagi rumah sakit, Kemenkes meminta koordinasi dengan laboratorium rujukan terkait pengelolaan spesimen kasus sesuai standar yang berlaku.

Sementara itu, dinas kesehatan diminta melakukan kajian epidemiologis dan analisis faktor risiko potensi KLB, termasuk riset pemodelan, prediktif, dan operasional.

Selain itu, UPT Bidang Karantinaan Kesehatan diminta meningkatkan pengawasan di pintu masuk negara, khususnya terhadap pelaku perjalanan dari negara terjangkau.

Langkah yang dilakukan meliputi pemantauan suhu tubuh melalui thermal scanner serta pengamatan tanda dan gejala dengan menyiagakan petugas di area kedatangan internasional.



Budi Gunadi Sadikin

Instagram @bgsadikin

Bagi rumah sakit, Kemenkes meminta koordinasi dengan laboratorium rujukan terkait pengelolaan spesimen kasus sesuai standar yang berlaku.

Sementara itu, dinas kesehatan diminta melakukan kajian epidemiologis dan analisis faktor risiko potensi KLB, termasuk riset pemodelan, prediktif, dan operasional.

Selain itu, UPT Bidang Karantinaan Kesehatan diminta meningkatkan pengawasan di pintu masuk negara, khususnya terhadap pelaku perjalanan dari negara terjangkau.

Langkah yang dilakukan meliputi pemantauan suhu tubuh melalui thermal scanner serta pengamatan tanda dan gejala dengan menyiagakan petugas di area kedatangan internasional.

“Pelayanan kesehatan dilakukan hingga desa terpencil yang sulit dijangkau,” katanya.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan di Posko Induk Gabungan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten Gayo Lues. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan rujukan kesehatan bagi warga terdampak.

“Unsur TNI, tenaga medis sipil, dan relawan turun ke lokasi terdampak,” kata Agung Saptoadi dikutip Minggu (1/2/2026).

Dia menambahkan, pelayanan difokuskan ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Pelayanan kesehatan dilakukan hingga desa terpencil yang sulit dijangkau,” katanya.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan di Posko Induk Gabungan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten Gayo Lues. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan rujukan kesehatan bagi warga terdampak.

Kemenkes juga menyerukan peningkatan kesiapsiagaan KLB virus Nipah melalui respons awal di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan.

“Rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya diminta menyiapkan ruang isolasi serta alat pelindung diri (APD),” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah masuknya virus Nipah ke Indonesia, antara lain melalui penguatan surveilans, kesiapan laboratorium, serta penyediaan alat skrining berbasis PCR.

BGS-sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemeriksaan virus Nipah menggunakan teknologi PCR yang serupa dengan pemeriksaan Covid-19.

Pemerintah telah menyiapkan reagen dan mendistribusikannya ke sejumlah laboratorium rujukan Kemenkes di daerah.

“Kita sudah siapkan reagen-reagenya. Jadi kalau ada orang yang dicurigai, batuk tidak sembuh-sembuh, karena ini sama-sama menyerang paru-paru, kita lakukan skrining,” kata Menkes.

Menurutnya, pemeriksaan PCR penting untuk membedakan penyebab gejala pernapasan, apakah disebabkan oleh influenza, Covid-19, atau virus Nipah.

Terkait kebijakan perbatasan, Menkes menegaskan, Pemerintah belum berencana menutup akses keluar-masuk negara, sejalan dengan rekomendasi WHO

yang menilai jumlah kasus virus Nipah secara global masih sangat terbatas.

Di sisi lain, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M. Panggabean mengatakan, berdasarkan data lalu lintas karantina, tidak terdapat pemasukan impor kelelawar hidup ke Indonesia. Selain itu, sepanjang 2025 tidak tercatat impor hewan babi hidup.

Sahat mengingatkan, jika virus Nipah masuk ke Indonesia, dampaknya sangat serius terhadap kesehatan dan perdagangan.

Mulai dari wabah di sektor peternakan, kerugian ekonomi akibat pemusnahan ternak, pembatasan ekspor produk hewan, hingga menurunnya kepercayaan mitra dagang internasional.

“Oleh karena itu, sistem karantina yang kuat menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, perdagangan, dan kesehatan nasional,” tegas Sahat.

Untuk diketahui, virus Nipah pertama kali muncul pada 2001 dan kembali terdeteksi di India pada Januari 2026.

Hingga 26 Januari 2026, dilaporkan dua kasus terkonfirmasi tanpa kematian di Distrik North 24 Parganas, Negara Bagian West Bengal. Seluruh pasien kasus Nipah merupakan tenaga kesehatan.

Sebagai langkah pengendalian, Pemerintah India melakukan pelacakan terhadap 196 kontak erat yang teridentifikasi.

Seluruh kontak tersebut menjalani pemantauan kesehatan, karantina, serta pemeriksaan lebih lanjut, dengan hasil seluruhnya dinyatakan negatif. ■ KPJ

Jejak Program Prioritas

Rumah Dibersihkan, Kesehatan Ditangani TNI Ringankan Beban Warga Aceh

BEBAN warga terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh perlahan terasa lebih ringan. Tak hanya membersihkan rumah yang tertimbun lumpur, personel TNI juga masuk ke desa-desa membawa layanan kesehatan bagi warga yang sempat terisolasi pascabencana.

Dari pengobatan keliling, pemeriksaan ibu dan anak, hingga sunat massal, bantuan itu dirasakan langsung masyarakat. Rumah dibersihkan, kesehatan ditangani—warga pun bisa mulai bernapas lega, sambil perlahan menata kembali kehidupan setelah bencana.

Di Desa Gumpang, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, personel TNI Angkatan Darat mendatangi permukiman warga untuk memberikan layanan kesehatan keliling, Sabtu (31/1/2026).

Ibu, anak-anak, hingga warga lanjut usia mengikuti pemeriksaan kesehatan secara tertib.

Layanan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan warga tetap terpantau pascabencana. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di wilayah terdamp-



Personel TNI bersama tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana di Aceh.

FOTO: TIM MEDIA PRESIDEN

lainnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan sunat massal digelar di Desa Pertik, Kecamatan Pining. Anak-anak mengikuti kegiatan tersebut dengan pendampingan orang tua dan tenaga medis.

Pelayanan kesehatan terpadu ini juga mencakup pengobatan dan edukasi kesehatan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi prioritas pemeriksaan.

Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan unsur gabungan dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak.

“Unsur TNI, tenaga medis sipil, dan relawan turun ke lokasi terdampak,” kata Agung Saptoadi dikutip Minggu (1/2/2026).

Dia menambahkan, pelayanan difokuskan ke wilayah yang sulit

dijangkau.

“Pelayanan kesehatan dilakukan hingga desa terpencil yang sulit dijangkau,” katanya.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan di Posko Induk Gabungan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten Gayo Lues. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan rujukan kesehatan bagi warga terdampak.

Pemerintah memastikan fasili-



RI-Belanda Perkuat Kerja Sama Budaya & Repatriasi Warisan Sejarah

PEMERINTAH Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama kebudayaan dengan Kerajaan Belanda, mulai dari pengelolaan arsip sejarah, perfilman, hingga percepatan repatriasi warisan budaya.

Upaya tersebut dipandang sebagai langkah membangun hubungan yang setara, etis, dan berorientasi pada keadilan sejarah.

Komitmen tersebut dibahas bersama Menteri Kebudayaan

(Menbud) Fadli Zon menegaskan komitmen Indonesia dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda, Gouke Moes, dalam pertemuan bilateral di sela International Film Festival Rotterdam (IFFR).

Menurut Fadli, kerja sama di bidang arsip sejarah dan budaya menjadi salah satu fokus utama, khususnya pemanfaatan arsip Belanda yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah dan

kebudayaan Indonesia.

"Pentingnya kerja sama di bidang arsip sejarah dan budaya, khususnya pemanfaatan arsip Belanda yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan Indonesia," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/2/2026).

Pemerintah Belanda menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai mengedepankan pendekatan yang etis, inklusif, dan saling menghormati antar negara. Kerja

sama ini diharapkan melibatkan sejumlah institusi penting, seperti Eye Film Museum dan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).

Dalam kesempatan yang sama, Fadli Zon juga mengapresiasi perhatian IFFR terhadap perfilman Indonesia yang dinilai semakin memperoleh ruang di kancah internasional. Politisi Partai Gerindra itu mengusulkan penyelenggaraan program khusus bertajuk Indonesia Focus

atau Indonesia Spotlight pada edisi IFFR mendatang sebagai platform pertukaran budaya melalui sinema.

Di bidang perfilman dan audiovisual, kedua negara sepakat menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama Ko-produksi Audiovisual Indonesia-Belanda yang telah ditandatangani pada 4 Desember 2024. Saat ini, proses ratifikasi perjanjian tersebut masih berjalan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga

terkait di Indonesia.

Pengembangan talenta perfilman lintas negara juga diperkuat melalui program SAMA-SAMA Lab sebagai inisiatif ko-kreasi bersama. Program ini melibatkan Netherlands Film Fund (NFF), Manajemen Talenta Nasional Kementerian Kebudayaan RI, serta Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI).

"Program ini dirancang untuk membangun ekosistem kreatif lintas negara yang berkelanjutan

melalui pengembangan proyek, pertukaran pengetahuan, dan jejaring profesional," ujar Fadli.

Selain kerja sama perfilman, Fadli Zon juga mengusulkan percepatan repatriasi 37 objek Warisan Budaya Bersifat Kebendaan (WBBK) yang telah memperoleh rekomendasi pengembalian dari Colonial Collection Committee (CCC). Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya pemulihan sejarah dan keadilan budaya Indonesia. ■ ASI

Belajar Dari Kasus Langkat Ruang Digital Rentan Terpapar Ekstremisme

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Fauzi mengingatkan, paparan ideologi terorisme dan kekerasan melalui ruang digital menjadi tantangan baru dalam upaya perlindungan anak.

Kasus dugaan paparan radikalisme terhadap anak di Langkat, Sumatera Utara, dinilai sebagai peringatan bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan anak di era digital.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi saat melakukan pendampingan terhadap dua anak yang berstatus sebagai saksi dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana terorisme di Kecamatan Salopian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu (1/2/2026).

Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, dua anak tersebut diduga terpapar paham radikalisme melalui media sosial.

Pemeriksaan psikolog menunjukkan adanya kerentanan pada aspek kognitif dan emosional, serta tingginya kebutuhan akan penerimaan sosial. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko anak mudah terpengaruh oleh lingkungan atau kelompok tertentu.

"Namun secara umum tidak ditemukan indikasi gangguan perilaku berat. Karena itu, pendekatan pemulihan berbasis keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dinilai sangat penting untuk mendukung proses pemulihan anak secara optimal," ujarnya.

Berkaca dari kasus di Langkat, Arifah menegaskan, ruang digital kini telah masuk ke rumah-rumah dan dengan mudah diakses anak. Fenomena tersebut membutuhkan perhatian serius dalam upaya

pengecanaan paparan ideologi kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu, mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menekankan pentingnya memastikan anak mendapatkan pendampingan yang memadai, dukungan psikologis yang tepat, penguatan karakter, serta lingkungan yang aman dan suportif agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di era digital.

"Kita semua memiliki tanggung jawab memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, damai, dan bebas dari kekerasan maupun pengaruh ideologi ekstrem. Selain itu, penguatan kolaborasi lintas sektor. Termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat—dalam upaya pencegahan radikalisme pada anak harus terus digaungkan," tegasnya.

Selain itu, Arifah mengingatkan bahwa Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) bukan sekadar alat pencatat data, melainkan sebuah sistem untuk memastikan setiap kasus perempuan dan anak ditangani secara tuntas, berjenjang, dan terkoordinasi lintas sektor.

Menurut dia, penguatan SIMFONI PPA merupakan upaya menyamakan langkah serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus perempuan dan anak, melalui sistem manajemen kasus berbasis data.

"Kami berharap implementasi SIMFONI PPA versi 3 di Provinsi Sumatera Utara dapat semakin optimal sebagai sistem yang tidak hanya mencatat data, tetapi juga mengawal proses penanganan kasus secara berjenjang, terintegrasi, dan berorientasi pada kualitas layanan bagi korban perempuan dan anak," ujarnya. ■ SSL



UPACARA PENYAMBUTAN: Prajurit Satgas MTF TNI Konga XXVIII-P/UNIFIL kapal perang KRI Sultan Iskandar Muda-367 mengikuti upacara penyambutan setibanya di Kolonelamil, Jakarta, Minggu (1/2/2026). Dalam misinya, Satgas MTF TNI Konga XXVIII-P/UNIFIL telah melakukan 33 kali on task meliputi 70 persen patroli di Laut Mediterania serta menjalankan *naval diplomacy* melalui latihan bersama dengan berbagai angkatan laut asing sebanyak 150 kali.

ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA/FOC

Pelajar Diminta Siap Hadapi Dinamika Global

Wamendagri Tekankan Kepemimpinan Berkarakter

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pelajar Indonesia mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga berkarakter kuat.

PESAN tersebut disampaikan di tengah dinamika global yang kian tidak pasti akibat perubahan geopolitik, disrupsi teknologi, dan pergeseran kekuatan dunia.

"Perubahan global saat ini memungkinkan munculnya berbagai kekuatan baru di tingkat internasional. Kondisi tersebut menuntut generasi muda memiliki pemahaman geopolitik yang luas sekaligus kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan," ujar Bima dalam keterangan resminya, Minggu (1/2/2026).

Mantan Wali Kota Bogor itu

menjelaskan, tantangan global saat ini tidak hanya datang dari negara atau institusi besar, tetapi juga dari aktor-aktor baru di luar struktur konvensional, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya populer.

"Fenomena ini menegaskan kepemimpinan ke depan tidak lagi selalu lahir dari jalur tradisional," tegasnya.

Menurutnya, saat ini semakin banyak tokoh dengan latar belakang nonpolitik yang mampu tampil sebagai pemimpin. Selain itu, perkembangan media sosial dan berbagai platform digital

juga semakin memengaruhi pembentukan opini publik sekaligus pola kepemimpinan di era modern.

Dalam konteks nasional, Bima mengingatkan bahwa Indonesia tengah berada pada fase krusial menuju Indonesia Emas 2045. Keberhasilan memanfaatkan bonus demografi serta keluar dari jebakan pendapatan menengah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan generasi muda saat ini. "Adik-adik, Anda adalah pemimpin di tahun 2045," ucapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, karakter merupakan fondasi utama kepemimpinan, bahkan lebih penting daripada kompetensi semata. "Saya selalu percaya ada dua

hal yang menentukan nasib Anda. Yang pertama adalah kompetensi ilmu, sains, dan pengetahuan. Yang kedua adalah karakter," katanya.

Sebagai bekal menghadapi tantangan tersebut, Bima menilai kegiatan siswa seperti *Model United Nations* (MUN) dapat menjadi ruang pembelajaran yang penting. MUN merupakan simulasi akademik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melatih peserta berperan sebagai diplomat dalam membahas isu global, bernegosiasi, serta menyusun resolusi.

Melalui forum semacam itu, pelajar dapat mengasah kemampuan berdialog, memahami perbedaan perspektif, serta membangun karakter kepemimpinan. "Percayalah, Anda berada di

jalan untuk menjadi pemimpin yang baik. Anda berada di jalan untuk menjadi seseorang yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga karakter," ujar Bima.

Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah menegaskan, pelajar merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Pemerintah Kota Depok, kata dia, memandang pelajar sebagai aset strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Oleh karena itu, kami mendorong organisasi kepemudaan dan pelajar untuk terus menjadi mitra pemerintah dalam membangun karakter generasi muda yang religius, kritis, kreatif, dan berwawasan kebangsaan," ujar Chandra. ■ SSL

Pancasila Sebagai Kompas Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

GEOPOLSTRA Geopolitik Dan Geostrategi

Oleh: Ermaya Suradinata

PANCASILA sebagai pandangan kehidupan bernegara merupakan fondasi etik dan strategis yang harus menjadi rujukan utama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia tidak berhenti sebagai dasar negara yang bersifat normatif-konstitusional, melainkan menjelma sebagai sistem nilai hidup yang menjwai setiap proses pengambilan keputusan politik, legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dalam negara yang lahir dari kemajemukan suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila berfungsi sebagai penopang persatuan nasional sekaligus kompas moral agar kekuasaan tidak kehilangan arah dan terpeleceh dalam kepentingan sempit, sektarian, atau pragmatis. Bagi pemerintahan daerah, Pancasila adalah pedoman untuk memastikan bahwa otonomi tidak berubah menjadi fragmentasi, dan kekuasaan lokal tidak

menjauh dari tujuan keadilan sosial.

Dalam konteks aktual pemerintahan, agenda Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan nasional dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia pada awal tahun 2026, patut dipahami sebagai momentum konsolidasi nilai dan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan ini tidak dimaksudkan sebagai forum administratif atau seremonial belaka, melainkan sebagai ruang pengarah strategis untuk menyatukan visi pembangunan nasional yang berakar pada Pancasila sebagai pandangan kehidupan bernegara.

Keberhasilan agenda tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan arahan nasional ke dalam kebijakan yang kontekstual dan berkeadilan. Di sinilah sinergi antara kepala daerah dan DPRD menjadi krusial, bukan hanya dalam aspek imple-

mentasi program, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap kebijakan daerah tetap berpijak pada nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, program nasional tidak berhenti sebagai instruksi dari pusat, melainkan benar-benar menjadi praktik pemerintahan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Bagi DPRD, arahan nasional tersebut menegaskan kembali peran strategis lembaga legislatif daerah sebagai jembatan nilai antara kebijakan pusat dan realitas lokal. DPRD tidak cukup berfungsi sebagai institusi formal pembentuk peraturan, melainkan sebagai penjaga orientasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi legislasi DPRD harus mampu melahirkan peraturan daerah yang kontekstual, adil, dan berpihak pada kepentingan publik, termasuk dalam tata kelola ruang, kebersihan lingkungan, pembangunan pariwisata, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Otonomi daerah dalam perspektif Pancasila bukanlah kebebasan tanpa arah, melainkan kemandirian yang dibingkai oleh tanggung



jawab kebangsaan.

Demikian pula fungsi anggaran DPRD tidak dapat direduksi menjadi rutinitas teknokratis menjadi belanja. Dalam perspektif Pancasila, anggaran adalah instrumen politik keadilan. Setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan keberpihakan negara: siapa yang dilindungi, siapa yang diprioritaskan, dan siapa yang berisiko ditinggalkan.

Oleh karena itu, DPRD dituntut memastikan bahwa belanja daerah berpihak pada pelayanan

publik dasar, penguatan ekonomi rakyat, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta perlindungan kelompok rentan. Keadilan sosial tidak lahir dari retorika, melainkan dari keberanian politik dalam menentukan prioritas anggaran.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa kekuasaan, termasuk kewenangan DPRD, adalah amanah moral yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab etis. Dalam praktik pemerintahan daerah, nilai ini menuntut kejujuran dalam pengambilan keputusan, keteguhan menolak korupsi, serta kesadaran bahwa jabatan publik tidak boleh dijadikan alat transaksi politik atau ekonomi. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut agar setiap kebijakan daerah memperhatikan dampak nyata terhadap martabat manusia, terutama bagi kelompok miskin, terpinggirkan, dan masyarakat di wilayah pinggiran. Kebijakan yang sah secara administratif tetapi melukai rasa keadilan sosial sejatinya bertentangan dengan roh Pancasila.

Nilai Persatuan Indonesia menjadi pengingat penting bagi DPRD agar tidak terjebak dalam

politik identitas, rivalitas antarwilayah, atau kepentingan elit lokal yang justru melemahkan kohesi nasional. Otonomi daerah sering kali menghadirkan godaan untuk mengedepankan sentimen lokal secara berlebihan, bahkan dengan mengorbankan kepentingan kebangsaan.

Dalam forum evaluasi kinerja kepala daerah yang menjadi bagian dari Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, DPRD seharusnya menjadikan agenda nasional—seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi, serta program makan bergizi gratis—sebagai tolok ukur objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, bukan sekadar alat tarik-menarik politik lokal.

Nilai Kerakyatan melalui musyawarah menegaskan bahwa kebijakan daerah tidak boleh direduksi menjadi prosedur elektoral dan rapat formal. Musyawarah dalam perspektif Pancasila, adalah proses dialog substantif yang menghargai perbedaan, membuka ruang partisipasi publik, dan mengedepankan kebijaksanaan kolektif.

DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak berhenti pada kotak suara,

tetapi hadir dalam setiap proses legislasi dan penganggaran. Musyawarah yang sejati menjadi mekanisme koreksi atas dominasi elit dan kepentingan sempit dalam politik daerah.

Sementara itu, nilai Keadilan Sosial merupakan tujuan akhir yang mengikat seluruh sila Pancasila. Keadilan dalam perspektif Pancasila bersifat substantif dan kontekstual, bukan sekadar kesetaraan formal di hadapan regulasi. Ia menuntut kehadiran aktif negara untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam konteks inilah pula DPRD dituntut berani menggunakan kewenangannya untuk mengawasi relasi pemerintah daerah dengan kekuatan modal, proyek-proyek besar, dan kebijakan investasi agar tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah bentuk penyimpangan dari keadilan Pancasila. ***

*Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati Geopolitik, dan Geostrategi, serta Manajemen Pemerintahan.

Vox Populi

Keberanian Pertama

... DARI HALAMAN 1

rapuh? Kebijakan berisiko politik justru sering kali yang paling berpihak—karena ia menantang kepentingan mapan. Tanpa keberanian ini, keadilan tinggal jargon yang aman di pidato.

Ada kecenderungan lama: memulai dari yang mudah dan populer. Hasilnya tampak rapi, tetapi masalah pokok dibiarkan. Padahal, keberanian sejati justru memulai dari yang sulit dan tidak menguntungkan citra. Negara yang matang memilih luka kecil sekarang daripada luka besar nanti.

Michael Sandel mengingatkan bahwa kepemimpinan publik menuntut keberanian moral untuk memutuskan “apa yang patut,” bukan sekadar “apa yang disukai” (*Justice: What’s the Right Thing to Do?*, 2009). Tanpa keberanian moral ini, politik terjebak dalam kalkulasi selera, bukan pertimbangan nilai.

Keberanian pertama tidak menjamin keberhasilan, tetapi tanpanya kegagalan hampir pasti. Negara yang berani memulai memberi sinyal jelas: arah dipilih, risiko ditanggung, dan perbaikan dimungkinkan. Di situlah kepercayaan lahir—bukan dari janji panjang, melainkan dari langkah awal yang tegas. ■



BANJIR DI KARAWANG: Foto udara warga menggunakan perahu saat banjir merendam pemukiman di Desa Karangligar, Telukjambe, Karawang, Jawa Barat, Minggu (1/2/2026). Berdasarkan data dari BPBD Karawang pada hari kelima belas bahwa banjir masih merendam sebanyak 6.670 rumah di tujuh kecamatan dan 7.732 keluarga terdampak.

ANTARA FOTO

Tak Ada Perombakan

... DARI HALAMAN 1

“Tidak ada. Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” ujar Rosan di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam.

Menurut Rosan, Danantara justru mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk urusan manajemen. Jika pun suatu saat dibutuhkan perbaikan kinerja, prosesnya akan berjalan sesuai mekanisme korporasi dan melalui konsultasi yang matang, bukan lewat isu atau rumor.

Rosan menjelaskan, apabila di kemudian hari memang dibutuhkan perbaikan kinerja di level direksi, inisiatif tersebut lazimnya datang lebih dulu dari manajemen bank yang bersangkutan. Setelah itu, barulah dilakukan konsultasi dengan Danantara sebagai pemegang saham.

Namun, kondisi tersebut dipastikan belum terjadi saat ini. Hingga kini, tidak ada pembahasan terkait perombakan direksi maupun komisaris bank-bank BUMN.

“Tentunya kami akan selalu berkolaborasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tetapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” ujar Rosan.

Pengamat perbankan dari UGM Paul Sutaryono menilai, wacana pergantian direksi bank-bank yang tergabung dalam Himbara tidak relevan untuk dibesar-besarkan. Menurutnya, isu tersebut kehilangan pijakan karena seluruh bank Himbara telah lebih dulu menjalani mekanisme korporasi yang sah. “Wacana pergantian direksi bank

Himbara belum perlu,” kata Paul, kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (1/2/2026) malam.

Paul mengingatkan, pada Desember 2025 lalu, kelima bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam forum tertinggi perusahaan tersebut, arah kebijakan, evaluasi kinerja, hingga komposisi manajemen sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ia menilai wacana pergantian direksi di luar momentum RUPS justru berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di sektor perbankan nasional. Apalagi, stabilitas perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha.

“Lebih dari itu, pihak Danantara sebagai super holding BUMN sudah membantah pergantian direksi bank Himbara,” tuntasnya.

Direktur Program dan Kebijakan PRASASTI Piter Abdullah Redjalum juga menyampaikan pandangan senada. Menurutnya, saat ini belum perlu mengganti jajaran direksi bank-bank Himbara.

Piter menilai, kondisi saat ini tidak tepat untuk memunculkan isu perombakan direksi Himbara. Bank-bank pelat merah bersama BUMN keuangan lainnya tengah menghadapi gejala pasar keuangan dan membutuhkan fokus serta konsentrasi penuh. Ia mengingatkan, Himbara saat ini juga tengah berproses bersama Danantara dalam menjaga stabilitas dan merespons dinamika pasar.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan soliditas dan fokus penyelesaian masalah. Bukan wacana pergantian direksi,” ujar Piter. ■ **BYUBCG**

Prabowo & Sejumlah

... DARI HALAMAN 1

Susno Duadji, mantan Ketua KPK Abraham Samad, hingga mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Dari unsur pemerintah, hadir Menhan Sjaifrie Sjamsoeddin, Menlu Sugiono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, selain mende-ngarkan pandangan para tokoh, Presiden Prabowo juga memaparkan program-program pemerintah yang telah dijalankan selama setahun terakhir. “Semua berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Pertemuan ini pertama kali diungkap Menhan Sjaifrie Sjamsoeddin. Ia menyebut diskusi bukan sekadar silaturahmi politik, melainkan pembahasan serius soal masa depan bangsa.

“Bukan hanya kumpul-kumpul. Ini diskusi tentang pengelolaan negara, dari sumber daya alam sampai keuangan nasional,” kata Sjaifrie di Cibodas, Bogor, Sabtu (31/1/2026).

Sjaifrie menegaskan, Presiden ingin mengajak semua pihak. Termasuk mereka yang selama ini kritis, untuk realistis melihat kondisi bangsa dan bersama-sama mencari solusi.

“Keberpihakan kepada rakyat harus ditunjukkan secara moral dan tindakan,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkap, pertemuan berlangsung mulai sekitar pukul 17.00 WIB hingga 20.45 WIB. Diskusi, kata dia, berjalan dinamis dan terbuka.

“Bapak Presiden mempresentasikan kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa,” tulis Said Didu di akun media sosial X @msaid_didu, Minggu (1/2/2026).

Menurut Didu, Presiden mende-ngarkan secara serius seluruh pandangan para tokoh, termasuk kritik dan isu-isu sensitif. Dalam diskusi itu, para peserta sepakat bahwa kedaulatan negara harus dikembalikan, rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama, dan pemberantasan korupsi tidak boleh kendur.

yang turut hadir menegaskan, para tokoh yang datang tak tepat dilabeli oposisi.

“Lebih tepat disebut pakar dan tokoh masyarakat yang kritis,” ujarnya.

Abraham mengungkap, pertemuan berlangsung sekitar 4,5 jam, dari pukul 16.30 WIB hingga 21.00 WIB. Diskusi diawali dengan paparan Presiden Prabowo selama sekitar 40 menit.

“Soal sumber daya alam, Presiden sangat serius melawan oligarki. Beliau mengaku tidak takut meski ada risiko serangan balik ekonomi,” ungkap Abraham.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung reformasi kepolisian, hasil pertemuan di World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, serta keputusannya bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam forum internasional itu, Prabowo disebut konsisten membela Palestina.

Setelah paparan Presiden, para tokoh secara bergiliran menyampaikan pandangan sesuai bidangnya masing-masing. Abraham Samad mengaku mempresentasikan peta jalan pemberantasan korupsi serta strategi peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Langkah Presiden Prabowo merangkul para pengkritik mendapat apresiasi pengamat. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai sikap ini mencerminkan kenegarawanan.

“Presiden tidak menganggap kritik sebagai ancaman. Ini sikap negarawan,” kata Fernando kepada *Rakyat Merdeka*.

Ia mengingatkan agar Presiden terus membuka telinga dan tidak hanya mendengar masukan yang bersifat asal bapak senang (ABS). Penting juga mendengar masukan dari pihak yang berseberangan.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A. Bakir Ihsan juga menilai dialog langsung dengan tokoh kritis sebagai langkah positif. Namun ia menegaskan, pertemuan harus ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret.

“Yang penting bukan hanya simbol merangkul, tetapi benar-benar mengakomodasi kritik,” ujarnya. ■ **FAQ**

Hari Ini Pasar Saham

... DARI HALAMAN 1

dengan mundurnya para petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, Purbaya melihat, kekhawatiran ini telah hilang. Sebab, proses perbaikan sudah selesai. BEI dan OJK juga memiliki sistem tata kelola yang dirancang agar proses pergantian pejabat dapat dilakukan dengan mulus. Sehingga tidak ada gangguan pada manajemen dan operasional bursa.

“Kalau sudah begitu, mereka (pasar) akan melihat fundamentalnya. Fundamental ekonominya bagus. Saya perbaikan terus dan akan membaik terus ke depan. Tahun ini mungkin ekonominya bisa saya dorong mendekati 6 persen,” tutur-nya.

Mantan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini optimistis, IHSG akan menguat. Hal ini seiring dengan siklus bisnis yang dapat berputar naik ke titik tertinggi, setelah menyentuh titik terendah.

Purbaya mengakui, peluang koreksi tetap terbuka. Kata dia, kemungkinan itu selalu ada. “Cuma peluangnya kecil,” imbuhnya.

Dia kembali menegaskan, fondasi ekonomi saat ini bagus. Respons kebijakan dari BEI maupun OJK juga cepat.

“Harusnya ini akan menjadi modal yang kuat sekali untuk tumbuh lebih kencang,” tandasnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hal yang sama. Airlangga lalu menyakinkan pelaku pasar dengan menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pesan Bapak Presiden saya kutip langsung. ‘Kepada para investor domestik, mitra internasional dan masyarakat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh,’” tutur Airlangga.

Airlangga memastikan, Pemerintah akan memantau pasar keuangan agar berjalan dengan baik. Dengan begitu, hal-hal yang menjadi kekhawatiran pasar tidak lagi terjadi. “Kami berkomitmen pada iklim yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” tegasnya.

Dengan kepastian ini, investor pun merasa tenang. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P Roeslani menyatakan, investor percaya dengan perbaikan yang dilakukan Pemerintah.

Rosan mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, dia telah bertemu dengan sejumlah investor asing. Hasilnya cukup menyenangkan. Pelaku pasar global menyambut baik berbagai upaya perbaikan yang dilakukan Indonesia.

“Mereka semakin confidence dengan pasar kita. Apalagi dengan aksi-aksi yang kita lakukan beberapa hari ini, respons

mereka sangat positif,” ujar Rosan, di Gedung BEI Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Dengan sentimen tersebut, Rosan yakin, IHSG bakal kembali bangkit. “Insya Allah, hari Senin dan seterusnya pasar saham kita akan rebound dan berjalan dengan baik,” katanya.

Rosan menambahkan, investor asing juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan *free float* minimum 15 persen. Aturan ini dinilai mampu meningkatkan keterbukaan pasar sekaligus memperbaiki likuiditas saham.

Meski demikian, para investor juga menyampaikannya sejumlah masukan. Salah satunya terkait aturan keterbukaan kepemilikan saham di atas 5 persen yang dinilai masih perlu penyempurnaan agar iklim investasi semakin menarik dan transparan.

Ketentuan ini mewajibkan investor yang menguasai lebih dari 5 persen saham suatu emiten untuk melaporkan kepemilikannya kepada otoritas pasar modal. Investor meminta ambang batas tersebut diturunkan menjadi 1-2 persen, seperti yang diterapkan di sejumlah negara lain, misalnya India.

Rosan sudah meminta OJK dan BEI menindaklanjuti permintaan tersebut, khususnya soal keterbukaan ke level 1-2 persen. Dengan begitu, upaya pembentukan harga secara tidak wajar akan semakin sulit dilakukan.

“Dengan begitu, aksi untuk mencipta-

kan harga yang semu akan menjadi sangat-sangat sulit. Karena investornya akan terbuka. Kalau mereka melakukan tindakan itu (mengoreksi harga saham), pasti akan terdeteksi,” tutup Rosan.

Pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Paul Sutaryono juga meyakini, kondisi pasar saham nasional akan berangsur-angsur membaik. Perbaikan tersebut seiring langkah pembenahan yang tengah dilakukan regulator dan pengelola bursa.

“Pasar saham akan membaik sejalan dengan perbaikan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia,” kata Paul, kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (1/2/2026).

Peningkatan peringkat global MSCI telah memberikan tenggat waktu bagi Indonesia hingga Mei 2026 untuk menuntaskan berbagai catatan evaluasi. Karena itu, OJK dan BEI diminta segera melakukan perbaikan secara konsisten dan menyeluruh.

“Evaluasi MSCI itu serius. OJK dan BEI harus bergerak cepat melakukan perbaikan,” sarannya.

Menurut Paul, pasar modal Indonesia membutuhkan transformasi besar-besaran. Perubahan ini dinilai mendasar untuk memulihkan sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

“*Market confidence* itu kunci. Tanpa kepercayaan, pasar tidak akan sehat,” tegasnya. ■ **MEN**

Polri Sudah Lama Pantau Kasus Saham Gorengan

Polri & Kejagung

... DARI HALAMAN 1

Bareskrim Polri juga sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas beberapa perkara serupa,” terangnya.

Dia mengungkap, terdapat perkara saham gorengan yang sudah bergulir hingga persidangan. Di antaranya kasus Direktur PT MML berisial J serta mantan kepala unit di BEI dengan inisial MB.

Kedua kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht berdasarkan putusan Nomor 400/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel dan 400/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel. Kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 104 juncto Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan serta denda Rp 2 miliar,” urai Ade.

Dia memastikan, penyelidikan dugaan praktik penggorengan saham terkait anjloknya IHSG pekan lalu akan

dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mengenai prosesnya, Ade belum dapat berbicara lebih jauh sampai ditemukannya bukti-bukti awal dugaan tindak pidana.

Tak lama setelah itu, Kejagung juga bergerak. Korp Adhiyaksa ini tengah memantau kejatuhan IHSG yang terjadi secara mendadak, pekan lalu. Dinamika pasar saham tersebut menjadi perhatian serius Kejagung karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Kejaksanaan juga memantau atau monitor adanya kejadian-kejadian, seperti kejahatan atau anjloknya IHSG secara mendadak,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaeman Nahdi, Jumat (30/1/2026).

Hingga saat ini, Kejagung memang belum melakukan pemeriksaan ataupun langkah hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan maupun pengaturan IHSG. Dengan begitu, Kejagung tetap menelaah secara menyeluruh penyebab jatuhnya IHSG, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana.

“Semua kami telaah (termasuk potensi pidana). Pokoknya semua yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum kita pasti pantau,” katanya.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarak setuju dengan turun tangannya Polri dan Kejagung dalam masalah ini. Dia meminta agar pelaku manipulasi saham ditindak tegas. Sebab, praktik ini tidak sekadar melanggar etika, tetapi termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Kata Mufti, tindakan menggoreng saham berpotensi merugikan masyarakat luas, khususnya para investor ritel. Praktik ini juga dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap pasar modal dan merusak fungsi pasar sebagai penyedia pembiayaan jangka panjang.

Untuk perbaikan, BPKN memberi tiga masukan ke OJK dan BEI. Pertama, mendorong penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik manipulasi harga saham. BPKN mendorong OJK bersama aparat penegak hukum

menindak tegas setiap perilaku yang menyebabkan pergerakan harga saham tidak mencerminkan kondisi fundamental.

“BPKN secara khusus meminta OJK, BEI, dan Bareskrim Polri melakukan penelusuran awal, penyelidikan, serta penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” ucapnya.

Kedua, peningkatan literasi publik. Dia menerangkan, mayoritas investor ritel yang belum sepenuhnya paham risiko pasar modal. Karena itu, akselerasi program edukasi sangat krusial. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat mampu membedakan antara investasi jangka panjang yang sehat dengan spekulasi jangka pendek yang manipulatif.

Ketiga, mendorong peningkatan transparansi dan kualitas emiten, khususnya pada saat penawaran umum perdana saham (IPO). Penguatan standar pencatatan efek, termasuk keterbukaan informasi terkait *free float* dan struktur kepemilikan, dinilai penting. Hal ini untuk mencegah pasar dimanfaatkan sebagai sarana transaksi sumbu yang merugikan investor kecil. ■ **BYUMEN**

Transaksi Dari Penambangan Emas Ilegal Nyaris 1.000 T

Pemerintah Buru Pemodal

... DARI HALAMAN 1

mendalam. Sebab, aliran dana PETI melibatkan banyak lapisan dan pihak perantara. “Ada layer pertama, kedua, bahkan menggunakan pihak lain,” jelasnya.

PPATK sendiri mencatat terdapat 27 hasil analisis dan dua informasi terkait sektor pertambangan, dengan nilai transaksi mencapai Rp 517,47 triliun. Fokus utama adalah dugaan PETI yang tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, hingga wilayah lainnya.

Selain merusak lingkungan, emas ilegal hasil PETI juga terindikasi mengalir ke pasar luar negeri. Dalam periode 2023–2025, PPATK mencatat

nilai transaksi terkait PETI mencapai Rp 185,03 triliun, dengan total perputaran dana mencapai Rp 992 triliun.

Langkah tegas pemerintah terkait penambangan ilegal ini mendapat dukungan DPR. Anggota Komisi XII DPR Syafrudin menilai, penindakan harus menasar aktor besar yang selama ini kebal hukum. “Selama ini penambang ilegal seperti tidak takut hukum. Batu bara diangkat lewat jalan umum, merusak lingkungan, merugikan warga,” ujarnya.

Ia meminta para pelaku dijerat dengan pasal kerusakan lingkungan agar memberi efek jera. “Jangan tebang pilih,” tegasnya.

Dukungan serupa disampaikan Anggota Komisi IV DPR Rina Sa’adah. Menurutnya, sanksi pidana harus dibarengi sanksi ekonomi dan kewajiban

pemulihan ekologis.

“Tambang ilegal bukan hanya merusak, tapi juga merampas hak negara dan meninggalkan beban jangka panjang. Negara tidak boleh kalah,” tegas Rina.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani juga menyoroti temuan aktivitas PETI di sekitar Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ia mendorong aparat menindak bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual dan jaringan pendana. “Kalau ada oknum yang membekingi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus ditindak tegas,” dorongnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch Ferdy Hasiman mengapresiasi ketegasan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penertiban tambang ilegal berdampak langsung pada pasar dan tata

kelola sektor tambang.

“Baru sekarang ada ketegasan. Ketika tambang ilegal ditertibkan, pasokan turun dan harga bergerak alami,” kata Ferdy.

Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmen memberantas tambang ilegal dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026. Pemerintah, kata Prabowo, telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal, meski jumlah serupa masih terdeteksi.

Selain itu, pemerintah juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal serta mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar hukum dan ketentuan lingkungan. “Satu-satunya jalan adalah keberanian menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh mundur,” tegas Prabowo. ■ **FAQ**

Gerbang Nusantara

Dedy Wahyudi Wali Kota Bengkulu Makan Bersama Driver Sampah



(TPA). Mereka membuang muatan di halaman kantor Wali Kota dan DPRD, sebagai bentuk protes atas kondisi TPA.

Tim kuasa hukum Pemkot Bengkulu, merespons aksi tersebut dengan membuat laporan polisi. Mereka menilai, aksi para driver pengangkut sampah sudah melewati batas, dan layak diproses secara hukum.

Melanjutkan keterangannya, Dedy menegaskan, Pemkot Bengkulu akan terus berbenah agar kota teraebut menjadi lebih bersih dan tertata. Sebab itu, pihaknya mengundang para driver pengangkut sampah makan bersama, berdialog, dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Yang sudah-sudah kita jadikan evaluasi. Ke depan, kita terus berbenah. Kota ini harus bersih dan tertata, dan semuanya sudah berada di jalur yang benar,” cetusnya.

Lebih lanjut, Dedy mengaku tak memiliki niat untuk mengkriminalisasi warga. Dia memastikan, laporan hukum yang sempat dibuat telah dicabut oleh tim hukum Pemerintah Kota Bengkulu.

“Mereka adalah warga saya, tidak mungkin saya korbakan. Saya bekerja sepenuhnya untuk masyarakat,” imbuhnya.

Politisi PAN itu menambahkan, laporan dilakukan saat dirinya sedang berada di luar Bengkulu. Menurut dia, langkah tersebut merupakan inisiatif tim kuasa hukum Pemkot Bengkulu, yang bertujuan menjaga marwah Pemerintah daerah.

Mendengar laporan itu, Dedy mengaku sempat merenung cukup lama. Dia tidak menginginkan rakyatnya harus berurusan dengan hukum apalagi sampai dipenjara.

“Tim hukum berpikir, itu bagian dari menjaga marwah Pemerintah. Tapi, saya tidak ingin masyarakat saya dipenjara atau dikriminalisasi. Saya merenung cukup lama, memutuskan meminta maaf, dan memerintahkan tim hukum mencabut laporan,” terangnya. ■ **OSP**

POLEMIK Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, dengan ratusan driver pengangkut sampah di Kota Bengkulu berujung damai. Kemarin, Dedy mengundang para driver pengangkut sampah makan bersama, menyampaikan permohonan maaf, dan memerintahkan tim kuasa hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mencabut laporan polisi.

Silaturahmi Wali Kota Bengkulu bersama para driver pengangkut sampah berlangsung di Balai Kota Merah Putih, Kota Bengkulu, Minggu (1/2/2026) pagi. Pertemuan itu turut dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Herimanto beserta anggota DPRD lainnya; Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah; serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bengkulu.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi menyatakan, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Pemerintah. Menurutnya, kekhilafan dan kekurangan dalam pelayanan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja ke depan.

“Tidak ada manusia, yang tidak bersalah. Saya juga tempat salah, saya tidak gengsi meminta maaf,” kata Dedy disambut tepuk tangan riuh ratusan tukang sampah yang hadir.

Diketahui, polemik antara Pemkot Bengkulu dengan para driver pengangkut sampah bermula dari kecacauan di Tempat Pemrosesan Akhir



TUMPENG TEMPE: Foto udara suasana Ruwat Desa dengan Tumpeng Tempe setinggi 9 meter di Lapangan Desa Sedengamijen, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (1/2/2026). Tradisi yang diselenggarakan setiap tahun menjelang bulan Ramadhan tersebut menjadi ajang sedekah dan bentuk rasa syukur para perajin tempe kepada Tuhan YME atas limpahan rezeki serta promosi wisata di daerah itu.

ANTARA FOTO/UMARUL FARUQ/FOC

Diwarnai Aksi Kericuhan

Musda Golkar Sumut Berlangsung Aklamasi

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diwarnai aksi saling lempar bambu dan petasan. Kericuhan yang terjadi di luar arena Musda itu, dipicu oleh sekelompok orang yang memaksa masuk ke arena Musda di Hotel JW Marriott, Medan, Minggu (1/2/2026) sore.

PANTAUAN *Rakyat Merdeka* di lapangan, keributan pecah pukul 14.47 WIB. Sejumlah orang berseragam ormas sayap partai memaksa masuk ke lantai dua hotel yang menjadi lokasi utama Musda XI DPD Golkar Sumut.

Aksi saling dorong, berujung pada bentrokan fisik. Massa terlihat saling serang dan kejaran menggunakan kayu, potongan bambu, hingga ledakan petasan.

Setelah 40 menit, aparat kepolisian berhasil menertibkan keadaan. Mereka juga meningkatkan pengawal di sekitar arena Musda, pasca insiden tersebut.

Sekretaris Steering Committee (SC) Musda XI DPD Golkar Sumut, Muhammad Asril menyatakan, kejadian itu dipicu oleh ketidakpuasan massa yang dilarang masuk ke area steril persidangan.

“Saat masuk tahapan sidang dan paripurna, tamu di luar peserta dan peninjau, diminta menyesuaikan diri. Kami sudah sampaikan, hanya yang memiliki undangan khusus yang bisa masuk ke forum,” ujar Asril, di Medan, Sumut, Minggu (1/2/2026).

Meski sempat memicu ketegangan di ruas jalan sekitar Bogor dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

Ketua DPD NasDem Kabupaten Bogor Friedrich Rumingtjap menuturkan, peresmian kantor, pelantikan pengurus, dan rakerda merupakan momentum untuk memperkuat solidaritas dan arah perjuangan partai di daerah.

“Ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi dan menyatukan visi perjuangan Partai NasDem di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Friedrich berharap, keberadaan kantor permanen di pusat pemerintahan Kabupaten Bogor dapat meningkatkan efektivitas kerja organisasi, sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Asep Wahyuwijaya menyatakan, peresmian Gedung DPD NasDem Kabupaten Bogor membuktikan bahwa partainya dan para kader yang ada di dalamnya, sudah selesai dengan urusan dirinya.

panitia tetap menginstruksikan seluruh kader untuk menjaga kekompakan dan soliditas demi kelancaran pelaksanaan Musda.

Dia juga memberi apresiasi kepada masyarakat yang ikut mengawal dan memantau jalannya Musda XI DPD Golkar Sumut. “Sudah ada pihak-pihak yang menginstruksikan kepada kawan-kawan, anggota-anggota supaya tetap menjaga kondusifitas, soliditas, dan tetap kompak,” imbuhnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, Musda bukan sekadar ajang perebutan kursi Ketua DPD Golkar Sumut, tapi momentum strategis untuk menyatukan visi dan menyelaraskan arah perjuangan partai lima tahun ke depan.

“Musda bukan hanya soal siapa ketuanya. Yang lebih penting, menyamakan visi, menyatukan pandangan, dan memastikan roda organisasi bergerak ke arah yang sama,” tegas Doli dalam sambutannya di hadapan peserta Musda.

Lebih lanjut, dia menyinggung fakta penting terkait kontestasi. Doli meminta, Musda XI Golkar Sumut tak mengulangi pengalaman lima tahun lalu yang harus digelar dua kali, atau menjadikan trauma Musda



Ahmad Doli Kurnia Tanjung

sebelumnya sebagai pelajaran bersama agar konsolidasi partai tidak kembali terganggu.

“Sumatera Utara ini punya pengalaman Musda dua kali. Mudah-mudahan dengan suasana kepemimpinan nasional yang baru dan komitmen kita semua, kekeliruan itu tidak terulang. Musda ini harus selesai dan tuntas,” cetusnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar itu juga menekankan tentang pentingnya menjaga suasana kondusif. Dia menilai, perbedaan pandangan di internal Golkar Sumut sebagai suatu hal yang wajar, serta bagian dari kultur politik daerah. “Tujuannya, tetap untuk membesarkan partai,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang hadir mewakili Provinsi Jawa Barat dan 1 orang perwakilan di DPR RI, gedung kantor partai politik yang megah sudah berdiri. Ini simbol dari kemenangan dan tingginya cita-cita kita,” katanya.

Pria yang akrab disapa Kang AW ini mengatakan, Gedung DPD NasDem juga merupakan bagian dari perjuangan bagi para kader untuk membangun Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Indonesia.

Dia menegaskan, Gedung DPD NasDem Kabupaten Bogor

kanisme dan tahapan Musda berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“DPP akan konsisten terhadap apa pun hasil Musda Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Prinsipnya, semua harus menghormati mekanisme organisasi,” kata Ace.

Berdasarkan laporan dari panitia dan (SC) Musda XI Golkar Sumut, lanjut dia, hanya satu calon Ketua DPD Golkar Sumut yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Meski tak menyebut nama, pernyataan Ace kian memperjelas arah Musda.

“Saya mendapat laporan, ada dua yang mendaftar, tapi yang memenuhi persyaratan hanya satu. Tentu secara resmi nanti forum Musda yang akan memutuskan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhanas itu berharap, Musda XI Golkar Sumut berlangsung lancar, demokratis, dan berakhir tanpa polemik. Dia menegaskan, soliditas internal menjadi kunci

agar Golkar Sumut tetap menjadi kekuatan utama menghadapi agenda politik ke depan, termasuk Pemilu 2029.

Anggota tim pemenang Andar Amin, Yasyir Ridho Loebis menyatakan, sebanyak 31 Ketua DPD Golkar tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumut menyatakan mendukung Andar Amin Harahap sebagai Ketua DPD Golkar Sumut periode 2025–2030.

Dukungan tersebut, lanjut dia, disampaikan jelang pelaksanaan Musda XI DPD Golkar Sumut, Sabtu (31/1/2026) malam. Menurut dia, mantan Bupati Padang Lawas Utara, Andar Amin, juga telah mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon ketua, Jumat (30/1/2026), dengan membawa dukungan mayoritas pemilih suara.

“Meski mengantongi dukungan mayoritas, terdapat empat pemilih suara yang dipastikan bersikap netral. Sikap tersebut, kata Yasyir, merupakan arahan langsung dari Plt Ketua Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung,” ungkapnya.

Kempat suara itu yang dipastikan netral, urai dia, dari instrumen seperti DPP, DPD, AMPG-KPPG, dan Dewan Pertimbangan. Menurutnya, arahan Plt Ketua Golkar Sumut itu bertujuan untuk menjaga netralitas.

Dengan konfigurasi tersebut, tambah Yasyir, Andar Amin menjadi satu-satunya bakal calon yang memenuhi syarat pencalonan, sebagaimana disampaikan dalam forum pembukaan Musda. “Musda akan berlangsung secara aklamasi, atau menunggu pengesahan forum,” harapnya. ■ **KAL**

Rebut Kembali Kursi DPRD PDIP Surabaya Bidik Suara Gen-Z

DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Perjuangan Kota Surabaya mendorong seluruh kader partai, mendekati diri dengan generasi muda. Upaya itu bertujuan untuk merebut kembali sejumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hilang pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu.

Ketua DPC PDIP Perjuangan Kota Surabaya, Armuji mengatakan, seluruh kader Partai Banteng di Kota Surabaya, harus lebih dekat dengan generasi muda. Dia minta seluruh kader merekrut dan merangkul kalangan Gen Z sebagai kekuatan baru partai, karena regenerasi merupakan kunci dari perkembangan zaman dan perubahan karakter pemilih.

“Kita harus merebut kembali kursi-kursi yang sempat hilang. Caranya dengan membuka partai seluas-luasnya, tidak eksklusif, serta merangkul calon-calon potensial di wilayah masing-masing, termasuk anak-anak muda dan tokoh masyarakat,” ujarnya di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (31/1/2026).

Armuji menguraikan, PDIP Perjuangan memiliki 11 kursi di DPRD Kota Surabaya, yang pada periode sebelumnya mempunyai 15 kursi Dewan. Karenanya, lanjut dia, kolaborasi antara kader senior dan generasi muda penting dilakukan, untuk memahami perkembangan teknologi, media sosial, dan pola komunikasi kekinian.

“Harus ada regenerasi dan kolaborasi antara yang berpengalaman dengan generasi muda

yang paham perkembangan zaman,” kata Wakil Wali Kota Surabaya itu.

Langkah tersebut, tambah Armuji, sejalan dengan arahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jatim. Menurutnya, Surabaya merupakan salah satu basis kekuatan PDIP Perjuangan, yang harus dimaksimalkan pada Pemilu mendatang.

“Sawahan ini basisnya PDIP. Seharusnya bisa mendapatkan dua kursi. Karena itu konsolidasi dan penguatan struktur di wilayah padat penduduk seperti ini menjadi sangat penting,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Bidang Politik dan Reformasi Hukum DPC PDIP Perjuangan Kota Surabaya, Aprizaldi menyatakan, sejumlah daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya, memiliki peran strategis dalam mendongkrak perolehan suara partai ke depan. Di antaranya, Dapil 4 Kota Surabaya.

“Dengan konsolidasi yang solid dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga ranting, kami optimis wilayah ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi kemenangan PDIP Perjuangan pada Pemilu mendatang,” katanya.

Wakil Sekretaris Bidang Program DPD PDIP Perjuangan Surabaya, Yordan M. Batara Goa meminta seluruh PAC aktif mencari kader muda baru. “Pertarungan 2029 ini ditentukan oleh generasi muda. Karena itu partai harus terbuka dan mau melibatkan mereka sejak sekarang,” sebutnya. ■ **OSP**

Alasan Presidensialisme Golkar Mau Parpol Di Senayan Sedikit Saja

PARTAI Golkar menolak wacana penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Pemberlakuan ambang batas untuk menopang sistem presidensialisme yang dianut Indonesia. Yaitu, hanya menempatkan sedikit partai politik (parpol) di parlemen nasional.

"Sistem politik yang berkesesuaian dengan presidensialisme adalah sistem multipartai sederhana," jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji, di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Diketahui, sistem multipartai sederhana merupakan sistem kepartaian yang memiliki sedikit partai politik di parlemen. Untuk itu, sistem ini sering kali diterapkan dengan mekanisme ambang batas. Tujuannya, menstabilkan pemerintahan koalisi dengan mencegah fragmentasi suara ekstrem.

"Kita mesti konsisten dalam pembangunan sistem politik Indonesia. Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Negara (UUD NRI) Tahun 1945," katanya.

Menurut Sarmuji, sistem politik, termasuk sistem kepartaian, tidak boleh dibangun terpisah dari desain dasar sistem pemerintahan. Dalam konteks presidensialisme, kata dia, Indonesia membutuhkan sistem multipartai sederhana agar pemerintahan berjalan efektif, stabil, dan akuntabel.

"Presidensialisme tidak akan pernah bekerja optimal jika ditopang sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi. Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang pada akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu menilai, ambang batas parlemen adalah resep jitu menjaga stabilitas politik. Termasuk, kata dia, sebagai instrumen yang konstitusional dan demokratis untuk mendorong penyederhanaan sistem

kepartaian secara alamiah. "Penolakan terhadap parliamentary threshold pada dasarnya adalah penolakan terhadap sistem multipartai sederhana," katanya.

Sarmuji mengingatkan, penolakan terhadap upaya penyederhanaan sistem kepartaian sama saja dengan mendorong lahirnya sistem multipartai ekstrem yang tidak sejalan dengan karakter presidensialisme. Partai Golkar, kata dia, akan terus berkomitmen mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional, konstitusional, dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan demi kepentingan bangsa dan negara.

"Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno mengusulkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Dia menilai, keberadaan ambang batas selama ini justru menyia-nyiaakan aspirasi jutaan pemilih.

"Dalam Pemilu Legislatif (Pileg), suara partai yang gagal melampaui ambang batas tidak terkonversi menjadi kursi di DPR," Eddy di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

PAN, lanjut Eddy, sejak awal menginginkan penghapusan ambang batas, baik untuk Pilpres maupun Pileg. Penghapusan ambang batas parlemen, kata dia, dapat mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Pileg DPRD provinsi serta kabupaten/kota sehingga partai politik lebih beragam.

"Oleh karena itu, PAN berpandangan penghapusan ambang batas parlemen sebaiknya diimplementasikan seperti di DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Partai yang kursinya belum mencukupi dapat bergabung membentuk fraksi gabungan," jelasnya. ■ BSH



ANTARA FOTO/Hariyanto Perdana Putra/aga

RELAWAN NU: Relawan Nahdlatul Ulama (NU) peduli kebencanaan mengikuti serangkaian Apel Kemanusiaan di Alun-alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (1/2/2026). Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menggelar Apel Kemanusiaan yang dihadiri oleh sekitar 4.000 relawan Nahdlatul Ulama (NU) peduli kebencanaan dari berbagai wilayah Jateng dalam rangka memperingati hari lahir ke-100 tahun NU.

Dianggap Sebagai Kawan Politik

PAN Siap Sambut PSI Masuk Senayan 2029

Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik tekad Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk masuk ke Senayan di Pemilu 2029.

WAKIL Ketua Umum (Waketum) PAN, Viva Yoga Mauladi menyambut baik semangat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk masuk ke Senayan pada Pemilu 2029. Viva mengatakan, setiap partai politik (parpol) yang berkontestasi di pesta demokrasi lima tahunan, memiliki semangat yang sama dalam membangun Indonesia.

"PSI tidak akan menjadi lawan politik bagi PAN, tetapi akan menjadi kawan politik dalam membangun kualitas demokrasi di Indonesia," kata Yoga, kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (1/2/2026).

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) ini mengatakan, untuk meningkatkan kualitas demokrasi, tentu harus memiliki partai-partai politik yang berkualitas dan memiliki legitimasi tinggi dari masyarakat. Legitimasi, kata dia, didapat dari keterpilihan wakil partai politik untuk duduk di kursi legislatif.

"PAN turut men-support PSI dapat lolos di DPR pada Pemilu

2029 nanti," ungkapnya. Viva berharap, pesta demokrasi lima tahunan mendatang semakin meningkatkan kualitas politik dan menghasilkan produk politik berupa kesejahteraan rakyat. PAN, kata dia, konsisten memiliki semangat untuk membantu rakyat dan menjadi pedoman PAN sedari dulu.

"Sejak Pemilu 1999 sampai sekarang, PAN selalu lolos parliamentary threshold. Sekarang PAN memiliki 48 kursi DPR. PAN akan terus berjuang untuk terus masuk di DPR," kata kader Partai berlambang Matahari ini.

Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Jokowi menyatakan siap mati-matian menjadikan PSI sebagai partai besar pada 2029. Tak tanggung-tanggung, Jokowi siap turun langsung hingga ke tingkat kecamatan demi memenangkan partai berlambang Gajah Belalai Merah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI



Viva Yoga Mauladi

2026 di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (31/1/2026). Kehadiran Jokowi menyulut semangat ribuan kader yang memadati arena Rakernas.

Kehadiran Jokowi di Rakernas disambut meriah Ketua DPW PSI Sulsel, Muammar Ferirae Gandi Rusdi, jajaran pengurus DPP PSI, serta ribuan kader yang meneriakkan yel-yel, "Selamat datang Jokowi di PSI".

Mengenakan kemeja putih

lengan panjang, celana hitam, dan penutup kepala passapu khas Makassar, Jokowi melangkah masuk ke arena Rakernas diiringi tari dan musik kecap Bugis-Makassar. Setelahnya, Jokowi langsung menuju ke panggung.

Dalam arahnya, Jokowi menegaskan, target PSI tidak main-main, untuk menjadi partai besar, mesin partai wajib dibangun hingga ke level paling bawah.

"Target PSI ini jadi partai besar. Kalau targetnya tinggi, mesinnya juga harus besar. Tidak bisa struktur cuma sampai DPD. Harus sampai RT/RW. Harus kita selesaikan akhir 2026," tegasnya.

Jokowi mengingatkan, kemenangan Pemilu tidak mungkin diraih tanpa struktur partai yang hidup dan bekerja nyata di lapangan. Dia mengaku masih sanggup mendatangi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan sekitar 7.000 kecamatan.

"Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup," pelek Jokowi disambut tepuk tangan dan teriakan "Hidup Jokowi!".

Ayah kandung Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep

itu menegaskan komitmennya mengawal PSI secara total. Militansi kader, kata Jokowi, harus digenjot sejak sekarang untuk menghadapi Pemilu 2029.

"Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya juga akan bekerja keras untuk PSI. Mati-matian untuk PSI," ujarnya lanjut.

Jokowi juga menyebut PSI kini telah bertransformasi menjadi partai super Tbk yang semakin inklusif. Dia mengungkapkan, banyak tokoh nasional dan daerah akan bergabung dengan PSI. "Semakin banyak yang bergabung, pasti semakin beragam. Karena itu jaga toleransi, satu visi, jaga kesolidan dan persatuan," pesan Jokowi.

Selain penguatan jaringan lapangan, Jokowi meminta kader PSI menguasai ruang digital dan media sosial. Menurutnya, perang politik ke depan tidak hanya di darat, tetapi juga di jagat maya.

"Negara ini perlu partai politik yang mengusung kebaikan. Politik untuk kebaikan," tandasnya.

Menutup arahan, Jokowi kembali berura lanjut, "PSI mana solidaritasmu?" yang dijawab serentak kader, "Kuat, Cerdas, Setia!". ■ BSH

Kosgoro 1957 Segera Mubes Dave Mau Maju Lagi Jadi Ketua Umum



Dave Akbarshah Fikarno Laksono

KETUA Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengaku ingin kembali melanjutkan kepemimpinannya untuk periode 2026-2031. Anak kandung politik Partai Golkar, Agung Laksono itu mengaku bakal maju di Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro tahun ini.

"Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan niat untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957," kata Dave di acara Silaturahmi Para Senior Kosgoro 1957 di Hotel Lorin Sentul, Jawa Barat, Sabtu (31/2/2026) malam.

Di forum politikus senior Beringin itu, Dave mengungkapkan, masa kepemimpinannya di Kosgoro 1957 untuk periode 2021-2026 akan segera berakhir. Dalam waktu dekat, kata dia, akan digelar Mubes untuk memilih Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 untuk periode selanjutnya.

"Oleh karena itu, saya memohon doa restu, arahan, dan dukungan agar Kosgoro 1957 terus dapat kita jaga, kita besarkan, dan kita arah-

kan menuju masa depan yang lebih baik," katanya.

Dave berharap, silaturahmi ini semakin memperkuat persaudaraan dan sinergi antarkader. Dia mengatakan, sinergi ini akan memperkokoh kebersamaan dan menjadi langkah awal menuju perjalanan Kosgoro 1957 yang lebih gemilang.

"Saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran para sesepuh dan senior yang terus menjadi sumber kekuatan dan penunjang perjalanan Kosgoro 1957," ujar anggota DPR ini.

Dave menegaskan, Kosgoro 1957 tidak akan berada pada posisi seperti saat ini tanpa kontribusi, dedikasi, dan loyalitas para sesepuh serta senior. Dia mengatakan, fondasi yang dibangun dengan keikhlasan dan pengabdian telah menjadikan Kosgoro 1957 bukan sekadar organisasi, melainkan keluarga besar yang kokoh dan kuat.

"Tanpa nilai-nilai yang diwariskan para sesepuh dan senior, mustahil Kosgoro 1957 dapat bertahan dan berkembang hingga hari ini," tegasnya.

Diketahui, acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh senior Kosgoro 1957. Antara lain, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, Ridwan Hisjam (Jawa Timur), Iqbal Wibisono (Jawa Tengah), Mustar Muslim, Erwan Soekardja, Harry Sohar, Bona Tobing, Islan Hanura (Sumatera Selatan).

Lalu, Panggah Susanto (Jawa Tengah), Deli Singsih Iswara (Jawa Barat), Ichak Phinera Wijaya, Rambe K. Zaman, Oman Rafies, Irma Alamsyah, Yan Pieter Pangaribuan, serta Yasril Ananta Badaruddin. ■ BSH

Trending Topics

Permintaan Warganet

Tutup Rapat Jalur Haji Ilegal

WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanungkalit mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa berhaji dengan cara ilegal, seperti tidak menggunakan visa resmi haji adalah haram.

"Visa resmi haji itu dikeluarkan secara resmi, ada juga visa yang non-haji. Jadi, kalau naik haji dengan cara ilegal itu haram. Kami harap ada panduan seperti itu untuk seluruh umat Islam di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Penegasan tersebut dinilai penting untuk mencegah penipuan travel dan risiko deportasi yang kerap menimpa jemaah Indonesia. Dahnil terus mengingatkan masyarakat agar tidak menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal.

"Tidak ada itu haji yang tidak antre. Ya. Tidak ada itu haji yang hari ini bayar, besok berangkat. Itu nggak ada. Jadi kalau ada yang menjanjikan haji langsung berangkat, itu pasti penipuan. Pasti itu ilegal," jelasnya.

Menurut Dahnil, satu-satunya jalur haji yang tidak memerlukan antrian adalah melalui visa mujahid. Visa ini merupakan visa haji non kuota yang dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai undangan kehormatan. Namun, kata dia, tetap wajib melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) resmi di Indonesia.

"Jadi, saya ingatkan kepada

publik, jangan mau ada yang dirayu-rayu langsung naik haji tanpa antre. Itu semuanya ilegal," tandasnya.

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berhaji menggunakan visa tidak resmi. Dia menegaskan, jalur ilegal bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan jemaah.

"Berangkat haji harus diniatkan dengan baik dan dilakukan sesuai aturan agar tidak berujung mudarat," ujarnya di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, jemaah haji ilegal tidak tercatat dalam sistem resmi. Sehingga, kata dia, tidak mendapatkan layanan kesehatan, perlindungan, maupun akomodasi yang layak. Risiko hukum pun mengintai, mulai dari deportasi, denda ratusan juta rupiah, hingga ancaman penjara.

"Jemaah haji ilegal tidak terdata sehingga sulit mendapat pertolongan medis cepat. Kasus jemaah yang meninggal di Gurun (Tan'im) tahun lalu harus menjadi pelajaran pahit bagi kita bersama agar tidak ada lagi yang menempuh jalur berbahaya ini," ujarnya.

Dia juga mendorong Pemerintah memperkuat sosialisasi bahaya haji non-prosedural agar niat ibadah tidak berubah menjadi petaka. Kata dia, jangan sampai niat ibadah yang mulia justru berakhir pada kerugian

materi dan hilangnya nyawa hanya karena ingin menempuh jalur singkat yang tidak resmi.

"Edukasi kepada masyarakat harus diperkuat," tandas Maman.

Staf Teknis Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Hasyim Hilaby mengungkapkan, kepada calon jemaah haji sejak masih berada di Tanah Air. Dia menjelaskan, kebijakan ini diambil bukan sekadar teknis administratif, melainkan sebagai upaya negara untuk menghadirkan ketenangan psikologis bagi jemaah haji.

"Terlebih, sistem digital haji Arab Saudi kini semakin ketat dan terintegrasi. Dengan demikian, seluruh akses ibadah mereka telah terjamin secara resmi," katanya.

Dengan memegang kartu nusuk sejak di Tanah Air, jemaah dipastikan memiliki legalitas penuh untuk memasuki wilayah-wilayah krusial ibadah haji. Area tersebut mencakup Makkah, Madinah, hingga Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) saat puncak musim haji.

"Nusuk ini bukan sekadar identitas. Ini adalah akses legal jemaah Indonesia. Kartu ini menjadi filter agar tidak ada orang-orang ilegal yang masuk dan mengganggu rotasi perjalanan jemaah haji resmi," tandas Hasyim.

Di media sosial X, warganet ramai menanggapi imbauan Pemerintah yang melarang masyarakat naik haji selain lewat

jalur resmi. Selama ini banyak berseliweran penawaran naik haji lewat jalur ilegal. Akibatnya masyarakat yang tidak sabar menunggu antrean haji banyak yang menjadi korban.

Akun @nummusantarax mendorong agar Pemerintah menindak tegas oknum-oknum yang menawarkan naik haji lewat jalur ilegal. "Tanpa fatwa MUI pun naik haji secara ilegal memang haram bang. Haji ilegal ya haram, haji pakai uang korupsi ya haram. Kalau ditemukan orang yang menawarkan perjalanan haji secara ilegal seharusnya langsung ditangkap saja sama aparat," katanya.

Akun @humanauto menyebutkan, banyak orang yang masih berharap segera berangkat haji tanpa menunggu bertahun-tahun. "Haji reguler antrenya lama, kalau furoda harus siap bayar lebih. Ada lagi nih jalur naik haji, cuma visanya bukan visa haji alias jalur ilegal, nanti resikonya kejar-kejaran sama petugas, syukur-syukur nggak ketangkap," tulisnya.

Akun @missvra menuturkan, lantaran banyak orang yang punya pengalaman umroh secara mandiri, beberapa dari mereka memanfaatkan pengalaman itu untuk berangkat haji secara ilegal. "Karena sekarang umroh bisa mandiri, eh pada merasa mampu untuk naik haji tanpa jalur resmi. Makanya jangan kaget banyak orang Indonesia yang berhaji secara ilegal alias dengan visa wisata religi, eh pas

disana kena sweeping alias kena ciduk," terangnya.

Akun @g3ndh3ng menekankan, Pemerintah seharusnya menutup celah bagi orang-orang yang ingin naik haji secara ilegal.

"Jika dinyatakan ilegal, harusnya dilarang dong, itu iklan haji tanpa antri ada arab yang dimana-mana, disembarkan secara terbuka, nama ustad2nya ada, termasuk kelompok2nya. Aparat berwenang harus turun tangan menindak masalah ini," sarannya.

Sementara, @lutfiana_ot menerangkan, pada tahun-tahun sebelumnya banyak orang Indonesia yang bisa naik haji lewat jalur ilegal, dan dampaknya dirasakan seluruh jemaah. "Jemaah haji Indonesia tahun 2024 itu jumlahnya terbanyak sepanjang masa. Belum lagi yang ilegal, mereka biasanya tidur di dekat jamarat. Zona VIP aja full padat sampai banyak yang tidur di lorong-lorong," paparnya.

Akun @SholehaNur1 mengingatkan, orang Indonesia yang naik haji secara ilegal kini menjadi atensi khusus dari pihak berwenang Arab Saudi. "Arab Saudi membolehkan jemaah naik haji secara mandiri asal visanya haji. Sementara banyak orang Indonesia yang naik haji secara nyelonong alias ilegal. Sekarang di Arab Saudi pengawasannya ketat banget, ketahuan naik haji secara ilegal bisa ditangkap dan ditahan, mana dendanya juga gak main-main," bebarnya. ■ OSP

BSI & Kadin Sinergi Dukung Pebisnis Terus Berkembang



FOTO: INSTAGRAM KEMAS ERWAN HUSAINY
Kemas Erwan Husainy

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), menyepakati berbagai poin kerja sama. Di antaranya pemanfaatan jasa layanan keuangan syariah untuk lebih dari 15 ribu anggota Kadin di seluruh Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperluas akses bagi segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal untuk bisa menjadi penggerak ekonomi *grass-roots* berbasis kerakyatan.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy menegaskan, pihaknya akan terus membuka ruang sinergi dan kolaborasi yang lebih luas kepada pelaku usaha, asosiasi, maupun Pemerintah Daerah untuk bersama mendorong UMKM naik kelas.

"Harapannya, sinergi dengan Kadin menjadi peluang untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang berkelanjutan," jelas Kemas dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Agenda penandatanganan nota kesepahaman antara BSI dengan Kadin merupakan bagian dari kegiatan Kadin *Sharia Economic Outlook 2026*.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki jumlah UMKM yang besar, di mana berdasarkan data Kementerian UMKM, per Desember 2024 tercatat ada lebih dari 30 juta UMKM dengan sekitar 29 juta individu pengusaha yang mampu menyerap lebih dari

45 juta tenaga kerja. Hal ini menjadi potensi besar jika dikelola dan didampingi secara lebih optimal. Harapannya, dengan adanya kerja sama antara BSI dan Kadin, kedua belah pihak akan menjadi *entry gate* dalam meningkatkan pemerataan ekonomi lintas sektor di berbagai wilayah.

"Nasabah UMKM BSI mencapai lebih dari 345 ribu orang. Di mana sekitar 5 ribu orang merupakan UMKM binaan dari berbagai lintas usaha, mulai dari sektor makanan minuman, *fashion*, hingga industri kreatif," sebutnya.

Menurut Kemas, jumlah ini terus meningkat seiring dengan pembinaan yang dilakukan, serta literasi kepada komunitas UMKM dan ekosistem pengusaha di dalamnya. Langkah tersebut menjadi komitmen dan keseriusan BSI dalam mewujudkan UMKM Indonesia agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kadin memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta misi yang sama dengan BSI, untuk mendorong UMKM lebih terarah, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BES) Kadin Titu Khoiriah menyampaikan komitmen pihaknya, untuk menjadikan UMKM tangguh dan adaptif di tengah tantangan persaingan usaha yang ketat.

Dia menekankan, sinergi Kadin dan BSI ini menjadi langkah untuk penguatan sektor UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional.

Apalagi, sebut Titi, lebih dari 97 persen lapangan kerja diciptakan oleh UMKM dan sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. "Artinya, kalau UMKM kuat, ekonomi Indonesia pasti tangguh," ujarnya. ■ DWI

Selama 2025

PTPN IV PalmCo Salurkan Dana TJSL Rp 65 Miliar

SUBHOLDING Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, kembali menegaskan perannya sebagai agen pembangunan berkelanjutan.

Sepanjang 2025, perusahaan tercatat telah menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai lebih dari Rp 65 miliar yang tersebar di 94 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Bukan sekadar bantuan sosial biasa, penyaluran ini menandai pergeseran strategi perusahaan dari sekadar filantropi, menjadi penciptaan nilai bersama atau *Creating Shared Value* (CSV).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menjelaskan, bahwa perusahaan kini mengalokasikan 70 persen dana TJSL untuk program CSV yang berdampak langsung pada bisnis dan sosial, sementara 30 persen sisanya dialokasikan untuk aksi filantropi.

"Alokasi ini bertujuan menciptakan kondisi di mana perusahaan dan masyarakat sama-sama menjadi pemenang (*winning a lot*)," ujar Jatmiko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).

Salah satu sorotan utama penyaluran TJSL 2025 adalah keberhasilan perusahaan dalam mengintegrasikan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Menengah) lokal ke dalam rantai pasok perusahaan.

Jatmiko mencontohkan kesuksesan pembinaan UMKM pandai besi di Desa Teratak, Riau, yang kini tergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih.

Dia menegaskan, membangun ekonomi masyarakat adalah investasi untuk memperkuat korporasi. Untuk itu pihaknya memberikan modal, sertifikasi SNI, hingga akses pasar bagi para pandai besi ini. Hasilnya, mereka kini menjadi pemasok resmi alat panen yang mendukung operasi inti perusahaan.

"Ini adalah bukti nyata bagaimana kemitraan dengan petani dan UMKM menciptakan kemandirian ekonomi, sekaligus mendukung kelancaran bisnis," jelas Jatmiko.

Secara total, PTPN IV PalmCo telah membina lebih dari



FOTO: IG PTPNSULTENG
Jatmiko K Santosa

8.500 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mendapatkan pendampingan, peningkatan kapasitas (*capacity building*), serta pengembangan pasar.

Selain ekonomi, dana TJSL juga dialokasikan secara masif untuk sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai fondasi membangun SDM (Sumber Daya Manusia).

Melalui PalmCo Scholarship Program, perusahaan memberikan beasiswa penuh selama 4 tahun masa pendidikan perguruan tinggi bagi siswa berprestasi di sekitar unit usaha.

Pihaknya juga memberikan kursus gratis bagi siswa SMA di sekitar kebun, yang mana 90 persen pesertanya berhasil lulus masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Dari sisi lingkungan, PalmCo mengusung semangat Green Harmony dengan menanam lebih dari 30.000 pohon untuk penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan menyebar lebih dari 40.000 bibit ikan.

Jatmiko juga menyoroti peran perusahaan dalam tanggap darurat bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang kerap melanda wilayah Sumatera.

PTPN IV PalmCo memposisikan diri untuk hadir paling awal dalam memberikan bantuan evakuasi, posko, dan logistik dasar.

Pihaknya tidak hanya berhenti di masa tanggap darurat, melainkan juga terlibat aktif dalam pemulihan, termasuk membantu pengawasan pembangunan dan relokasi 2.000 hunian tetap bagi korban bencana.

"Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjadi agen pembangunan yang responsif," tutup Jatmiko. ■ IMA



TUTUP BTN EXPO 2026: Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu (keempat dari kiri) bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah (keempat dari kanan) berfoto bersama para pemenang BTN Housingpreneur 2025 dalam acara *Awarding BTN Housingpreneur 2025* sekaligus *Closing Ceremony BTN Expo 2026* di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (31/1/2026). BTN Expo 2026 menjadi penutup rangkaian BTN Housingpreneur 2025 dengan mencatat 1.170 submission dan melahirkan 58 inovator muda di sektor perumahan.

FOTO: DOK BTN

Miliki Ide Segar Gerakkan Ekosistem Perumahan

BTN Expo Lahirkan 58 Inovator Visioner

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk puas dengan hasil rangkaian kegiatan BTN Expo 2026. Salah satunya sukses melahirkan puluhan inovator muda sebagai penggerak baru ekosistem perumahan nasional.

DIREKTUR Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, ajang *Awarding BTN Housingpreneur 2025* bagian dari BTN Expo 2026. Ajang ini digelar di tengah kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan ekosistem pendukungnya.

Nixon menekankan, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BTN ke-76, BTN Expo 2026 tidak hanya menjadi pameran properti, tetapi berperan sebagai platform ekosistem yang menyatukan akses peluang usaha, pengembangan karier, hingga solusi finansial bagi masyarakat.

Hasil BTN Housingpreneur 2025, lanjut Nixon, sangat mengembirakan. Program ini mencatat 1.170 *submission* dan melahirkan 58 *innovator* baru yang kreatif, visioner, dan solutif di sektor perumahan.

"Ini luar biasa, artinya ada

1.170 ide yang mereka salurkan. Ini penting untuk ekosistem bisnis perumahan berkelanjutan," tutur Nixon.

Mayoritas peserta berasal dari *startup* anak muda dengan ide-ide segar, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk menjawab tantangan perumahan.

"Saya melihat banyak sekali inovasi yang dipamerkan. Yakni teknologi-teknologi penting yang akan diterapkan di sektor perumahan," ujar Nixon dalam *Awarding BTN Housingpreneur 2025* dan *Closing Ceremony* BTN Expo 2026 di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, *startup-startup* tersebut perlu diberi ruang agar inovasinya dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, sehingga mendorong efektivitas dan efisiensi dalam ekosistem perumahan.

Selain mendorong inovasi, BTN Expo 2026 menegaskan komit-

men perseroan dalam penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. Sebanyak 30 tenant UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) *fashion* dihadirkan di Bale Ayu, serta 23 *merchant* UMKM kuliner di Bale Santap.

BTN juga turut menghadirkan *Road to Indonesia Fashion Week* sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan industri kreatif nasional.

Di sisi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), BTN Expo 2026 menggelar program *BTN Hiring* untuk menjangkau talenta-talenta baru menjadi pegawai BTN.

Selain itu, hadir pula *BTN Champions Arena* by Ruang-guru sebagai bentuk investasi BTN dalam menyiapkan talenta masa depan.

"Kami percaya investasi terbaik adalah investasi pada talenta dan sumber daya manusia," ucap Nixon.

Pada sektor perumahan, BTN Expo 2026 menghadirkan mitra developer BTN, baik perumahan subsidi maupun non-subsidi.

Nixon menegaskan, BTN selektif dalam memilih developer sebagai bentuk komitmen menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

BTN Expo 2026 juga memberikan dampak sosial. Melalui partisipasi pengunjung, hingga Jumat (30/1/2026), total dana yang terkumpul mencapai Rp 43,31 juta disalurkan untuk korban bencana di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut, BTN Housingpreneur 2025 adalah wujud komitmen dalam mengembangkan ekosistem perumahan nasional melalui penjangkaran inovasi dari akar rumput.

Ini menilai, ajang ini menjadi wadah pengembangan kapasitas generasi muda untuk menjawab tantangan sektor perumahan, khususnya masih adanya ketidaksiharian antara pasokan dan kebutuhan hunian layak.

"Sejak awal, Pemerintah memiliki tekad kuat membangun

dan mengembangkan ekosistem perumahan. Bangsa ini memiliki energi besar, dan tidak ada yang dapat mengubah masa depan itu kecuali anak-anak muda," ujar Fahri.

Ini pun mendorong generasi muda Indonesia untuk berani bermimpi dan mewujudkan ide-idenya demi membawa perubahan.

"Jangan pernah takut bermimpi, karena kita hidup di negara demokrasi," tegas Fahri. Pada kesempatan yang sama, para direksi BTN bersama Wamen PKP Fahri Hamzah menyerahkan trofi dan hadiah dengan total nilai Rp 1,5 miliar kepada para juara BTN Housingpreneur 2025 kepada 58 finalis yang terdaftar dari sebanyak 1.170 *submission* sejak 22 Oktober 2025.

Selama empat hari penyelenggaraan (28-31 Januari 2026), antusiasnya masyarakat cukup tinggi dengan jumlah pengunjung mencapai 6.000 orang. Acara ini turut diarahkan musisi Tanah Air, seperti Maliq & D'Essentials dan Bunga Citra Lestari. ■ IMA

Dukung Pembiayaan Pembangunan Daerah

Askrindo Sinergi Dengan Bank Kalsel

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memperkuat perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, melalui kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel).

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Asuransi Kredit Konstruksi dan Non-Konstruksi oleh Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto dan Direktur Bisnis Bank Kalsel Akhmad Fauzi Noor di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto mengatakan, kerja sama dengan Bank Kalsel merupakan bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan, sekaligus penguatan peran Askrindo dalam mendukung pembangunan nasional daerah, khususnya Kalimantan Selatan.

Melalui kerja sama ini, pihaknya memberikan perlindungan menyeluruh atas portofolio kredit Bank Kalsel, baik pada sektor konstruksi, maupun non-konstruksi, seperti pengadaan barang dan atau jasa, guna mendukung penyaluran pembiayaan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Dengan dukungan *underwriting* dan ketentuan tarif yang kompetitif, pihaknya memastikan mitra BPD mendapatkan solusi proteksi yang optimal.

"Hal ini guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional," ujar Budhi dalam kete-



TUNJUKKAN DOKUMEN KERJA SAMA: Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto (kiri) dan Direktur Bisnis Bank Kalimantan Selatan (Kalsel), Akhmad Fauzi Noor berfoto bersama usai melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Asuransi Kredit Konstruksi dan Non-Konstruksi, di Graha Askrindo, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

rangannya, Minggu (1/2/2026). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi di Kalimantan Selatan tumbuh 7,52 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q to q *kuartal to kuartal*) pada triwulan III-2025, menjadikannya salah

satu motor pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, pada triwulan IV-2024, sektor konstruksi juga tercatat menyumbang pertumbuhan hingga 11,69 persen.

Hal ini mencerminkan kuatnya aktivitas investasi dan pem-

angunan di wilayah tersebut, terlebih dengan posisi strategisnya sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang progresnya semakin masif pada tahun ini.

Di kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bank Kalsel

Akhmad Fauzi Noor menilai, Askrindo adalah mitra strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan bisnis pembiayaan Bank Kalsel.

Alhasil, imbuh Akhmad, setiap kali kami mengembangkan produk pembiayaan, Askrindo selalu siap mendukung sejak awal.

"Sinergi ini memberi kami kepercayaan diri untuk terus menyalurkan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan," kata Akhmad.

Ini menegaskan, kerja sama ini juga menjadi tonggak penting bagi Askrindo dalam mendorong standarisasi layanan asuransi kredit bagi BPD.

Untuk itu, lewat kerja sama ini, pihaknya ingin layanan asuransi kredit Askrindo makin praktis dan mudah diakses oleh mitra perbankan.

"Kami benahi dari hulu ke hilir, mulai dari perizinan produk, struktur tarif, sampai proses klaim dan subrogasi, supaya semuanya bisa berjalan lebih simpel, transparan dan cepat merespons kebutuhan di lapangan," bebarnya.

Dengan adanya perlindungan risiko yang komprehensif dari Askrindo, serta sinergi yang kuat dengan Bank Kalsel, ia berharap, pembiayaan sektor produktif di Kalimantan Selatan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

"Tentunya, hal ini juga berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah," tutupnya. ■ IMA

Harta Karun

Maluku Ekspor Ikan Beku Capai 90 Miliar

PROVINSI Maluku mencatat ekspor ikan beku mencapai 1.137.126 kilogram (kg) dengan nilai Rp 90,56 miliar pada periode Januari hingga September 2025. Adapun jenis ikan beku diekspor tersebut didominasi oleh jenis ikan tuna dan udang vaname yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional.

Adapun negara importir produk ikan beku Maluku antara lain Vietnam, Jepang dan Amerika Serikat. ■

BI Perkuat Ketahanan Eksternal Aliran Modal Asing Ke RI Kembali Naik

TEKANAN pada aliran modal asing kembali meningkat pada pekan keempat Januari 2026, seiring naiknya persepsi risiko global yang tercermin dari kenaikan premi *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia tenor lima tahun menjadi 75,31 basis poin (bps) pada 29 Januari 2026.

Posisi premi CDS tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi 73,05 basis poin pada 23 Januari 2026.

“Kondisi tersebut beriringan dengan aksi jual bersih investor nonresiden di pasar keuangan domestik dalam periode 26–29 Januari 2026,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramadan Denny Prakoso dalam keterangan resmi BI, Minggu (1/2/2026).

CDS merupakan instrumen derivatif keuangan yang berfungsi sebagai kontrak asuransi atau proteksi terhadap risiko gagal bayar (*credit event*) atas suatu obligasi atau utang.

Ramadan menyampaikan bahwa BI terus mencermati dinamika aliran modal asing dan perkembangan pasar keuangan global secara seksama.

Menurutnya, penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait menjadi langkah utama untuk menjaga stabilitas eksternal.

“Langkah tersebut juga untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian nasio-

nal,” ujar Ramadan.

Berdasarkan data transaksi selama 26–29 Januari 2026, investor non residen tercatat melakukan jual neto sebesar Rp 12,55 triliun.

Investor non-residen (bukan penduduk) adalah individu, perusahaan, atau entitas asing yang berdomisili di luar negeri namun menanamkan modal di suatu negara (seperti Indonesia) untuk mencari keuntungan.

Aksi tersebut terutama terjadi di pasar saham dengan nilai jual neto Rp 12,40 triliun serta di pasar Surat Berharga Negara sebesar Rp 2,77 triliun, sementara pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia tercatat beli neto sebesar Rp 2,61 triliun.

“Secara kumulatif sepanjang tahun 2026 hingga 29 Januari 2026, aliran modal asing masih menunjukkan kinerja yang relatif terjaga,” ujar Ramadan.

Data settlement (proses akhir dalam transaksi keuangan atau pembayaran) mencatat non residen membukukan beli neto sebesar Rp 4,84 triliun di pasar saham dan Rp 6,18 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), meskipun masih terdapat jual neto sebesar Rp 0,10 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Dikatakan Ramadan, ke depan, BI menegaskan akan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan yang ditempuh secara terukur dan konsisten. ■ NOV



DIALOG DENGAN PELAKU PASAR MODAL: Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani (kedua kanan) didampingi Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahriir (kanan), saat berjabat tangan dengan Pejabat pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (kedua kiri) dan Anggota Dewan Komisiner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasana Fawzi (kiri) usai dialog bersama pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

ANTARA FOTO/SPRILLA DWI ADHA/AGR

Cegah Harga Pangan Bergejolak

Pemerintah Perkuat Sinergi Jelang Imlek & Bulan Puasa

Pemerintah Pusat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah di dalam mencegah harga pangan bergejolak menjelang perayaan Imlek, bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Upaya itu ditargetkan dapat mengedalikan inflasi pada momen tersebut.

PENTINGNYA koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Imlek disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP).

Rapat tersebut digelar sebagai upaya pemantapan kesiapan menjelang HBKN sekaligus bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian Asta Cita.

Airlangga mengatakan, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat sinergi dan koordinasi guna menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada 2026.

Menurutnya, pengendalian inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) menjadi fokus utama, terutama pada komoditas bahan makanan pokok.

“Terkait *volatile food*, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (31/1/2026).

Ia menyebut, Pemerintah juga mendorong agar koordinasi antara pusat dan daerah terus dijaga, khususnya dalam pengadaan pasokan pangan antar waktu dan antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan pembiayaan. Serta peningkatan kelancaran logistik untuk sejumlah komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan terutama beras.

“Pemerintah menekankan pentingnya penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam menjaga pasokan serta kelancaran distribusi pangan agar



Airlangga Hartarto

tekanan harga dapat ditekan lebih dini,” ujarnya. Selain pasokan pangan, Pemerintah dan BI turut memperkuat koordinasi kebijakan harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*).

Penetapan kebijakan tersebut akan mempertimbangkan waktu penerapan, tahapan, serta besaran penyesuaian agar tidak menekan daya beli masyarakat. Koordinasi komunikasi kebijakan juga terus diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi

publik tetap terkendali.

Airlangga menjelaskan, inflasi pada kuartal I-2026 berpotensi menghadapi tekanan dari berbagai faktor, mulai dari ketidakpastian global yang memicu *imported inflation*, faktor iklim dan cuaca, hingga pola musiman selama HBKN seperti Ramadan dan Idul Fitri.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus untuk meredakan dampak tersebut, antara lain diskon tarif transportasi dan tarif tol, serta bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil 1 hingga 4 pada Februari dan Maret 2026.

Airlangga menambahkan, dukungan infrastruktur dan logistik juga difokuskan pada daerah terdampak bencana agar distribusi pangan tetap lancar dan tekanan inflasi dapat ditekan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan Pemerintah terus mendorong dukungan infrastruktur dan logistik di daerah bencana.

Ia menyebutkan, tekanan inflasi di sejumlah wilayah tersebut mulai menunjukkan tren penurunan. “Menjelang Hari Raya Leba-

ran, sejumlah program telah dipersiapkan, termasuk diskon transportasi, baik pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, maupun jalan tol. Demikian pula bantuan sosial, baik berupa beras maupun minyak goreng, sedang kami siapkan,” ujarnya.

Upaya pengendalian inflasi turut diperkuat melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera sebagai pengembangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dia memastikan, Pemerintah fokus mengendalikan harga komoditas pangan sebagai langkah utama menjaga stabilitas inflasi nasional agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.

Menurutnya, inflasi sejauh ini masih relatif terkendali berkat koordinasi rutin antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Meski demikian, Pemerintah tetap menaruh perhatian besar pada arah pergerakan inflasi, terutama pada komoditas yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. ■ DIR

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
Jl. R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara 14350
Website: www.pn-jakarta utara.go.id, Email: pengadilannegerijakarta utara@gmail.com

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI
Nomor 15/Eks.SHT/2023/PN Jkt.Utr

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 15/Eks.SHT/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 16 Agustus 2023, saya: **H. Edy Rahmansyah, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memberitahukan dengan resmi pelaksanaan lelang eksekusi dalam perkara antara: **PT. Bank Pan Indonesia, Tbk** atau disingkat **PT. Bank Pan Tbk** Lawan **PT. Berkah Sentosa Garmino** dan **Nyonya Ngui Fui Sian**, dengan objek sebagai berikut:

- 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5494/Kamal Muara tanggal 12 Juni 2007, luas 792 M², tercatat atas nama Nyonya (Janda) Ngui Fui Sian, Surat Ukur Nomor: 06736/Kamal Muara/2007, tanggal 4 Mei 2007, terletak di Jalan Ebony Golf VII No. 33, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Sertifikat Hak Milik No. 5495/Kamal Muara, tanggal 12 Juni 2002, luas 887 m², tercatat atas nama Nyonya (Janda) Ngui Fui Sian, Surat Ukur Nomor: 06737/Kamal Muara/2007, tanggal 4 Mei 2007, terletak dan dikenal umum di Jalan Ebony Golf VII No. 31, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi satu kesatuan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanen bertingkat 3 terdiri dari dinding tembok, lantai granit, atap dak cor;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Depan/Timur : Jl. Ebony Golf VII;
- Sebelah Belakang/Barat : Danau Ebony; dan
- Sebelah Kanan/Selatan : Rumah No. 31 A;
- Sebelah Kiri/Utara : Fasilitas umum Jl. Ebony;

Nilai Limit : Rp. 80.172.000.000,00
Uang Jaminan : Rp. 24.051.600.000,00

Pelaksanaan Lelang :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 04 Maret 2026
- Jenis Penawaran : terbuka (*open bidding*)
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 04 Maret 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II, Jalan Prjuri KKO Usman dan Harun No. 10, Senen, Jakarta Pusat
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat dan Ketentuan Eksekusi Lelang sebagai berikut :

- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada website: www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri (uang jaminan dikembalikan ke nomor tersebut jika peserta tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang);
- Setiap peserta lelang diwajibkan menyertakan uang jaminan ke nomor Virtual Account (VA) dengan ketentuan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya dan bea lelang pembeli 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya;
- Objek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (*as is*);
- Bagi peminat lelang apabila hendak melihat objek lelang dipersilahkan untuk melihat langsung ke lokasi dan jika perlu dapat menanyakan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Jakarta, 2 Februari 2026
Panitera
T.T.D
H. Edy Rahmansyah, S.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS
Jl. R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara 14350
Website: www.pn-jakarta utara.go.id, Email: pengadilannegerijakarta utara@gmail.com

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor : 798/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr

Pada hari ini **Senin**, tanggal **02 Februari 2026**, saya Sartono, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Hakim/Panitera Pengadilan Negeri tersebut, untuk melaksanakan pekerjaan ini:

MEMANGGIL SECARA SAH DAN RESMI KEPADA:

JENNY ANISYAH PUTRI, yang dahulu diketahui beralamat di Jl. Lodan Raya KP Bandan No. 47 A, RT/RW 008/002, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, **Namun sekarang tidak diketahui alamatnya**. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Supaya ia datang menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus, Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Ancol Selatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, pada:

Hari : **RABU**
Tanggal : **04 MARET 2026**
Pukul : **10:00 WIB**

Dalam perkara perdata gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27-11-2025, register Nomor : 798/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr, antara:

PT HARDCORINDO SEMESTA JAYA, sebagai.....**PENGUGUAT;**
Melawan
JENNY ANISYAH PUTRI, sebagai.....**TERGUGAT;**

Demikianlah relas panggilan sidang ini saya laksanakan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka, dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon supaya memberitahukan kepada yang bersangkutan tersebut;

yang memanggil,
Jurusita Pengganti tersebut
ttd.
SARTONO
Nip. 197506172014081001

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS
Jl. R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara 14350
Website: www.pn-jakarta utara.go.id, Email: pengadilannegerijakarta utara@gmail.com

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor : 824/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr

Pada hari ini **Senin**, tanggal **02 Februari 2026**, saya Sartono, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Hakim/Panitera Pengadilan Negeri tersebut, untuk melaksanakan pekerjaan ini:

MEMANGGIL SECARA SAH DAN RESMI KEPADA:

Sdr. WIBISONO, dahulu tercatat beralamat di Jalan Petogogan II No.57 RT.01/RW.07, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya**. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Supaya ia datang menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus, Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Ancol Selatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, pada:

Hari : **SENIN**
Tanggal : **02 MARET 2026**
Pukul : **10:00 WIB**

Dalam perkara perdata gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08-12-2025, register Nomor : 824/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr, antara:

Sdr. YOHANES SETIAWAN, DKK, sebagai.....**PARA PENGUGUAT;**
Sdr. WIBISONO, sebagai.....Melawan.....**TERGUGAT;**
Dan
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN/BPN KOTAMADYA JAKARTA UTARA, DKK, sebagai.....**PARA TURUT TERGUGAT;**

Demikianlah relas panggilan sidang ini saya laksanakan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka, dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon supaya memberitahukan kepada yang bersangkutan tersebut;

yang memanggil,
Jurusita Pengganti tersebut
ttd.
SARTONO
Nip. 197506172014081001

Subscribe & Dengarkan Obrolan Santai Kami Bersama Narasumber Hebat di Spotify RM.id

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Taman Permata Buana Jakarta Barat, Telp.021-582588-89

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang)
Nomor : 3/D/304-09.03/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, (Tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis dan No. Hak	- Surat Ukur - Tanggal - Luas	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan	KETERANGAN
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Yaya Indriyati	Hak Guna Bangunan No.1555/Keagungan	-00570/Keagungan/2018 -26-12-2018 -8 M ²	Yaya Indriyati	26-12-2018	a. Kembangan II RT.12 RW.06 b. Kelurahan c. Kecamatan Tamansari	- Asli Dokumen sebagaimana dimaksud kolom 3 TELAH HILANG sesuai Surat Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Barat Nomor : Sket/72/VII/2025/Sat Reskrim/Restro JB Tanggal 17 Juli 2025.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini dibuat dalam Surat Kabar, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum, dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Jakarta, 19 Januari 2026
A.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ttd
DRS. BAMBANG PAMUNGKAS, A.Ptnh., M.H
NIP. 19681209 198803 1 001

Nomor Berkas : 85201/2025
Nama Pemohon : Yaya Indriyati
DI 301 : 42295/2025

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA
Jalan Raya Tj. Barat No. 1, RW. 1 Tj. Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Telp. (021) 7884 786, Email : kot-jakarta@atbpn.go.id

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 12 / 2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nama/Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak	NIB	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah : a. Jalan b. Desa/Kel. c. kec.	Keterangan
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Achmad Syarif selaku kuasa dan Young Ik Chang qq. PT. Jever Trading, berkedudukan di Jakarta Selatan	Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun NIB.09.02.000021090.3 Kelurahan Pela Mampang	09.02.00002 1090.3	PT. Jever Trading, berkedudukan di Jakarta Selatan	05 Februari 2025	a. Gedung Rusun Hunian Kondominium Kintamani Jl. Pela Mampang RT.006 Rw.08 Lantai 15-D/15/6 Blok D b. Pela Mampang c. Mampang Prapatan	- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kapotes Metro Jaksel Kant III S P K T No. P o l i : 4573/B/K/2025/Res Jaksel tanggal 2 Oktober 2025. - Surat Pengantar Laporan Kehilangan dari Kapotes Metro Jakarta Selatan polida Metro Jaya Nomor: B/2098/X/RES.1.2/2025 tanggal 30 November 2025.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum, dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Jakarta, 26 Januari 2026
a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ttd
Marcellinus Wiendarto, S.H., M.H.
NIP. 19860426 2011011008

Nomor Berkas : 87743/2025
Nama Pemohon : PT. Jever Trading, berkedudukan di Jakarta Selatan
DI 301 : 37329/2025

Curhat Nyok...

Emak-emak Tidak Setuju Sering PJJ

SELAMAT pagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Izin menyampaikan unek-unek sebagai emak-emak yang anaknya masih sekolah dan sering kena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Terus terang, anak-anak Jakarta nggak usah terlalu dimanja dengan PJJ. Biarkan mereka tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan. Hujannya juga bukan hujan badai, cuma hujan biasa.

Masa hujan sedikit langsung PJJ? Coba lihat anak-anak di pelosok daerah, Pak. Mereka harus menyeberangi sungai karena nggak ada jembatan, naik turun bukit, jalan kaki jauh, tapi tetap semangat sekolah. Lah kita di Jakarta, fasilitas lengkap, sekolah dekat rumah, kok malah sedikit-sedikit PJJ.

PJJ itu seharusnya nggak dipukul rata. Silakan PJJ khusus untuk anak-anak yang rumahnya terdampak banjir, atau akses jalannya benar-benar terputus. Tapi kalau cuma hujan biasa dan jalur aman, ya tetap sekolah dong. Apalagi anak kelas 6, 9, dan 12 yang sebentar lagi mau ujian. Persiapan penting malah dihabiskan dengan PJJ yang seringkali tidak efektif.

Tolong Pak, PJJ jangan dijadikan solusi instan setiap hujan. Harapan kami sederhana: sekolah tetap jalan normal, PJJ dipakai khusus kondisi darurat, bukan kebiasaan. Terima kasih Pak, sudah mau mendengar curhatan emak-emak.

IG: @fajaranidiah



KERAHKAN ALAT BERAT KERUK KALI: Petugas kebersihan sedang mengeruk lumpur menggunakan alat berat di Kali Cideng, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2026). Pengerukan lumpur dan sampah di Kali Cideng segmen Kuningan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pendangkalan sehingga kali optimal menampung air hujan.

FOTO: TEDY KROEN/RAKYAT MERDEKA/RM.ID

WA Aje...

Banjir Di Kramat Jati Kapan Tertangani?

KEPADA Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Ayo dong tangani banjir di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari tahun 80-an sampai sekarang rasanya nggak pernah berubah. Bahkan sejak akhir tahun 2000-an, air dari Kali HEK sudah sering meluap sampai ke jalan raya.

Sampai sekarang kondisi masih seperti itu, seolah-olah wilayah Kramat Jati nggak pernah benar-benar dilihat dan diprioritaskan. Di bantaran kali juga masih banyak bangunan liar. Mohon Pak, sudah waktunya penertiban bangunan dan pelebaran sungai, supaya masalah banjir ini nggak terus berulang setiap tahun.

085672394XXX

Untuk Dinas Bina Marga DKI Jakarta, mohon perbaikan jalan berlubang dengan serius. Malam Senin kemarin, saya jatuh karena terperosok lubang, di wilayah Gading Nias, Pengangaan, Jakarta Utara. Handphone (HP) saya sampai jatuh dari holder dan masuk ke lubang yang tergenang air.

Kondisi jalan gelap, penerangan minim, jadi lubangnya sama sekali tidak terlihat. Mohon atensinya, sebelum makin banyak korban lain.

081330587XXX

Assalamualaikum Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Mohon tertibkan pedagang yang berjalan menggunakan mobil di Rawa Cipondoh arah Sipon.

Mobil menutup totoo dan membuat jalan jadi sempit serta semrawut. Selain menyulitkan pejalan kaki, keberadaan mobil mereka kerap menyebabkan kemacetan.

087876943XXX

Halo Wali Kota Depok, di Sekolah Baktijaya 4, Depok Timur, jalan di depannya sangat ramai kendaraan lalu lintas. Tolong buat Zona Selamat Sekolah (ZOSS), karena sangat rawan dan membahayakan keselamatan anak-anak, saat jam masuk dan pulang sekolah.

081184158XXX

Pembaca diundang menyampaikan informasi, keluhan dan komentar tentang kepentingan umum ke email: rakyatmerdeka12@gmail.com dan WA ke nomor: 085770411900

Cegah Banjir Terus Berulang Setiap Tahun

Amdal & Tata Ruang DKI Saatnya Dibenhahi Serius

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong membenahi dengan serius Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tata ruang. Sebab, buruknya pengelolaan dua hal tersebut disinyalir penyebab utama banjir terus berulang di Ibu Kota setiap tahun.

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Lukmanul Hakim menilai, AMDAL dan tata ruang yang semrawut, merupakan salah satu biang kerok banjir di Jakarta.

"Banjir yang terus berulang di Jakarta, perlu juga dilihat dari perspektif kesalahan AMDAL dan tata ruang," tandasnya, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Langkah konkretnya, menurut Lukmanul, penerbitan AMDAL dan tata ruang terkait pembangunan gedung-gedung atau hunian bertingkat, ke depannya harus lebih teliti.

Karena, menurutnya, pembangunan hunian bertingkat di Jakarta, tidak diimbangi dengan pembangunan drainase yang laik. Sehingga, air meluber ke jalan dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah.

"Setiap tahun dan setiap perio-

de, persoalannya adalah banjir dan macet. Itu karena ruwetnya tata ruang dan AMDAL, sehingga banjir dan macet belum terselesaikan," katanya.

Untuk itu, Lukmanul mengesankan bahwa Pemprov DKI sebaiknya menangani banjir dengan sudut pandang pencegahan, berupa AMDAL dan penataan ruang yang lebih teliti. "Supaya, penyelesaiannya lebih efektif dan efisien," tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tata ruang di Jakarta sudah sangat sulit diubah. "Jangan sampai dalam tata ruang yang sudah padat ini, masyarakat masih membuang sampah sembarangan," katanya, saat meninjau pengerukan Kali Sepak, di Kembangan, Jakarta Barat, Senin (26/1/2026).

Pram mengingatkan, kebiasaan



Macet parah di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kamis (22/1/2026), terjadi karena banjir.

membuang sampah sembarangan, mengganggu fungsi infrastruktur pengendalian banjir. "Akan mengganggu Cengkareng Drain dan pintu-pintu air yang selama ini kita kelola," tandasnya.

Pram menyampaikan hal tersebut, setelah melihat tumpukan sampah di sekitar permukiman warga yang terdampak banjir di Jakarta Barat.

Sebelumnya, di Balai Kota Jakarta, Pram juga menyoroti faktor yang memperparah banjir

selain cuaca ekstrem, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan mendirikan bangunan di bantaran sungai. "Orang masih buang sampah sembarangan, masih membangun di atas bantaran sungai, itu yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi," tegas mantan anggota DPR ini.

Pram menjelaskan, banjir yang terjadi di Jakarta juga dipicu curah hujan ekstrem. Misalnya pada 18 Januari 2026, intensitas

hujan 267 milimeter per hari.

OMC Boros Anggaran
Menurut Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim, Pemprov DKI menganggarkan uang untuk penanganan banjir terlalu banyak, tapi penyelesaiannya tidak tuntas.

Lukmanul juga mengkritisi langkah Pemprov DKI dalam penanganan banjir dengan sering melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Menurut dia, OMC menghambur-hamburkan uang, karena bukan solusi mengatasi banjir. "Itu buang-buang duit saja," ucapnya.

Apalagi, kata Lukmanul, biaya untuk OMC tidak sedikit. Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lanjut Lukmanul, sekali OMC biayanya Rp 300 juta.

Karena itulah, ke depannya, Lukmanul menyarankan agar Pemprov DKI tidak terlalu banyak melakukan OMC.

Anggaran untuk OMC, sarannya, bisa digunakan untuk langkah pencegahan banjir. ■ DRS/RAA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGUN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA
Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Ciuming Sahan Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp. 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn-jakarta.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor 68/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada hari ini **SENIN**, Tanggal **02 FEBRUARI 2026**, Saya:

"M. RICKY ROMADHONA"

Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai JURUSITA PENGANTAI, guna memanggil dengan resmi kepada:

PT Binakarya Bangun Propertindo, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dahulu beralamat dan berkedudukan di Jalan Muara Baru RT.005/RW.003, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara namun saat Pemohonan Pembatalan ini diajukan Terhohon Pembatalan tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut Sebagai **"Terhohon Pembatalan"**.

Supaya ia/mereka datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat, nanti pada:

HARI SENIN TANGGAL 2 MARET 2026, JAM: 10.00 WIB

Perluinya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara yang terdapat di Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Nomor 68/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.**, dalam perkara antara:

Jonie Harto Tang, sebagai Terhadap: Pemohon;
PT Binakarya Bangun Propertindo, sebagai Terhohon;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa ia / mereka dapat mengambil tunjangan Pemohonan dari Pemohon di Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas pemohonan tersebut ia/mereka dapat mengajukan jawaban secara lisan / tertulis yang dilanda-tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan/diserahkan pada persidangan tersebut diatas;

Demikian atas Perintah tersebut diatas, Panggilan sidang ini saya jalankan melalui iklan.

Jurusita Pengganti,
Ttd.
M. RICKY ROMADHONA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR
Jalan Pengadilan Nomor 10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121 Website: www.pn-bogor.go.id, Email: surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Bgr

Pada hari **Senin**, tanggal **02 Februari 2026**, Saya **Eko Mardiyanto** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

Sdr. Ali Achmad/Ahli Waris, Sekarang Tidak Diketahui alamat dan Keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Turut Terugut II**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari : Rabu;
Tanggal : 04 Maret 2026;
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Tn. Hartono Yarmanto Dkk Sebagai Penggugat;
Lawan
PT. Graha Agung Wibawa/mall Plaza Jambu Dua Sebagai Terugut;
PT. Alma Murni Dkk Sebagai Turut Terugut;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran.

Demikian relas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R.;

Jurusita Pengganti,
Ttd
Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR
Jalan Pengadilan Nomor 10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121 Website: www.pn-bogor.go.id, Email: surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Bgr

Pada hari **Senin**, tanggal **02 Februari 2026**, Saya **Eko Mardiyanto** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

Sdr. Ade Hasan/Ahli Waris, Sekarang Tidak Diketahui alamat dan Keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terugut II**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari : Rabu;
Tanggal : 04 Maret 2026;
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Tn. Hartono Yarmanto Dkk Sebagai Penggugat;
Lawan
PT. Graha Agung Wibawa/mall Plaza Jambu Dua Sebagai Terugut;
PT. Alma Murni Dkk Sebagai Turut Terugut;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran.

Demikian relas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R.;

Jurusita Pengganti,
Ttd
Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR
Jalan Pengadilan Nomor 10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121 Website: www.pn-bogor.go.id, Email: surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Bgr

Pada hari **Senin**, tanggal **02 Februari 2026**, Saya **Eko Mardiyanto** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

Mas Djaja Djapa, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Suryakencana No.142, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Terugut**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari : Rabu;
Tanggal : 25 Februari 2026;
Pukul : 13.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Ny. Mujiati Sebagai Penggugat;
Lawan
Mas Djaja Djapa Sebagai Terugut;
Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor Sebagai Turut Terugut;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran.

Demikian relas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R.;

Jurusita Pengganti,
Ttd
Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR
Jalan Pengadilan Nomor 10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121 Website: www.pn-bogor.go.id, Email: surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 9/Pdt.G/2026/PN Bgr

Pada hari **Senin**, tanggal **02 Februari 2026**, Saya **Eko Mardiyanto** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

Mas Djaja Djapa, dahulu bertempat tinggal di Jalan Suryakencana No.142, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Terugut**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari : Rabu;
Tanggal : 25 Februari 2026;
Pukul : 13.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Ny. Mujiati Sebagai Penggugat;
Lawan
Mas Djaja Djapa Sebagai Terugut;
Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor Sebagai Turut Terugut;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran.

Demikian relas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R.;

Jurusita Pengganti,
Ttd
Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BOGOR
Jalan Pengadilan Nomor 10, RT.03/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16121 Website: www.pn-bogor.go.id, Email: surat@pn-bogor.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM
Perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Bgr

Pada hari **Senin**, tanggal **02 Februari 2026**, Saya **Eko Mardiyanto** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ditunjuk melaksanakan pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL

PT. Alma Murni, dahulu bertempat/kedudukan di Jalan Veteran No. 1 Jakarta Pusat, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Turut Terugut I**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Pengadilan No.10 Bogor;
Hari : Rabu;
Tanggal : 04 Maret 2026;
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Tn. Hartono Yarmanto Dkk Sebagai Penggugat;
Lawan
PT. Graha Agung Wibawa/mall Plaza Jambu Dua Sebagai Terugut;
PT. Alma Murni Dkk Sebagai Turut Terugut;

Panggilan ini secara umum ini saya jalankan melalui Iklan Media Massa/Koran.

Demikian relas panggilan sidang secara umum ini dibuat untuk diketahui oleh khalayak umum, Panggilan sidang ini berdasarkan Pasal 390 H.I.R.;

Jurusita Pengganti,
Ttd
Eko Mardiyanto
Nip.198703192006041003

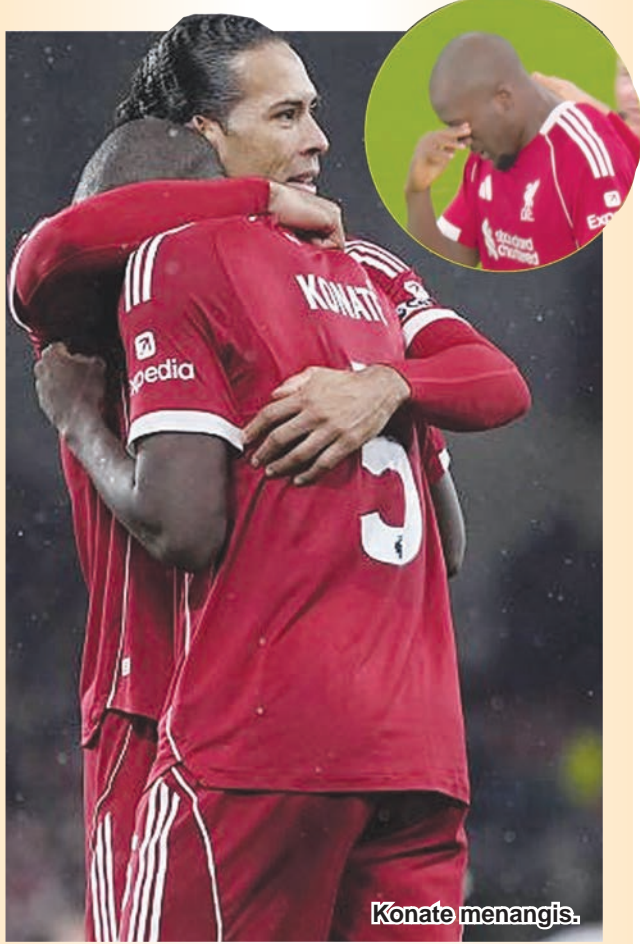
Saksikan Video Wawancara
Kami Bersama Narasumber Hebat.
Hanya di Kanal Youtube
Rakyat Merdeka TV

Like Comment Share

SUBSCRIBE

REUTERS

Turun Minum



Konate menangis.

Konate Nangis Usai Ngegolin

IBRAHIMA Konate ikut menyumbangkan gol kemenangan Liverpool atas Newcastle United. Sang bek merayakan gol dengan berlari ke tiang pojok. Pemain berusia 26 tahun ini kemudian menangis, sebelum dipeluk rekan-rekan setimnya, termasuk kiper Alisson Becker yang berlari dari gawangnya. Konate menangis karena laga ini merupakan yang pertama dimainkannya sejak pertama dimainkannya sejak kematian ayahnya, Hamady. Dia sebelumnya absen dalam 3 laga karena kabar duka kematian ayahnya. "Saya tidak punya kata-kata untuk menggambar-

kannya. Ini adalah momen yang sangat sulit bagi saya dan keluarga, tapi ini bagian dari kehidupan," kata Konate. "Manajer bilang ke saya untuk tak perlu terburu-buru kembali, tapi penting bagi saya untuk membantu tim," ujarnya. Ini menjadi gol pertama Konate di Liga Inggris musim ini. Eks bek RB Leipzig itu total punya koleksi 7 gol dan 4 assist dalam 163 laga buat Liverpool, dengan gol ke gawang Newcastle jadi yang pertama dibuatnya dengan kaki, sisanya melalui tandukan kepala. ■ JON

Barca Nyaman Di Top Klasemen

BARCELONA kembali menunjukkan mental juara setelah menang 3-1 atas Elche pada lanjutan LaLiga. El Barca pun masih nyaman di puncak klasemen sementara. Sejatinnya, tuan rumah Elche sempat memberikan perlawanan sengit dan bahkan unggul lebih dulu lewat gol A Rodríguez pada menit ke-29. Namun, respons cepat ditunjukkan pasukan Hansi Flick. Lamine Yamal tampil sebagai pembeda dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-36. Domi-

nasi Barca semakin terlihat menjelang akhir babak pertama. Ferran Torres mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-40. Memasuki babak kedua, Barca semakin agresif. Penguasaan bola mencapai 61 persen menjadi bukti betapa *Blaugrana* mendominasi jalannya pertandingan. Elche kesulitan keluar dari tekanan dan lebih banyak bertahan di area sendiri. Gol penutup Barca lahir pada menit ke-72 melalui pemain pinjaman, Marcus Rashford. ■ JON



Gol menit akhir Enzo Fernandez membawa Chelsea menang 3-2 atas West Ham.

Chelsea Merangsek Naik

Tertinggal dua gol, Chelsea *comeback* atas West Ham dengan gol Enzo Fernandez di menit akhir. *London Derby* pun diwarnai keributan antar pemain dan kartu merah.

CHELSEA sedang *on fire* di tangan manajer anyar Liam Rosenior. Teranyar, mereka bangkit mengalahkan West Ham United 3-2 lewat gol menit terakhir kapten Enzo Fernandez, dalam lanjutan Liga Inggris. Kemenangan dramatis dalam *London Derby*

yang diakhiri dengan keributan pemain di Stadion Stamford Bridge itu membawa Chelsea kembali ke empat besar. Mulanya, tertinggal lebih dulu menjadikan Rosenior dicemooh supporter. Ya, eks pelatih Strasbourg itu berjudi merombak

squad dan tidak memainkan tujuh pemain saat mengalahkan Napoli 3-2 di Liga Champions. Dia memberi kesempatan kepada Liam Delap yang baru pulih dari cedera sebagai *starter*. Demikian pula Jamie Gittens dan Alejandro Garnacho. Formasi berbeda bikin permainan *The Blues* tak lagi rapi dan solid. Situasi itu dimanfaatkan West Ham yang langsung menghantam tuan rumah dengan dua gol berturut-turut.

Menyikapi tantangan itu, Rosenior merombak pemainnya sebelum *restart* dan menurunkan para pemain senior. Chelsea pun mampu *comeback* dengan kemenangan 3-2. Gol-gol itu dicetak oleh Pedro, Cucurella, dan Fernandez. Sebelum laga usai, pemain dari kedua tim terlibat keributan. Insiden itu terjadi saat West Ham mendapat sepak pojok. Saat terjadi kemelut, Pedro dan Adama Traore bersenggolan

dan jatuh. Keduanya kemudian bersitegang. Namun pemain West Ham, Jean-Clair Todibo melakukan tindakan tidak sportif dengan menecik leher Pedro. Akibatnya, wasit Anthony Taylor memberikan kartu merah kepada Todibo. Kemenangan atas West Ham membawa Chelsea merangsek kembali ke zona Liga Champions. Sementara ini menduduki peringkat empat bermodalkan 40 poin. ■ JON



Hajar Leeds, Arsenal Ingatkan Para Pesaing

ARSENAL merespons tekanan dengan caranya sendiri. Kekalahan 2-3 dari Manchester United pekan lalu sempat memicu perdebatan apakah *The Gunners* perlu mengubah pendekatan demi menjaga peluang juara. Namun saat bertandang ke Leeds United, Arsenal tetap setia dengan identitas permainan yang dibangun Mikel Arteta. Mereka pun menghajar Leeds 4-0. Hasil itu bukan sekadar tiga poin, namun isyarat kepada para pesaing. Perubahan sempat terlihat

dari keputusan mencadangkan kapten Martin Odegaard saat melawan Leeds. Namun di atas lapangan, Arsenal justru tampil sangat khas dengan gaya Arteta yang terstruktur dan efisien. Empat gol lahir dari situasi bola mati, penyelesaian jarak dekat, hingga kontribusi pemain pengganti. Kemenangan ini memperlebar kembali jarak Arsenal di puncak klasemen. Permainan Arsenal mungkin tidak selalu atraktif, tapi efektif. Mereka merendam atmosfer

Elland Road dengan kontrol sempurna. Arteta menegaskan kepuasannya terhadap sikap tim. "Mentalitasnya bagus. Kami selalu yakin," kata Arteta. Leeds hanya mampu melepaskan tiga tembakan sepanjang laga. Ketangguhan defensif ini kembali menjadi fondasi Arsenal dalam menjaga posisi teratas klasemen. "Anda harus mengekskusi aksi-aksi dengan sangat konsisten, jika tidak ingin kebobolan. Sangat mengesankan," tutup Arteta. ■ JON

Conte Semprot Klubnya Sendiri

NAPOLI kembali meraih kemenangan penting di Serie A usai menaklukkan Fiorentina dengan skor 2-1 di Stadio Diego Armando Maradona. Namun, kemenangan ini harus dibayar mahal dengan cederanya Giovanni Di Lorenzo. Pelatih Antonio Conte mengungkapkan sang kapten bisa mengakhiri musim lebih cepat. Di tengah jadwal padat yang dihadapi Napoli, Conte meluapkan kekesalannya kepada manajemen klub dan UEFA.



Conte peluk penentu kemenangan atas Fiorentina, Miguel Gutierrez.

"Kami membutuhkan skuad yang lebih besar, kalau tidak ini sama saja dengan bunuh diri," tegas Conte. Napoli sendiri baru saja mengalami kekalahan beruntun dari Juventus dan Chelsea, yang menggugurkan harapan di Liga Champions. Cedera Di Lorenzo menambah daftar panjang pemain yang absen untuk Napoli, termasuk Milinkovic-Savic, David Neres, dan Kevin De Bruyne. Conte pun mengkritik kebijakan yang membatasi jumlah pemain

dalam skuad, yang menurutnya membebani pemain dengan jadwal yang terlalu padat. "Bermula dalam 60 pertandingan per tahun tanpa skuad besar, itu bunuh diri," ujarnya lagi. Conte juga muak terhadap tekanan finansial yang dihadapi klub-klub untuk berkompetisi di berbagai turnamen demi keuntungan finansial. "Ini seperti anjing mengejar ekornya sendiri," semprot Conte. ■ JON

Liverpool Mengakhiri Dahaga Kemenangan

LIVERPOOL mengakhiri dahaga kemenangan di liga sejak awal 2026. *The Reds* memukul balik Newcastle United yang datang ke Anfield. Tertinggal lebih dulu akibat gol Anthony Gordon pada menit ke-36, Liverpool merespons dengan empat gol. Hugo Ekitike mencetak *brace* di penghujung babak pertama, lalu Florian Wirtz dan Ibrahim Konate menambah di babak

kedua. Liverpool tampil relatif mengontrol, terlepas saat start agresif dari Newcastle dan gol pertamanya. Manajer Liverpool Arne Slot antusias melihat timnya bisa menahan tekanan Newcastle dari *set-piece* khususnya di awal. *Whoscored* mencatat tuan rumah memenangi 68 persen duel udara, yang sedikit memberikan gambaran bagaimana mereka mengatasi

bola-bola udara lawan. Meski kecolongan satu gol, tapi secara umum Liverpool patut bangga dengan pertahanan mereka yang mulai lebih solid. Dalam dua laga terakhir, sang juara bertahan Liga Inggris itu mencetak 10 gol dan hanya memasukkan satu kali. Kemenangan ini mengakhiri rentetan lima laga tanpa kemenangan Liverpool di liga. ■ JON



Arne Slot memberikan komentar usai Liverpool mengalahkan Newcastle United pada Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Anfield, Minggu (1/2/2026).

PENGUMUMAN TENDER / SELEKSI
PNM
Pemerintah Nasional Mandiri
Panitia Pemilihan PT PNM akan melaksanakan Tender Umum secara elektronik untuk Paket Pekerjaan sebagai berikut:
Nama Pekerjaan : Pengadaan Penyeragaman Hardware Storage Capacity di Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Seluruh Aktivitas Pengadaan Penyeragaman Hardware Storage Capacity di Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
Komoditi/Klasifikasi : 4320
Masa Pendaftaran : 02 Februari 2026 s/d 06 Februari 2026 s/d pukul 17:00 WIB
Pembelian Penjelasan (Aanwijzing) Hari/Tanggal : Senin, 09 Februari 2026 Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai
Persyaratan Peserta: Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia dengan kualifikasi usaha Kecil, Menengah dan Besar, terregistrasi pada Aplikasi eProc PT PNM dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui pendaftaran.com (helpdesk : 082-9890-6093).
Hotline mengenai kendala pendaftaran dibuka pada tanggal 02 Februari - 04 Februari 2026, dengan mengirimkan email ke panitia.tender2@pnm.co.id cc div.ppi.pnm@gmail.com.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Jakarta, 02 Februari 2026
Ttd
Panitia Pemilihan

PENGUMUMAN TENDER / SELEKSI
PNM
Pemerintah Nasional Mandiri
Panitia Pemilihan PT PNM akan melaksanakan Tender Umum secara elektronik untuk Paket Pekerjaan sebagai berikut:
Nama Pekerjaan : Pengadaan Penyeragaman Hardware Storage Capacity di Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Seluruh Aktivitas Pengadaan Penyeragaman Hardware Storage Capacity di Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
Komoditi/Klasifikasi : 4320
Masa Pendaftaran : 02 Februari 2026 s/d 06 Februari 2026 s/d pukul 17:00 WIB
Pembelian Penjelasan (Aanwijzing) Hari/Tanggal : Senin, 09 Februari 2026 Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Persyaratan Peserta: Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia dengan kualifikasi usaha Kecil, Menengah dan Besar, terregistrasi pada Aplikasi eProc PT PNM dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui pendaftaran.com (helpdesk : 082-9890-6093).
Hotline mengenai kendala pendaftaran dibuka pada tanggal 02 Februari - 04 Februari 2026, dengan mengirimkan email ke panitia.tender2@pnm.co.id cc div.ppi.pnm@gmail.com.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Jakarta, 02 Februari 2026
Ttd
Panitia Pemilihan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur
PENGUMUMAN
Nomor : 20/Peng-31.75.100.UP.02/I/2026
Berkaitan dengan Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut dibawah ini, terhitung mulai diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari sebelum diproses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No	NAMA PEMOHON	PETA BIDANG TANAH	LETAK TANAH	KETERANGAN
1	ANDRE PRAMANA	Tgl.24-11-2025 No. 1302/2025 NIB.09040204.22323 Luas : 135 M ²	Jalan Lembang Nyur I Blok LS/18 Rt.004 Rw.09 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawi Kota Administrasi Jakarta Timur	Berdasarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang-Surat-urat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Timur Nomor: SK/TKL/1479/XII/2025/SPKT/RESTRO JAKTIM/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Desember 2025 telah dilaporkan kehilangan/kerusakan barang/surat-surat penting sebagai berikut : - Kartu Izin Tanah tanggal 03 Oktober 1981, No. 3461/Kpk/Peg/Ptb/XX/1981. - Surat Perjanjian Dibawah tanggal 12 November 1977.

Jakarta, 09 Januari 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha
Ttd.
Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 197804142006041003

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur
PENGUMUMAN
Nomor : 277/Peng-31.75.100.UP.02/XI/2025
Berkaitan dengan Permohonan Hak Atas Tanah/Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah seperti tersebut dibawah ini, terhitung mulai diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari sebelum diproses lebih lanjut, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No	NAMA PEMOHON	PETA BIDANG TANAH	LETAK TANAH	KETERANGAN
1	ADITYA SUPARDI	Tgl.01-10-2025 No. 1319/2025 NIB.09040502.09139 Luas : 121 M ²	Jalan Kolonel Sutomo Gg H. Niur RT.006 RW.008 Cawang III Kelurahan Kebong Paksi Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur	Berdasarkan Surat Tanda Laporan Kerusakan/Kehilangan Surat-Surat/Barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Timur Nomor SK/TKL/9273/XI/2024/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA tanggal 29 Nopember 2024 telah dilaporkan kehilangan / kerusakan surat asli / barang-barang / sebagai berikut : - Akta Jual Beli dari PPAT Kecamatan Kramat Jati No. 953/1.711.1 Tanggal 30 Juli 1988 dan Girik BPT (Bekas Tanah Partikelir) No. 1076.

Jakarta, 19 November 2025
An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Subbagian Tata Usaha
Ttd.
Konrad Manurung, S.E., M.H.
NIP. 197804142006041003

USAHA ANDA BELUM LAKU
PASANG IKLAN ANDA DISINI!
HOTLINE 021-53699507
Rakyat Merdeka



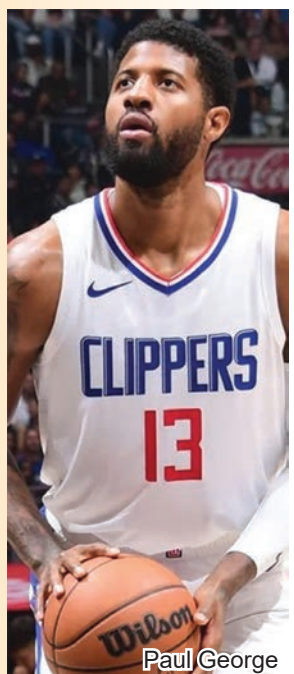
TINJU

Christian Tantang Para Petarung Elite

CHRISTIAN Mbilli (29-0-1, 24 KO) resmi menyanggah status juara dunia penuh kelas menengah super (168 pon) WBC pekan ini. Petinju asal Kamerun tersebut naik takhta setelah rencana duel melawan Hamzah Sheeraz gagal mencapai kesepakatan negosiasi. Meski baru saja dipromosikan dari juara interim, Mbilli enggan bermain aman. Petinju berusia 30 tahun ini justru menantang risiko besar dengan membidik nama-nama elite demi membangun kredibilitas sebagai penguasa sejati di kelasnya. "Saya berharap kami bisa mendapatkan nama besar secepatnya. Saya tidak ingin menunggu terlalu lama," tegas Mbilli seperti dikutip dari *Worldboxing*, kemarin. Target Mbilli tidak main-main. Ia secara terbuka mengincar Caleb Plant, Jaime Munguia, dan Edgar Berlanga sebagai lawan untuk pertahanan gelar perdananya. Menurutnya,

menghadapi petinju dengan profil tinggi sangat krusial untuk meningkatkan nilai jual dan profinya di panggung tinju dunia. Nama Jaime Munguia menjadi salah satu yang paling santer dikaitkan, mengingat petinju Meksiko itu baru saja menolak tawaran IBF. Di sisi lain, rencana menghadapi megabintang Canelo Alvarez dipastikan tertunda. Alvarez dijadwalkan baru akan kembali naik ring pada 12 September di Riyadh setelah menjalani operasi siku dan masa pemulihan pasca-kekalahan dari Terence Crawford. Walau selama ini dianggap dominan melawan petinju level menengah, Mbilli sadar dirinya masih membutuhkan satu kemenangan besar untuk mengukuhkan namanya di level elite. Dengan sabuk juara penuh di tangan, ia merasa memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat untuk mewujudkan laga blockbuster tersebut. ■ SAR

TERJERAT KASUS ZAT TERLARANG Paul Diskors Dan Rugi Rp 181 Miliar



lakukan kesalahan dengan mengonsumsi obat yang tidak pantas. Saya bertanggung jawab penuh," ujar George. Skorsing 25 laga merupakan standar hukuman untuk pelanggaran pertama dalam kesepakatan bersama antara NBA dan asosiasi pemain. Tak hanya kehilangan waktu bermain, George juga merugi secara finansial. Dari total gaji musimannya sebesar 51,7 juta dolar AS, ia diperkirakan kehilangan sekitar 11,7 juta dolar AS selama masa skorsing. Jika dikonversi dengan kurs sekitar Rp15.500 per dolar AS, jumlah tersebut setara dengan Rp181 miliar. Absennya George jelas menjadi pukulan besar bagi Sixers. Statistik menunjukkan Philadelphia mencatat rekor 16 kemenangan dan 11 kekalahan saat ia bermain, berbanding 10-10 ketika dirinya absen. Joel Embiid pun menegaskan peran George sulit digantikan. "Anda tidak bisa menggantikannya. Dia melakukan segalanya untuk tim ini, bertahan, mencetak angka, hingga menciptakan peluang," kata Embiid. Meski begitu, pelatih Nick Nurse memastikan kondisi mental George tetap baik dan masih mendapat dukungan penuh dari tim. Saat ini Sixers bertengger di peringkat keenam Wilayah Timur dengan rekor 26-21 dan harus berjuang menjaga posisi *play-off* tanpa salah satu motor utamanya selama lebih dari sebulan ke depan. ■ DNU

KABAR buruk datang untuk Philadelphia 76ers. Bintang mereka, Paul George, dijatuhi hukuman skors 25 pertandingan tanpa bayaran setelah terbukti melanggar Program Anti-Narkoba NBA/NBPA terkait penggunaan zat terlarang. Sanksi mulai berlaku Sabtu (31/1/2026), waktu Amerika Serikat saat Sixers menghadapi New Orleans Pelicans. NBA tidak merinci jenis zat maupun detail pelanggaran yang dilakukan pemain berusia 35 tahun tersebut. Dalam pernyataan kepada *ESPN*, George mengakui kesalahannya. Ia menyebut konsumsi obat yang tidak tepat terjadi ketika dirinya menjalani pengobatan terkait kesehatan mental. "Dalam proses mencari pengobatan untuk masalah yang saya alami, saya me-

Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, sukses menuntaskan dahaga gelar juara setelah memenangi laga All Indonesian Final di ajang Thailand Masters 2026.

THAILAND MASTERS 2026

Leo/Bagas Selebrasi Juara Banting Raket

DALAM partai puncak yang digelar di Nimibutr Stadium, kemarin, Leo/Bagas berhasil menundukkan pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lewat dua gim langsung 21-10 dan 21-17. Kemenangan dalam waktu 35 menit ini menjadi momen yang sangat emosional bagi Leo Rolly Carnando. Pasalnya, ini merupakan podium tertinggi pertama mereka sejak terakhir kali menjuarai Korea Open pada Agustus 2024 silam. Saking emosionalnya, Leo sempat melakukan selebrasi spontan dengan membanting raket di lapangan. "Saya meminta maaf karena selebrasi saya tadi membanting raket, karena udah lama enggak juara dan saya spontan banting raket," ujar Leo dalam keterangan PBSI. Leo mengakui perjalanan menuju juara kali ini tidak mudah secara mental, mengingat mereka hanya sempat mencicipi satu final di All England 2025 namun gagal juara. Ia juga

mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada jajaran pelatih yang terus memberikan dukungan penuh selama masa sulit tersebut. Terkait strategi di lapangan, Leo membeberkan kunci kemenangan mereka adalah dengan merendam kecepatan Raymond/Joaquin yang secara usia lebih muda. "Jangan lengah dan jangan mau menguad dengan kecepatan mereka, karena mereka lebih muda jadi tidak bisa dipungkiri mereka pasti lebih cepat," tambah Leo. Sementara itu, Bagas Maulana berharap medali emas di awal tahun 2026 ini menjadi pemicu kebangkitan karier mereka. Bagas menyebut motivasi dari orangtua dan keinginan kuat dari dalam diri menjadi bahan bakar utama untuk kembali naik ke podium tertinggi. "Kami sudah lama vakum podium dan kami mau bangkit lagi, ternyata ini rasanya kebangkitan, tetapi jangan cepat puas," tegas Bagas. ■ SAR



Leo/Bagas berhasil menundukkan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dua gim langsung.

AUSTRALIAN OPEN 2026 Tumbangkan Djokovic, Alcaraz Cetak Sejarah Career Grand Slam

CARLOS Alcaraz resmi mengukir tinta emas dalam sejarah dunia setelah menumbangkan sang legenda Novak Djokovic di final Australian Open 2026, kemarin. Kemenangan dramatis melalui empat set dengan skor 2-6, 6-2, 6-3, dan 7-5 ini memastikan Alcaraz meraih gelar perdananya di Melbourne Park. Pencapaian ini menobatkan petenis asal Spanyol tersebut sebagai pria termuda dalam sejarah Open Era yang berhasil melengkapi koleksi Career Grand Slam. Di usia 22 tahun, Alcaraz kini telah memenangi seluruh empat turnamen mayor dunia, sebuah pencapaian yang bahkan melampaui kecepatan rekor para legenda pendahulunya. Pertandingan di Rod Laver Arena dimulai dengan tekanan berat bagi Alcaraz. Novak Djokovic, yang tampil agresif sejak menit pertama, mendominasi set pembuka dan mematahkan servis Alcaraz dua kali. Alcaraz tampak kurang bertenaga, efek dari laga semifinal melawan Alexander Zverev. Namun, memasuki set kedua, Alcaraz mulai menemukan ritme permainannya dari garis belakang. Titik balik terjadi saat skor 1-1, di mana sebuah pukulan forehand Alcaraz sempat mengenai net namun tetap jatuh

di area lawan. Keberuntungan itu membakar semangatnya untuk balik menekan Djokovic dan menyamakan kedudukan set menjadi 1-1. Dominasi Alcaraz semakin terlihat pada set ketiga. Pemenang nomor satu dunia itu menunjukkan mobilitas luar biasa dengan mengejar setiap bola yang dilepaskan Djokovic. Penonton dibuat berdiri saat Alcaraz memenangi reli elektrik di gim keempat, sebuah momen yang memastikan kendali permainan berpindah sepenuhnya ke tangan sang pemuda Spanyol. Djokovic, yang memegang rekor 10 kemenangan beruntun di final Australian Open, tidak menyerah begitu saja. Di set keempat, petenis berusia 38 tahun itu menggali kemampuan terbaiknya dan berhasil menyela-matkan enam titik break (break points) pada gim kedua. Meskipun Djokovic memberikan perlawanan gigih, Alcaraz tetap tampil tenang di poin-poin krusial. Pada gim ke-12 yang menentukan di set keempat, Alcaraz akhirnya berhasil melakukan break yang menentukan. ■ SAR



Alex Marquez Desak Ducati Naikkan Level

ALEX Marquez tak ingin Ducati berpuas diri meski dominasinya masih terasa di MotoGP. Pembalap Gresini Racing itu secara tegas meminta pabrikan asal Italia tersebut kembali meningkatkan performa motor demi menghadapi persaingan musim 2026 yang diprediksi makin ketat. Status sebagai pengguna motor pabrikan musim depan memang memberi rasa aman bagi Alex. Namun, ia menilai keunggulan Ducati mulai tergerus setelah rival seperti Aprilia, KTM, hingga Honda menunjukkan lonjakan performa di paruh kedua musim lalu. Musim 2025 menjadi pencapaian terbaik dalam karier Alex. Ia finis *runner-up* klasemen akhir dengan tiga kemenangan balapan, hanya kalah dari sang kakak, Marc Marquez, yang tampil dominan bersama Ducati Lenovo Team. Bagi Alex, hasil tersebut menjadi modal penting sekaligus tekanan baru. "Status ini memberi saya rasa aman dan kedewasaan. Yang terpenting, kami akan mendapat semua material dari Ducati untuk membangun performa secara bertahap," ujar Alex saat peluncuran tim Gresini di Kuala Lumpur, seperti dikutip dari *MotorSport*, kemarin. Meski begitu, ia menegaskan pekerjaan besar tetap ada di tangan Ducati. "Kami akan mencoba membantu, tapi pada akhirnya Ducati yang harus bekerja lebih keras. Pabrikan lain semakin dekat di balapan-balapan terakhir," tegasnya. Aprilia bahkan sukses memenangi tiga dari empat seri penuh musim 2025, sementara KTM dan Honda juga mulai konsisten menembus barisan depan. Situasi ini membuat persaingan dipastikan jauh lebih terbuka. Terlebih, musim 2026 menjadi tahun terakhir penggunaan regulasi mesin 1.000 cc sebelum perubahan besar diberlakukan. ■ DNU

"Kami akan mencoba membantu, tapi pada akhirnya Ducati yang harus bekerja lebih keras. Pabrikan lain semakin dekat di balapan-balapan terakhir," tegasnya. Aprilia bahkan sukses memenangi tiga dari empat seri penuh musim 2025, sementara KTM dan Honda juga mulai konsisten menembus barisan depan. Situasi ini membuat persaingan dipastikan jauh lebih terbuka. Terlebih, musim 2026 menjadi tahun terakhir penggunaan regulasi mesin 1.000 cc sebelum perubahan besar diberlakukan. ■ DNU



PERKUAT TEKNOLOGI ENERGI & DIGITAL McLaren Resmi Gandeng Schneider Electric

MCLAREN Racing resmi mengandeng Schneider Electric sebagai mitra teknologi energi guna meningkatkan efisiensi dan performa operasional tim balapnya di berbagai kejuaraan dunia. Kerja sama ini mencakup seluruh lini balap McLaren, mulai dari tim Formula 1, Arrow McLaren IndyCar, F1 Academy, hingga program United Autosports di ajang World Endurance

Championship (WEC) Hypercar. Melalui kemitraan tersebut, Schneider Electric akan menyediakan solusi manajemen energi dan digital untuk mendukung kebutuhan daya di lintasan balap maupun fasilitas markas McLaren Technology Centre di Woking, Inggris. Chief Executive Officer (CEO) McLaren Racing Zak Brown menilai kolaborasi ini penting

untuk membawa operasional tim menjadi lebih cerdas dan efisien. "Kami akan mengeksplorasi berbagai pendekatan baru agar operasional semakin pintar dan efektif," ujar Brown seperti dikutip dari *ESPN*, kemarin. Tak hanya di sirkuit, optimalisasi juga dilakukan pada berbagai aset vital seperti terowongan angin, fasilitas pabrik, pusat data, hingga infrastruktur

teknologi informasi. Kedua perusahaan mengandeng pendekatan berbasis data, elektrifikasi, serta teknologi digital twin untuk menekan konsumsi energi sekaligus meningkatkan keberlanjutan. CEO Schneider Electric Olivier Blum menyebut dunia balap sebagai lingkungan paling ekstrim untuk menguji teknologi energi modern. "McLaren mendorong setiap sistem hingga batas maksimal. Di situlah solusi kami dalam performa, keandalan, dan efisiensi bisa memberikan dampak nyata," katanya. Kemitraan ini sekaligus menegaskan komitmen McLaren dalam mengembangkan teknologi balap yang lebih hemat energi tanpa mengorbankan kecepatan dan daya saing di lintasan. ■ DNU

IKLAN BARIS

KEHILANGAN
HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK
02276 LT: 34 LB: 34 A/N MUHAMAD
SOBARI JL AL-HIDAYAH RT/RW
01/02 PONDOK JAYA-TANGSEL
(Indro/22)

Telah hilang AJB no: 58/2016 tgl
9/2/2016 an Sahala Harahap jln Nurul
yakin RT 004/004 Kel Poris Plawad
indah kec Cipondoh kota tangerang yg
di buat PPAT Wil kec Cipondoh .hilang
Sabtu 15/6/2019 hilang di rnh yg
beralamat jln Ketapang RT 001/003 Kel
petir kec Cipondoh kota tangerang
(Zakir/22)

Telah hilang 1 (satu) lembar sertifikat
saham PT Pondok Indah Padang
Golf,Tbk No.SB, 602 atas nama : H.
Ramli Hasan Basri. Bagi yg
menemukan dapat menghubungi
kantor Golf Pondok Indah dengan
bagian Adm Saham.
(Any/22)

Hilang BPKB mobil Honda Freed
GB3 1.5 E AT Nopol: B 1569 TRB,
Noka: MHRGB3850DJ240509 ,
Nosin: L15A79046668 , a/n: Adhrian
Prinanda
(Any/22)

Telah hilang SHM No
04235/Jurangmangu Barat an Gaguk
Marlena, terletak di Kel. Jurangmangu
Barat, Kec.pdk aren, tangsel
(Any/22)

Hilang BPKB Suzuki 2013 Warna
Putih Metalik Nopol:B.2751.BBG
Noka: MHYKZE81SDJ213490
Nosin:K14BT1072296 A/n EFFENDI
KUSUMA
(Sandy/22)

Hilang BPKB Suzuki ST 150 Th 2014
Hitam Nopol:B.9754.BAL Noka:
MHYESL415EJ331763 Nosin:
G15A1D970039 A/n ADI PRIYANTO
(Sandy/22)

Dewa Dewi Keadilan

FOTO DIVHUMAS POLRI



Aiptu Maryono, PS Kasium Polsek Pegandon, Kendal Guru Ngaji Anak-anak

DI sela-sela tugasnya sebagai anggota Polri, Pemangku Sementara Kepala Seksi Umum (PS Kasium) Polsek Pegandon, Kendal, Jawa Tengah, Aiptu Maryono memilih mengabdikan waktu dengan mengajarkan ngaji kepada anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan tersebut rutin dilakukan Aiptu Maryono setiap hari, selepas dinas. Ia mengajar ngaji di Musala Ayub bin Ali, Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Dimulai selepas salat Maghrib, hingga menjelang Isya.

Aiptu Maryono mengaku terpenggil untuk meluangkan waktunya demi membimbing anak-anak membaca Al-Qur'an.

Menurutnya, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui tugas kepolisian, tetapi juga lewat pembinaan akhlak generasi muda.

"Menjaga keamanan itu penting, tapi membangun

akhlak generasi muda juga tanggung jawab bersama. Mengajar ngaji menjadi cara saya ikut berkontribusi," ujar Aiptu Maryono, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Aiptu Maryono dengan penuh kesabaran membimbing puluhan anak santri musala membaca Al-Qur'an. Anak-anak terlihat antusias mengikuti setiap pelajaran yang disampaikan.

Kehadiran Aiptu Maryono sebagai guru ngaji tidak hanya memberikan manfaat bagi para santri, tetapi juga menjadi inspirasi dan kebanggaan bagi masyarakat setempat.

Warga menilai kegiatan ini mendorong tumbuhnya semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

Perbuatan dilakukan Aiptu Maryono menunjukkan bahwa pengabdian seorang anggota Polri tidak terbatas pada tugas formal semata, melainkan juga mencakup peran sosial dan spiritual di tengah masyarakat. ■ YUD



HBKB & OLAHRAGA: Warga berolahraga saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/2/2026). Kementerian Pemuda dan Olahraga menargetkan pelaksanaan *Car Free Day* atau HBKB di 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia pada 2029, sebagai upaya mendorong budaya hidup sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

DWI PAMBUDO/RAKYAT MERDEKA/RMID

Red Notice Terbit, MRC Jadi Buronan Internasional

Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid (MRC). Dengan penerbitan red notice tersebut, saudagar minyak dan gas itu kini resmi menyandang status buronan internasional.

KEBERADAAN buron kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam perkara minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 tersebut, juga telah diketahui. "Red Notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026, atau seminggu yang lalu," ungkap Sekretaris National Central Bureau-Interpol (NCB) Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Brigjen Untung Widyatmoko dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Red notice tersebut, kata Untung, sudah disebar ke 196 negara anggota Interpol. Dia memastikan, penerbitan red notice akan membatasi ruang gerak MRC. Sebab, MRC hanya memiliki satu paspor, yakni paspor

Indonesia. "Tentunya untuk ruang gerak dari subjek ini sangat terbatas," imbuhnya.

Keberadaan MRC sendiri, menurut Untung, sudah diketahui. Diungkapkannya, saudagar minyak dan gas itu ada di salah satu negara anggota Interpol.

"Sudah kami identifikasikan dan sudah kami petakan dan kami pun sudah menjalin kontak. Tim sudah berangkat ke negara tersebut," tutur Untung yang didampingi Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Truno-yudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers.

Saat ini, Polri tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penangkapan. "Kami tidak tinggal diam, kami menindaklanjuti dari red notice tersebut," imbuhnya.

Pemintaan red notice untuk tersangka Riza Chalid telah

dijadikan Polri sejak September 2025. Namun, Interpol baru menerbitkan red notice tersebut pada bulan Januari 2026.

Terkait lamanya proses penerbitan red notice itu, Kabag Jatinter Polri, Kombes Ricky Purnama menuturkan, ada mekanisme yang harus dilakukan oleh kantor pusat Interpol di Lyon sebelum red notice terbit.

Pandangan sistem hukum yang berbeda-beda di setiap negara menjadi penghambat. Salah satunya terkait kerugian negara.

Ricky mengungkapkan, persepsi tindak pidana korupsi di Tanah Air, harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara.

Sementara dalam perspektif sistem hukum lainnya, korupsi tidak selalu identik dengan kerugian negara.

Polri melalui Set NCB Interpol Indonesia terus memberikan argumentasi terkait layaknya Riza Chalid masuk dalam red notice Interpol.

"Sampai akhirnya mereka memandang dan melihat bahwa persepsi yang kita yakinkan kepada

mereka itu bisa mereka terima, dan akhirnya pada minggu lalu telah terbit Red Notice tersebut," tuturnya.

Sekadar latar, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan MRC sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Dalam kasus ini, dia diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak, Banten.

Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka pada klaster kedua bersama delapan orang lainnya. Sementara pada klaster pertama, kasus ini turut menjerat sembilan orang tersangka, termasuk anak MRC, yaitu KER.

Dalam perjalanannya, Kejagung telah memanggil MRC sebanyak tiga kali. Namun, yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Gedung Bundar.

Akhirnya pada Juli 2025, Kejagung memasukkan namanya ke

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Seiring dengan itu, mengajukan red notice kepada NCB Hubinter Polri.

Selanjutnya nama MRC diajukan untuk menjadi buronan internasional ke Interpol Pusat di Lyon, Prancis.

Kejagung juga telah menetapkan MRC sebagai tersangka pencucian uang atau TPPU, pada Juli 2025 lalu. Penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Dalam penyidikan TPPU itu, Kejagung juga telah menyita sembilan unit mobil mewah dari pihak yang diduga terafiliasi dengan MRC.

Mobil mewah tersebut di antaranya yakni BMW, Toyota Rush, Mitsubishi Pajero Sport, Alphard, Mini Cooper, hingga Mercy. Selain itu, Kejagung juga telah menyita rumah mewah milik Riza Chalid yang berada di Rancamaya Golf Estate, Bogor, Jawa Barat, dan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. ■ YUD

Case Closed

Kasus Hibah Kwarda Pramuka Maluku Ada Pengembalian Dana Ke Kas Daerah

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Maluku menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Provinsi Maluku tahun anggaran 2022. Penghentian dilakukan lantaran ada pengembalian sebagian dana ke kas daerah.

Asisten Intelijen Kejati Maluku, Diky Oktavia, menyampaikan bahwa meski dalam proses penyelidikan ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pertanggungjawaban anggaran, Kwarda Pramuka Maluku telah mengembalikan dana sebesar Rp 384,4 juta dari total hibah Rp 2 miliar.

"Berdasarkan hasil temuan Inspektoral Provinsi Maluku, Kwarda Pramuka telah menindaklanjuti dengan menyetorkan kembali dana sebesar Rp 384,4 juta ke kas daerah pada 28 November 2023," ujar Diky, Jumat (30/1/2026).

Dengan adanya pengembalian tersebut, Kejati Maluku

memutuskan menghentikan penanganan perkara.

"Kesimpulan hasil ekspos, perkara ini kami hentikan," tuturnya.

Namun, dia berjanji, apabila nantinya ditemukan bukti baru, penyelidikan akan dibuka kembali.

Kasus ini bermula ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menghabiskan dana sebesar Rp 2 miliar kepada Kwarda Pramuka Maluku pada 2022. Dana hibah tersebut dicairkan dalam empat tahap.

Namun, dalam proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran, muncul dugaan kejanggalan yang sempat menjadi sorotan publik.

Persoalan ini sempat dibahas dalam rapat DPRD Provinsi Maluku pada 2023, menyusul adanya dugaan pengelolaan dana tanpa melibatkan seluruh pengurus Kwarda Pramuka Maluku. ■ YUD



UPACARA AGAMA BUDDHA: Sejumlah Bhikkhu mengikuti upacara pengecoran kedua Rupang Buddha Nusanantara di Wihara Muladharna, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (1/2/2026). Upacara ini menjadi simbol persatuan bagi umat Buddha dalam peringatan setengah abad Sangha Theravada Indonesia dengan mengangkat tema "Menapaki Jalan Mulia, Bersumbangsing bagi Negeri".

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT/FOC

Mantan Kasi Intel HSU Gugat Praperadilan KPK Tegaskan OTT Sah Dan Berlandaskan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU), AB, telah dilakukan berdasarkan dasar hukum yang kuat dan sah.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebagai respons atas gugatan praperadilan yang diajukan AB.

Budi menyatakan, KPK menghormati hak AB untuk menempuh upaya hukum melalui praperadilan. "KPK tentunya menghormati hak setiap pihak untuk menempuh upaya hukum, termasuk pengajuan praperadilan," ujar Budi saat dihubungi,

Minggu (1/2/2026) malam.

Namun demikian, Budi menegaskan bahwa seluruh rangkaian tindakan penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Menurutnya, penangkapan terhadap AB dilakukan dalam rangkaian OTT kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kejari HSU, Kalimantan Selatan. Perkara ini juga menjerat mantan Kepala Kejari HSU, APN.

"Tindakan penangkapan yang dilakukan KPK memiliki dasar hukum yang kuat dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP, yakni tertang-

kapnya seseorang saat melakukan tindak pidana, sesaat setelah melakukannya, diteriakkan massa, atau ditemukan barang bukti sesaat setelah kejadian," jelas Budi.

Ia menyebutkan, dalam perkara ini seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam KUHP telah terpenuhi. Dengan demikian, tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik KPK dinilai sah dan profesional.

"Seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," tegasnya.

AB sendiri mengajukan per-

mohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penangkapannya. Permohonan tersebut didaftarkan pada Selasa (27/1/2026), dengan KPK sebagai pihak termohon.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 10/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, dengan klasifikasi perkara mengenai sah atau tidaknya penangkapan. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Senin (9/2/2026).

Sebelumnya, KPK mengungkapkan praktik pemerasan di lingkungan Kejari HSU pada Desember 2025. Dalam kasus

tersebut, penyidik menetapkan tiga mantan pejabat Kejari HSU sebagai tersangka, yakni APN selaku Kajari HSU; AB selaku Kasi Intel; dan TAR selaku Kasi Perdana dan Tata Usaha Negara (Datun).

Dari hasil penyidikan, KPK mengungkapkan, APN yang baru menjabat sekitar tiga bulan diduga telah meraup uang sebesar Rp 1,36 miliar melalui praktik pemotongan anggaran di Kejari HSU.

Sementara AB diduga menerima uang sebesar Rp 63,2 juta dari sejumlah pihak selama periode Februari hingga Desember 2025. Adapun TAR diduga memperoleh uang Rp 1,07 miliar. ■ YUD

"Sampai akhirnya mereka memandang dan melihat bahwa persepsi yang kita yakinkan kepada mereka itu bisa mereka terima, dan akhirnya pada minggu lalu telah terbit Red Notice tersebut."

Kombes Ricky Purnama
Kabag Jatinter Polri





Sang musisi ini kapok dan minta maaf ke publik karena terjerat kasus narkoba yang membuatnya harus menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. "Semoga gue juga dibukain pintu maaf buat orang-orang yang sayang sama gue. Sorry banget gue mengecewakan kalian. Siapa tahu ada yang mengambil gue sebagai contoh, gue minta maaf banget gue bukan contoh yang baik gitu," ujar Onad.

ONADIO LEONARDO

Yerin Ha Perankan Shopie Baek

AKTRIS asal Australia Yerin Ha terpilih untuk memerankan karakter *Sophie Baek* di serial Netflix *Bridgerton 4*. Sosok Sophie Baek menjadi favorit fans karena memiliki karakter perempuan mandiri dan anti-aturan serta tumbuh di luar sistem sosial bangsawan.

Karakter ini menghadirkan dinamika baru dan menjadi pasangan romantis Benedict Bridgerton. Yerin Ha lahir pada 16 Januari 1998 di Sydney, Australia.

Ia berasal dari keluarga berdarah Korea Selatan, dengan latar seni yang kuat, termasuk sang nenek, Son Sook, aktris sekaligus poli-

tisi ternama. Karier profesionalnya bermula di teater pada 2019 dia tampil dalam produksi *Lord of the Flies* di Sydney Theatre Company, lalu debut televisi lewat serial *Reef Break*.

■ MER



FOTO: INSTAGRAM@YERINHA

Mariah Carey Menolak Disebut Penyanyi Legenda

PENYANYI Mariah Carey populer dengan julukan *Queen of Pop* dan sudah menghasilkan 19 *single* yang pernah memuncaki *Billboard Hot 100*. Namun, dengan berbagai kesuksesan itu ternyata dia menolak untuk disebut penyanyi legenda.

"Aku tidak melabeli diriku sebagai legenda. Aku masih terus bekerja, masih berusaha keras," jelas pelantun *We Be-*

long Together itu.

Menurutnya, jalannya masih panjang untuk bisa mendapat sebutan itu. Perempuan berusia 54 tahun itu mengatakan salah satu kunci untuk mempertahankan kesuksesan hingga lebih dari tiga dekade.

■ MER



FOTO: INSTAGRAM@MARIAHCAREY

Amanda Manopo Sedih, Difitnah Lagi Hamil Anak Haram

Perasaan Amanda Manopo campur aduk jalani kehamilan. Meski lagi bahagia akan menjadi seorang ibu, sang artis mengaku sedih ada pihak menuduh dirinya sedang hamil anak haram.

MANDA, sapaan Amanda kembali membahas soal kehamilan dirinya yang sudah memasuki usia kandungan empat bulan. Pesinetron *Ikatan Cinta* ini bangga bakal segera menjadi ibu.

"Bangga banget sekarang sudah di titik ini. Sebentar lagi jadi ibu," ungkap Manda.

Namun, di tengah kebahagiaan itu dia juga merasa sedih sekaligus kesal. Karena banyak ujaran kebencian yang dialamatkan pada bayi dalam kandungannya.

"Anak yang nggak tahu apa-apa harus banyak nanggung. Dikatain anak haram, bulan ini katanya mau lahiran lah," ungkap Manda.

Meskipun begitu, bintang film *Check Out Sekarang Paylater* (Caper) ini memilih *legowo* menghadapi tuduhan tersebut.

"Kita lewatin bareng-bareng ya," bilang Manda.

Istri Kenny Austin ini sangat bersyukur sang anak tidak pernah menyusahkan selama kehamilannya ini.

"Makasih sudah jadi anak yang pengertian, nggak nyusahin. Walaupun banyak yang *bully* kehadiran kamu. Kamu hadir membuka pintu rezeki orangtua kamu. Kamu memberikan banyak pelajaran dan pendewasaan," curhat Manda.

Dia mengaku, sudah tidak sabar

menanti kelahiran anak sulungnya itu.

"Nggak sabar buat kamu hadir. Anak ini akan jadi anak yang lucu dan penuh dengan berkat," harapnya.

Seperti diketahui, *hate comment* untuk sang calon bayi, bukan kali pertama dirasakan Manda. Sebelumnya, dia sempat murka karena dituduh hamil duluan.

"Emang aku tahu akan secepatnya dikasih? Emang ya gila pada," ujar Manda kala itu.

Dia mengatakan dirinya sebenarnya tidak terbiasa marah-marah. Namun, menuding bayi di kandungannya anak haram, tidak bisa dimaafkan.

"Aku nggak biasa kayak gini, maaf ya, sensitif banget, kesal, marah, nangis. Sotoy banget. Lucunya lagi, pada bilang bentar lagi lahiran Januari atau Februari terus bilang anaknya prematur, mulutnya tuh pengen aku sentil. Kamu pikir anakku di *download*? Bayi ini di *preorder* 9 bulan, dikasih sama Tuhan," tegasnya.

Gara-gara itu, Manda akhirnya bertekad untuk merahasiakan anaknya kelak.

"Kalau hamil nggak mungkin aku rahasiain, nanti ngilang di sosmed ditanyain. Ya udah aku kasih tahu hamil. Tapi nanti pas lahiran kalian nggak akan tau apa-apa," ancam Manda. ■ TAR



FOTO: INSTAGRAM@WASILA.MANDASKATIC

Gisella Anastasia Sedot Lemak Wajah

ARTIS Gisella Anastasia mengakui penampilannya berubah karena telah melakukan perawatan kecantikan. Gisel bilang sudah melakukan sedot lemak wajah di Korea Selatan.

"Jadinya aku benang-benang gitu loh (*facelift*), sama ada sedot lemak di sini sedikit (bagian wajah)," ungkap Gisel sambil tertawa.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengakui wajahnya kini terlihat lebih cembung, terutama di bagian pipi karena berat badan yang sedikit naik. Meskipun pipinya tembem sejak lahir sempat menimbulkan rasa kurang percaya diri, Gisel tetap berusaha membuat wajahnya terlihat lebih tirus sesuai standar kecantikan.

"Pipi tuh ya *insecure* tapi *mild* (ringan untuk diperbaiki) ya, karena udah dari lahir kondisinya begitu. *I'm dealing with it* udah dari lama," tandas ibu satu anak itu. ■ MER



FOTO: INSTAGRAM@GISEL_LA

SELEB TWITT

TANGERANG JADI LOKASI SYUTING INTERNASIONAL GAMBARKAN MYANMAR

Jalan KS Tubun, Kota Tangerang, Banten, ditutup sementara pada tanggal 28 hingga 31 Januari, untuk syuting film internasional berjudul *Extraction: Tygo*, yang dibintangi *member BLACKPINK*, Lisa. Walaupun sempat dibangga-banggain warga, namun proses syuting justru bikin pro-kontra lantaran set lokasi film diduga diubah menjadi negara lain, yakni Myanmar demi kebutuhan cerita.



Fajar Nugros @fajarnugros (Sutradara)
Ini malah bagus. Kalau jadi apapun tapi pilih syuting di Indonesia. Padahal bisa di studio, Malaysia, Filipin, tapi milih di Indonesia artinya sistem kita udah *support*.



Picko @JempolKingKong (Selebtwit)
Padahal hal semacam ini udah biasa. Namanya juga film, kalau Indonesia bisa terkenal sebagai tempat syuting yang kondusif dan representatif kan malah bagus buat *brand* wisata Indonesia itu sendiri.



Andika Winandar @Dika81093 (Blogger)
Mungkin latarnya emang Myanmar, cuman susah kalau syuting di sana, jadi dipilih yang mirip-mirip.



Joni Irawan @joni_member (Selebtwit)
Nggak perlu marah-marah, namanya juga syuting film.



Rizky @bungsuwinartha (Selebtwit)
Apakah biaya produksi di Indonesia lebih murah dibanding Myanmar?



Chandra Manurung @ChandraMan7679 (Selebtwit)
Mau latar belakang apapun, yang penting jadi devisa negara titik.



Kartika @k4rtik4tik (Selebtwit)
Kalau syuting di Myanmar-nya langsung nggak *safety* guys, negaranya lagi bergejolak terus.



Alara @dazziel (Selebtwit)
Kasian ya, malah dijadiin *cosplay* Myanmar.